PEMERINTAH PROVINSI RIAU

R P J P D

PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2005 - 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI RIAU TAHUN 2005 – 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dan RPJPD Provinsi Riau telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025;

b. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 264 ayat (5), RPJPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2005 – 2025.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 1, Angka 4, Angka 5, Angka 6 diubah dan ditambah 3 (tiga) Angka yaitu Angka 7, Angka 8 dan Angka 9, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD Provinsi Riau adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Riau adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) RPJPD Provinsi Riau sebagaimana tercantum pada dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) RPJPD Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Riau yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.
(2a) RPJMD Provinsi Riau yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Perubahan RPJPD Provinsi Riau tahun 2005-2025 paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

(3) Perubahan RPJPD Provinsi Riau disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bagian ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan Daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan Daerah dan isu strategis yang menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

Bagian ini menyajikan visi dan misi dalam dokumen RPJPD yang menggambarkan keadaan atau cita–cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang.

BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bagian ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok dan bagaimanan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap 5 (lima) tahunan selama 4 (empat) periode.

BAB VI : PENUTUP

Pada bagian ini berisi penjelasan singkat substansi dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) RPJPD Provinsi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota.

(2) RPJPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

(3) RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi, dan RPJMN.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) RPJPD Kabupaten/Kota yang tidak selaras dengan Perubahan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 wajib disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

(2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2017
GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

H. AHMAD HIJAZI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2017 NOMOR : 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU : (11/379/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2005 – 2025

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025. Perubahan RPJPD Provinsi Riau dilakukan karena berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005–2025, sistematika maupun tatacara penyusunan dokumen dimaksud belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta penyesuaian terhadap perkembangan terkini, sehingga harus dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 dengan mengikuti ketentuan sistem Perencanaan Pembangunan yang saat ini masih berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I:

Cukup Jelas

Pasal II:

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 12

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2005-2025

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 LATAR BELAKANG I-1

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-3

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA I-4

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN I-4

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN I-5

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI II-1

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1

2.1.2 Topografi , Geologi, Hidrologi dan Klimatologi II-2

2.1.3 Penggunaan Lahan II-2

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah II-2

2.1.5 Wilayah Rawan Bencana II-3

2.1.6 Demografi II-5

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II-5

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi. II-5

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial II-8

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM II-10

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib II-10

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan II-25

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH II-33

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-33

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-33

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi II-34

2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia II-35

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH III-1

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH III-1

3.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat. III-1

3.1.2 Pelayanan Umum. III-2

3.1.3 Daya Saing Daerah III-12

3.2 ISU STRATEGIS III-13

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH IV-1

4.1 VISI IV-1

4.2 MISI IV-2

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH V-1

5.1 ARAH KEBIJAKAN DAERAH V-1

5.1.1 Tahap Lima Tahun Ke 1 (2005-2009) V-2

5.1.2 Tahap Lima Tahun Ke 2 (2010-2014) V-4

5.1.3 Tahap Lima Tahun Ke 3 (2015-2019) V-6

5.1.4 Tahap Lima Tahun Ke 4 (2020-2024) V-16

5.2 SASARAN POKOK V-25
5.3 PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS KE DALAM EVALUASI RPJPD PROVINSI RIAU 2005- 2025 ..... V-44
BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2005-2015 di Provinsi Riau II-11
Tabel 2.2. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Riau II-14
Tabel 2.3. Penilaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2010 – 2015 Provinsi Riau II-23
Tabel 2.4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon, Telepon Seluler (HP), Komputer Desktop, Komputer Laptop Tahun 2015 Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Riau II-25
Tabel 2.5. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama Tahun 2005-2015 Provinsi Riau II-26
Tabel 2.6. Perkembangan Produksi Sayur-sayuran Tahun 2005 – 2015 Provinsi Riau . II-26
Tabel 2.7. Perkembangan Produksi Buah-buahan Tahun 2005 – 2015 Provinsi Riau II-27
Tabel 2.8. Perkembangan Populasi dan Produksi Ruminansia dan Daging Unggas Tahun 2005 – 2015 Provinsi Riau II-27
Tabel 2.9. Luas Areal, Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Perkebunan Utama Tahun 2005 – 2015 Provinsi Riau II-28
Tabel 2.10. Luas Areal, Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Perkebunan Utama Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 Provinsi Riau II-28
Tabel 2.11. Potensi Pertambangan Menurut Jenis Provinsi Riau II-29
Tabel 2.12. Data Objek dan Daya Tarik Wisata Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau II-30
Tabel 2.13. Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2011 – 2015 Provinsi Riau II-31
Tabel 2.14. Jumlah Keberangkatan Pesawat, Penumpang, Barang dan Pos menurut Pelabuhan Udara Tahun 2015 ..... II-34
Tabel 2.15. Angka Kriminalitas II-35
Tabel 3.1. Isu Strategis III-13
Tabel 5.1. Sasaran Pokok Pembangunan dan Indikator Kinerja Pembangunan Jangka Panjang V-26
Tabel 5.2. Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah Riau V-35
Tabel 5.3. Pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam arah kebijakan Evaluasi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 .....V-45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Administrasi Provinsi Riau II-1
Gambar 2.2. Piramida Penduduk Provinsi Riau Hasil Sensus Penduduk Tahun 2015 ..... II-5
Gambar 2.3. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2003 – 2015 di Provinsi Riau II-11
Gambar 2.4. Perkembangan Jumlah Puskesmas, Pustu dan Pusling Tahun 2005 – 2015 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau II-12
Gambar 2.5. Kondisi Jalan Provinsi Riau tahun 2011-2015 (dalam Km) II-13
Gambar 2.6. Pembangunan Rumah Melalui Perumnas, Developer, Real Estate dan Koperasi Tahun 2005 – 2014 di Provinsi Riau II-14
Gambar 2.7. Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Riau tahun 2005-2015 ..... II-21
Gambar 2.8. Perkembangan Jumlah Ormas, LSM dan OKP Provinsi Riau 2005-2014 ..... II-23
Gambar 2.9. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2008-2015 (%) II-29
Gambar 2.10. Produksi Pertambangan Tahun 2010-2015 Provinsi Riau II-30
Gambar 2.11. Jumlah Tenaga Kerja Industri Provinsi Riau II-32
Gambar 5.1. Tahapan Pembangunan dan Prioritas Umum Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau V-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional secara eksplisit dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan suatu kegiatan perencanaan yang terstruktur, terukur dan terintegrasi antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun, sesuai dengan pasal 263 ayat (2) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa dokumen rencana pembangunan daerah antara lain : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Pembangunan nasional maupun daerah yang berkelanjutan memerlukan perencanaan yang berkualitas. Setidaknya perencanaan yang berkualitas tersebut meliputi:

1) Dapat menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat baik saat ini dan antisipasi ke depan;
2) Efektif, dimana perencanaan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi berdasarkan kepada prioritas yang telah ditetapkan, sesuai dengan pentahapan pencapaian hasil;
3) Komprehensif, yang diindikasikan oleh adanya sinergitas dan konsistensi perencanaan. Sinergitas dapat dilihat dari sejauhmana integrasi dan sinkronisasi perencanaan baik antar sektor, antar level pemerintahan, maupun pemangku kepentingan. Sedangkan konsisten menegaskan bahwa perencanaan perlu menjaga keberlanjutan selama periode perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, sehingga diharapkan dapat menuntaskan penyelesaian

masalah atau target capaian perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu tertentu;

4) Partsipatif, dimana proses perencanaan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan sehingga diperoleh hasil yang baik dan rasa memiliki;

5) Transparan dan akuntabel, dimana perencanaan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan pendekatan keadilan dan pemerataan. Selain itu, perencanaan disusun dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pegendalian dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Meskipun undang-undang secara jelas memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan pembangunan pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Hubungan keterkaitan tersebut untuk memastikan integrasi pembangunan secara nasional dengan memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum maupun keuangan.

Untuk perencanaan jangka panjang daerah yang dituangkan pada dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) harus memperhatikan Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagaimana yang diatur pada Undang-undang Nomer 17 Tahun 2007. RPJPD dalam hal ini diselaraskan dengan periode dan arah kebijakan RPJPN dengan periode 2005 – 2025. Disamping itu, penyusunan dokumen RPJPD perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada proses pelaksanaan rencana jangka panjang daerah, pemerintah daerah perlu melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJPD untuk menjamin tercapainya sasaran pokok pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam hal terjadinya perubahan-perubahan sangat mendasar yang mempengaruhi secara siginfikan terhadap pencapaian visi dan misi jangka panjang daerah, maka dapat dilakukan perubahan terhadap dokumen RPJPD sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 282 yang menyatakan bahwa perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;

c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau

d. merugikan kepentingan nasional.

Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional. Sedangkan merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Perubahan terhadap dokumen RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 dilakukan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan beberapa pertimbangan yang mendasari perubahan tersebut yaitu:

a. Dokumen RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 yang disahkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun Tahun 2009 disusun belum menurut ketentuan yang diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010;
b. Adanya perubahan signifikan pada struktur perekonomian global yang mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah khususnya Provinsi Riau yang dapat menekan pencapaian sasaran-sasaran pokok rencana pembangunan jangka panjang Provinsi Riau;
c. Perlunya penyesuaian dan penyelarasan rencana pembangunan jangka panjang terhadap perubahan-perubahan aktual kebijakan nasional;
d. Perlunya mempertajam fokus, sasaran pokok dan arah kebijakan jangka panjang daerah dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Riau.

Perubahan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 disusun melalui tahapan perencanaan teknokratik yang diikuti dengan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Provinsi Riau. Perubahan RPJPD ini diharapkan dapat mengarahkan dengan lebih fokus pada perencanaan di tingkat yang lebih detil pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka tahunan daerah untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Riau yang mandiri dan sejahtera.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut :

1) Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN RPJPD DENGAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

Dokumen Perubahan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005–2025 merupakan satu kesatuan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat tetap memperhatikan arah dan kebijakan dari RPJP Nasional.

Dokumen perubahan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005–2025 disusun dengan berpedoman pada RPJPN, berpedoman pada RTRW Provinsi Riau, Mengacu pada RPJPN melalui penyelenggaran antara visi dan misi arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau dengan visi, misi, arah tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.

Disamping itu, perubahan RPJPD Provinsi Riau juga memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi tetangga dilakukan melalui penyelarasan antara arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang provinsi Sumatra barat, Jambi, Kepulauan Riau dan Sumatra utara. Selain berpedoman dan memperhatikan RPJP Nasional dan RTRW, penyusunan RPJPD Provinsi Riau juga memperhatikan dokumen lainnya seperti Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Isu Pemanasan Global dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 disusun dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

3.2 Isu Strategis

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi

4.2 Misi

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1 Arah Kebijakan Daerah

5.2 Sasaran Pokok

BAB VI PENUTUP

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan perubahan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 dimaksudkan sebagai acuan daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan sinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Provinsi Riau dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Provinsi Riau.

Tujuan penyusunan perubahan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 adalah :

1. Menyesuaikan dimensi waktu dan tempat visi pembanguan jangka panjang Provinsi Riau dengan visi jangka panjang pembangunan nasional

2. Menyesuaikan proses penyusunan dan sistematika dokumen RPJPD Provinsi riau sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

3. Melakukan reorganisasi fokus pembangunan pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau pada tiap pentahapan pembangunannya berdasarkan evaluasi pencapaian rencana jangka panjang dalam rangka akselerasi pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau.

4. Mewujudkan perencanan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang ada pada provinsi Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Wilayah Provinsi Riau secara administrasi pemerintahan terdiri atas 10 (sepuluh) Kabupaten dan 2 (dua) Kota dengan luas wilayah Provinsi Riau secara keseluruhan adalah 90.128,76 Km^2, dimana terdiri dari 89.083,57 Km^2 luas daratan dan 1.045,19 Km^2 luas lautan atau perairan. Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota. Kesepuluh Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti. Dua Kota adalah Kota Pekanbaru dan Dumai.

Secara astronomis Provinsi Riau terletak pada posisi $01^0 05'00"$ Lintang Selatan, $02^0 25'00"$ Lintang Utara atau antara $100^0 00'00"$ Bujur Timur hingga $105^0 05'00"$ Bujur Timur. Secara geografis Provinsi Riau berbatasan dengan provinsi lain dan negara tetangga sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat, Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Melaka, Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Gambar 2. 1. Peta Administrasi Provinsi Riau

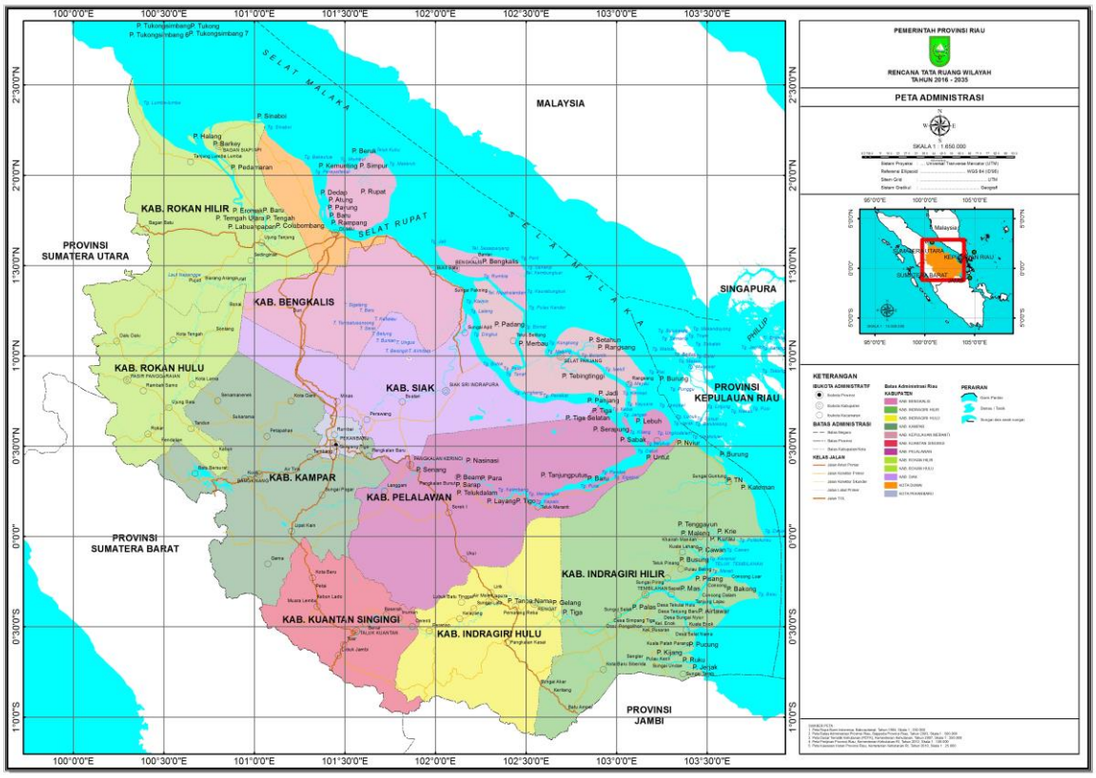

Secara umum, Provinsi Riau dapat dibagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan daratan dan kawasan pesisir. Pada Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa kawasan daratan mencakup Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Sementara itu, kawasan pesisir mencakup Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Apabila dibandingkan perkembangan pembangunan antara kawasan daratan dan kawasan pesisir Provinsi Riau, pembangunan kawasan daratan lebih maju dari pada kawasan pesisir. Perkembangan kawasan daratan ditopang oleh infrastruktur dan kualitas sumberdaya manusia yang lebih baik. Sementara itu kawasan pesisir lebih tertinggal karena kondisi wilayah yang pada umumnya adalah wilayah kepulauan dengan sarana transportasi air/laut yang belum memadai. Kondisi alam ini menuntut untuk pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi air/laut yang menghubungkan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar.

2.1.2 Topografi, Geologi, Hidrologi dan Klimatologi

Provinsi Riau bertopografi dataran rendah dan sedikit bergelombang dengan rataan ketinggian 10 meter diatas permukaan laut. Kemiringan lahan 0 - 2% seluas 1.157.006 hektar, kemiringan 15 - 40% seluas 737.966 hektar dan kemiringan lebih besar dari 40% seluas 550.928 hektar.

kondisi geologi Riau didominasi oleh batuan sedimen kuarter dengan sisipan batuan sedimen tersier di bagian barat dan selatan. Ditinjau dari potensi bencana alam geologi, sebagian besar wilayah Provinsi Riau bagian tengah dan barat termasuk zona lipatan (*folded zone*). Kemungkinan terjadinya gempa bumi di bagian barat dipengaruhi oleh keaktifan vulkanis di daerah Sumatera Barat. Sedangkan potensi gerakan tanah relatif kecil karena wilayah Provinsi Riau umumnya datar, kecuali sebagian wilayah barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.

Provinsi Riau memiliki 4 sungai utama yaitu Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar dan Sungai Indragiri. Sungai Kampar dan Sungai Siak pada saat ini merupakan sungai prioritas Nasional. Sungai terpanjang di Provinsi Riau adalah Sungai Indragiri dengan panjang 645 kilometer. Sungai terdalam adalah Sungai Siak dengan kedalaman 8 - 12 meter.

Provinsi Riau mempunyai tipe iklim Af, sedangkan menurut Schmidt dan Ferguson tipe iklim berkisar antara A-B-C. Daerah Provinsi Riau beriklim tropis basah. Secara geografis Provinsi Riau dilintasi oleh garis khatulistiwa dan mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

2.1.3 Penggunaan Lahan

Luas wilayah daratan Provinsi Riau adalah 8.908.357 hektar. Penggunaan lahan di Provinsi Riau sebagai berikut : (1) Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, (2) Hutan Lindung (3) Hutan produksi Terbatas, (4) Hutan Produksi, (5) Hutan produksi yang dapat dikonversi, dan (6) Areal Penggunaan Lain/APL dengan rincian luasan mengacu kepada Perda RTRW Provinsi Riau.

2.1.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Provinsi Riau yang paling besar adalah sektor perkebunan dan pertambangan. Untuk perkebunan, tanaman kelapa sawit merupakan tanaman terluas yang diusahakan di Provinsi Riau. Pada tahun 2005, areal tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau seluas 1,42 juta hektar dengan jumlah KK 269.316, meningkat menjadi 2,42 juta hektar pada tahun 2015 dengan jumlah Kepala Keluarga yang mengusahakannya sebanyak 521.509 KK. Selama periode 2005 - 2015, rata-rata laju pertambahan luas areal kelapa sawit di Provinsi Riau meningkat sebesar 5,54% per tahun. Areal perkebunan kelapa sawit Provinsi Riau merupakan yang terluas di Indonesia, dengan persentase sebesar 21,08% dari total luas areal kelapa sawit Nasional (11,3 juta hektar) (Statistik Perkebunan Indonesia, 2015).

Tanaman perkebunan terluas kedua setelah kelapa sawit adalah tanaman kelapa. Pada tahun 2005, areal tanaman kelapa seluas 546.938 hektar dengan jumlah keluarga petani kelapa sebanyak 291.509 KK menurun menjadi 515.167 hektar tahun 2015 dengan jumlah keluarga

petani kelapa sebanyak 208.473 KK. Selama periode 2005 - 2015, rata-rata laju penurunan luas areal di Provinsi Riau menurun sebesar 0,59% per tahun. Menurunnya areal kelapa di Provinsi Riau lebih disebabkan karena tingginya area tanaman kelapa yang sudah tua dan rusak sebagai akibat instrusi air laut dibandingkan luas area peremajaan. Luas areal kelapa yang ada di Provinsi Riau merupakan yang terluas di Indonesia dengan persentase 4,75% dari total luas areal kelapa Nasional (3,57 juta hektar).

Tanaman perkebunan terluas ketiga setelah kelapa sawit dan kelapa adalah tanaman karet. Pada tahun 2005, areal tanaman karet di Provinsi Riau seluas 528.734 hektar dengan jumlah keluarga petani karet sebanyak 274.369 KK menurun menjadi 501.787 hektar pada tahun 2015 dengan jumlah keluarga petani karet sebanyak 239.941 KK. Selama periode 2005 – 2015, rata-rata penurunan luas areal karet sebesar 0,50% per tahun. Pertumbuhan menurun luas areal karet di Provinsi Riau sebagai akibat konversi lahan karet menjadi lahan kelapa sawit disamping tanaman karet yang tua/rusak. Luas areal karet di Riau mencapai 3,08% dari total luas areal karet nasional (3,62 Juta Hektar).

Produksi pertambangan Provinsi Riau yang terus diusahakan selama periode 2011 – 2015 meliputi minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Selama periode ini, produksi minyak bumi Provinsi cenderung menurun dikarenakan meningkatnya jumlah sumur yang tua dan kurang produktif. Pada tahun 2010, produksi minyak bumi Provinsi Riau 133,590,640 barel, menurun menjadi 126,556,612 barel pada tahun 2013. Pada tahun 2015, produksi minyak bumi terus menurun menjadi 111.064,01 ribu barel. Selama periode 2010 – 2015, rata-rata pertumbuhan produksi minyak bumi Provinsi Riau menurun sebesar -3,53% per tahun. Produksi minyak bumi dari bumi Provinsi Riau merupakan yang terbesar di Indonesia dan hanya sebagian kecil yang diolah di Provinsi Riau sebagian besar diekspor dalam bentuk minyak mentah sehingga nilai tambah diperoleh negara pengimpor. Sebaliknya Provinsi Riau mengimpor hasil minyak sebesar 271.530,44 ribu US$ minyak olahan dari luar.

2.1.5 Wilayah Rawan Bencana

Bencana alam yang terjadi di Provinsi Riau pada umumnya adalah banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, puting beliung, dan tanah longsor. Kebakaran hutan dan lahan semakin tahun semakin besar. Tahun 2015, sejumlah 18.425 orang menderita akibatnya dan 425 orang mengungsi. Jumlah titik api terbanyak ditemukan terutama di Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Siak. Kebakaran umumnya terjadi di lahan gambut.

Selama 2010 – 2014, jumlah titik api yang terjadi di Provinsi Riau meningkat secara berfluktuatif. Pada tahun 2010, jumlah titik api mencapai 1.772 titik api. Pada tahun 2012, jumlah titik api mengalami peningkatan menjadi 4.686 titik api dan jumlahnya sedikit menurun pada tahun 2015 yaitu sebanyak 1.632 titik api.

Hampir 99% kejadian kebakaran lahan dan hutan di Riau disebabkan oleh faktor manusia, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Pembukaan lahan dengan cara membakar baik yang dilakukan oleh perusahaan besar maupun masyarakat sering tidak terkendali sehingga menimbulkan kebakaran yang meluas. Kejadian ini diperparah oleh kemarau panjang yang dipicu oleh fenomena ENSO (El-Nino Southern Oscilation). Peningkatan CO2 selama 100 tahun terakhir telah mengakibatkan adanya peningkatan suhu di muka bumi yang memicu fenomena ENSO di kawasan Asia Tenggara sehingga menimbulkan kekeringan yang panjang di Indonesia dan meningkatkan kerawanan kebakaran lahan dan hutan. Pada bulan kering yang rawan terjadi kebakaran lahan dan hutan mempunyai rata-rata curah hujan 1300-2700 mm, dengan suhu udara 26,98 – 27,51^{0}C, seperti yang terjadi pada tahun 2015 di Riau.

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Riau adalah, antara lain:

1) Dominasi lahan gambut seluas lebih dari 4,8 juta ha (46% luas wilayah daratan), sebagian besar sudah terdrainase untuk usaha hutan tanaman dan perkebunan sehingga rentan terbakar dan sulit dipadamkan.(sumber: BPS Provinsi Riau 2014)
2) Pertambahan jumlah penduduk mencapai 3,58% per tahun (Hasil Sensus penduduk tahun 2010), khususnya disebabkan oleh migrasi penduduk yang masuk dari wilayah sekitar Riau dimotivasi oleh perluasan usaha di bidang perkebunan, khususnya kelapa sawit yang mempunyai prospek ekonomi tinggi.
3) Pola pembukaan lahan perkebunan dan pertanian dengan teknik tebas bakar (slash and burn) yang biasa digunakan di lahan mineral telah dilakukan juga untuk membuka/membersihkan lahan (land clearing) di lahan gambut.
4) Konflik penguasaan lahan antara masyarakat dengan perusahaan hutan tanaman dan perkebunan, dimana ada sebagian masyarakat membakar lahan dan tanaman sebagai salah satu cara untuk menguasai lahan.
5) Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha berbasis lahan, serta pemerintah daerah yang masih rendah dalam menyiapkan infrastruktur pencegahan kebakaran lahan dan hutan.
6) Penegakan hukum yang masih lemah, khususnya terhadap pelaku dari dunia usaha.

Sampai saat ini penanggulangan kebakaran hutan masih menekankan pada pemadaman api pada saat terjadi kebakaran, sedangkan upaya sistem pencegahan dan peringatan dini dalam penanggulangan kebakaran lahan dan hutan belum maksimal dilakukan. Permasalahan kebakaran lahan dan hutan juga tidak terlepas dari lemahnya pengawasan oleh pemerintah, tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, sehingga belum mentaati ketentuan yang berlaku. Selain itu, cara membakar untuk membuka/membersihkan lahan masih merupakan cara yang paling murah dan belum didapat teknologi tepat guna dan murah yang dapat diadopsi oleh masyarakat. Tingginya konflik lahan di konsesi hutan tanaman dan perkebunan besar memicu penggunaan api sebagai alat/senjata oleh masyarakat untuk mendapatkan lahan.

Kebakaran lahan dan hutan telah menimbulkan kerugian sangat besar, baik terhadap harta benda, keanekaragaman hayati, aktivitas ekonomi dan sosial, transportasi dan kesehatan, maupun hubungan antar negara akibat asap yang ditimbulkan. Kebakaran lahan dan hutan tahun 2013 seluas ± 15.269 ha di Provinsi Riau telah menyebabkan menurunnya kualitas udara ambien sehingga menimbulan gangguan kesehatan, berupa: Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), pnemonia, asma, infeksi mata, dan iritasi kulit. Pada tahun 2013, Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat jumlah penderita ISPA sebanyak 15.346 orang, 943 orang Pnemonia, 803 orang Asma, 888 orang Infeksi Mata, dan 998 orang Iritasi kulit. Untuk menghindari korban lebih banyak, khususnya pada anak-anak, maka kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan selama beberapa hari pada saat kondisi ISPU berbahaya.

Akibat kabut asap yang ditimbulkannya, visibility atau jarak pandang mencapai di bawah 500 meter sehingga beberapa penerbangan dari dan ke bandar udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sering dibatalkan. Kondisi ini juga menganggu transportasi darat dan laut. Asap yang ditimbulkan juga sering menyebar sampai lintas batas negara, khususnya Malaysia dan Singapore, sering mengganggu hubungan luar negeri Indonesia. Kebakaran yang terjadi di lahan gambut memberikan dampak yang lebih besar terhadap emisi CO2 dan gas rumah kaca dibandingkan kebakaran yang terjadi di kawasan non gambut. Selain itu emisi partikel yang terlepas ke udara akibat kebakaran gambut 10 kali lebih banyak dibandingkan kebakaran non gambut.

2.1.6 Demografi

Pada tahun 1980 jumlah penduduk Riau tercatat sebanyak 1.743.340 jiwa kemudian pada tahun 1990 meningkat menjadi 2.714.280 jiwa atau meningkat rata-rata per tahun sebesar 5% selama kurun waktu 1980-1990. Diawal abad 21 yakni tahun 2000 penduduk Riau berjumlah 3.907.763 jiwa. Pada sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk Riau telah meningkat menjadi 5.538.367 jiwa atau mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 4,1% selama periode 2000-2010 serta pada tahun 2015 jumlah penduduk Provinsi Riau menjadi 6.344.402 jiwa.

Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau mempunyai penduduk terbesar di Provinsi Riau yaitu sebanyak 1.038.118 jiwa pada tahun 2015 atau 16,36% dari total penduduk Provinsi Riau. Kelompok Kabupaten/Kota lainnya yang mempunyai penduduk yang cukup tinggi adalah Kabupaten Kampar yaitu sebanyak (12,50%), Kabupaten Indragiri Hilir (11,09%), dan Kabupaten Rokan Hilir (10,16%). Kelompok Kabupaten yang mempunyai penduduk sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (2,85%) dikuti Kota Dumai (4,51%), Kabupaten Kuantan Singingi (4,95%) dan Kabupaten Pelalawan (6,26%).

Piramida penduduk Riau tahun 2015 dapat dipetik dua hal: *Pertama*, struktur penduduk Riau menurut umur sudah berada pada struktur umur *intermediate* yang ditandai dengan umur median penduduk sudah berada pada usia 24 tahun. Hal ini memberikan makna kondisi penduduk Riau sudah memasuki era bonus demografi, dimana sebagian besar penduduk sudah tergolong usia produktif (15-64 tahun) sehingga beban tanggungan akan semakin kecil. Kondisi ini merupakan peluang besar untuk membangun karena ketersediaan SDM yang relatif besar pada golongan usia produktif. *Kedua*, mengamati piramida penduduk dimana dasar piramida yang cukup besar, artinya tingkat kelahiran relatif masih besar dan ini tentu merupakan bebas (masalah) dan perlu mendapat perhatian.

Gambar 2. 2. Piramida Penduduk Provinsi Riau Hasil Sensus Penduduk Tahun 2015

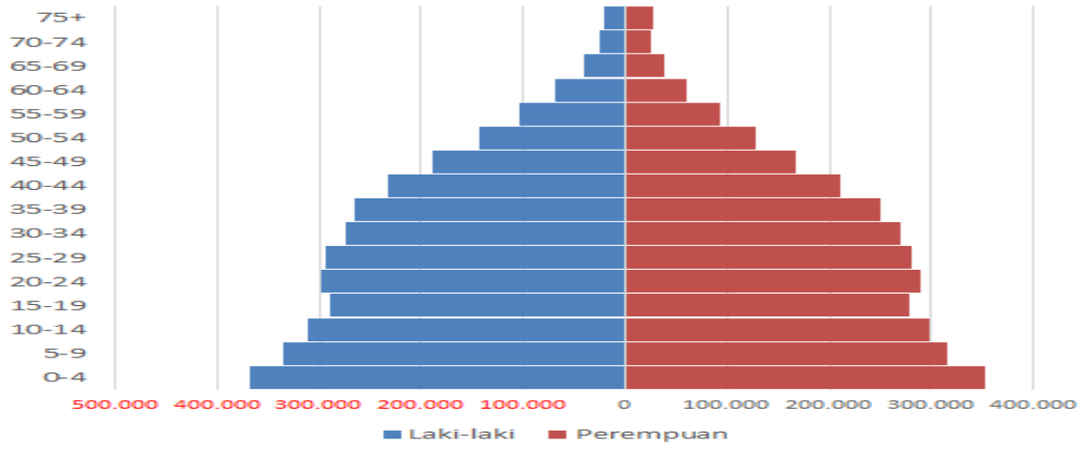

Sumber: Sensus Penduduk 2015

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.

Selama periode 2005-2015 pembangunan ekonomi Riau belum mampu secara optimal meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Riau belum mampu melakukan pergeseran struktur ekonomi, yang ditunjukkan oleh perekonomian Riau yang masih didominasi oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, dan diikuti oleh industri pengolahan, dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sebagai penyumbang PDRB terbesar, maka penurunan pertumbuhan pada kelompok (sub-sektor) pertambangan minyak, gas dan panas bumi/*Crude Petroleum*, Natural Gas, and Geothermal telah mengakibatkan laju pertumbuhan

ekonomi Riau menurun jauh. Apalagi, pada sektor pertanian yang masih didominasi oleh sub-sektor perkebunan dan sub-sektor kehutanan yang mendominasi ekspor Riau juga sangat rentan dengan kondisi ekonomi global. Struktur perekonomian Riau yang demikian telah berdampak pada masih terjadinya ketimpangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Riau, ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk, dan tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi.

Selama periode 2005-2015 pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau telah mengalami penurunan yaitu dari 5,41 persen menjadi 0,22 persen. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi Riau terus mengalami penurunan sejak tahun 2011, dan mengalami penurunan yang sangat jauh pada periode 2014-2015. Sektor yang paling mengalami penurunan pertumbuhan adalah Sektor Pertambangan dengan pertumbuhan hingga mencapai -6,91 yang disebabkan oleh makin turunnya harga minyak dipasar global. Sektor yang menglami peningkatan adalah sektor Jasa Lainnya hingga mencapai sebesar 10,14%. Secara umum perekonomian Riau masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi 30,63 persen, diikuti oleh sektor Industri Pengolahan dengan kontribusi 23,87 persen, dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi 22,33 persen.

Ketergantungan perekonomian Riau pada sektor pertambangan telah mengakibatkan terjadinya penurunan laju pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan golongan (sub-sektor) pertambangan minyak, gas dan panas bumi/*Crude Petroleum*, Natural Gas, and Geothermal hingga mencapai -8,94 persen, sedangkan sub-sektor ini memberikan kontribusi sebesar 85,87 persen terhadap sektor pertambangan Riau. Kondisi harga miyak mentah dunia akan menjadi faktor penting dalam perbaikan ekonomi Riau jika masih tetap mengandalkan sektor pertambangan sebagai andalam perekonomian Riau.

Pada sisi lain dapat dilihat bahwa sektor pertanian didominasi oleh golongan tanaman perkebunan 86,69 persen kehutanan dan penebangan kayu 15,89 persen dan perikanan 12,81 persen. Industri pengolahan didominasi oleh industri makanan dan industri kertas dan barang dari kertas. Komoditi ekspor Riau didominasi oleh ekspor Migas (minyak mentah) dan non migas yaitu CPO *(Crude Palm Oil).* Ketergantungan perekonomian pada minyak dan gas serta sektor perkebunan telah mengakibatkan laju pertumbuhan ekonom Riau melambat pada tahun 2015 yang diakibatkan oleh penurunan laju pertumbuhan ekspor yang hingga mencapai -7,07 persen pada tahun 2015 menurut laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran berdasarkan harga konstan tahun 2010.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun 2015 sebagai akibat dari penurunan harga minyak bumi dunia terlihat jelas pada dua daerah penghasil migas Riau yaitu Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi masing-masing -0,22 persen dan -2,74 persen, sedangkan daerah lainnya masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Kondisi ini berdampak pada ketimpangan pada ketimbangan distribusi yang tinggi antar daerah di Riau, yaitu dengan nilai Indeks Williamson yang mencapai mencapai 0,7 pada tahun 2005 dan sedikit menurun menjadi 0,6 pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa dominansi sektor minyak bumi masih menjadi sumber ketimpangan yang tidak merata antar wilayah di Riau pada 10 tahun terakhir ini. Namun, pada perekonomian tanpa minyak dan gas, justru menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup rendah antar wilayah di Riau dengan nilai Indeks Williamson yang mencapai 0,2 atau mendekati 0, sehingga ada pemerataan pembangunan antar wilayah.

Selama periode 2005 – 2015, indeks ketimpangan williamson yang diukur dari PDRB per kapita atas ADHK-DM dan ADHK-TM menunjukkan trend berfluktuatif menurun. Pada tahun 2005, indeks ketimpangan Williamson ADHK-TM sebesar 0,2899 meningkat secara berfluktuatif menjadi 0,3482 pada tahun 2009. Pada tahun 2015 angka indeks Williamson menurun secara berfluktuatif menjadi 0,24. Selama periode ini, indeks ketimpangan Williamson ADHK-TM lebih mendekati nol sehingga dapat disimpulkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan per kapita tanpa migas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau relatif

rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan indeks ketimpangan distribusi pendapatan per kapita tanpa migas di Provinsi Riau menurun sebesar -2,04 % per tahun.

Mencarmati nilai Indeks Williamson, maka daerah-daerah di Riau menunjukkan fenoma bahwa sektor migas tidak mampu menjad sumber pemerataan pembangunan, karena aliran investasi dan penduduk pada wilayah-wilayah cenderung terjadi pada wilayah tersebut. Sedangkan pembangunan sektor non-migas telah mengakibatkan terjadinya pemerataan ekonomi antar wilayah.

Hal yang sama terlihat pada ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang cenderung masih dalam ketimpangan sedang. Selama periode 2005 – 2015, angka indeks gini Provinsi Riau mempunyai tren berfluktuatif meningkat dengan kisaran antara 0,28 – 0,40. Pada periode 2005 – 2010, angka indeks gini (Gini Ratio) Provinsi Riau berada pada kisaran 0,28 – 0,33 yang berarti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Riau berada pada kategori rendah. Mulai periode 2011 – 2015, angka indeks gini Provinsi Riau berada pada kisaran 0,36 – 0,40 yang berarti bahwa distribusi pendapatan pada kategori ketimpangan pendapatan sedang.

Ketimpangan antar wilayah juga ditunjukkan oleh ketimpangan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2010 dengan migas (ADHK-DM) memiliki tren berfluktuatif meningkat, dan memiliki perbedaan antara daerah pengahasil migas dan daerah bukan penghasil migas. Pada tahun 2011, PDRB per kapita Riau ADHK-DM sebesar Rp 71,64 juta meningkat pada tahun 2012 dan berlanjut hingga tahun 2014 menjadi Rp 72,39 juta serta mengalai penurunan pada tahun 2015 menjadi Rp.70,76 juta. Selama periode 2011–2015, rata-rata pertumbuhannya PDRB per kapita sebesar Rp 71,89 juta.

Kontribusi daerah terhadap perekonomian Riau pada perekonomian dengan migas didominasi oleh Kabupaten Bengkalis (24,54 persen), diikuti oleh Siak (12,68 persen), Rokan Hilir (11,09 persen), Pekanbaru (11,05 persen) dan Kampar (10,09 persen). Namun jika dibandingkan dengan PDRB per kapita penduduk justru beberapa daerah penghasil migas lebih rendah dibandingkan dengan daerah bukan penghasil migas. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk memiliki kaitan yang erat dengan distribusi pendapatan per kapita.

Walaupun demikian, PDRB per kapita atas dasar harga konstan tanpa migas Provinsi Riau dibandingkan PDRB per kapita Nasional justru lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDB per kapita Nasional. Hanya pada tahun 2010 PDRB per kapita Provinsi Riau lebih tinggi dibanding PDRB per kapita Indonesia. Pad, sedangkan pada tahun 2009 dan 2011 – 2013, PDRB per kapita Nas ional lebih tinggi dibanding PDRB per kapita Provinsi Riau.

Kondisi perekonomian yang tidak seimbang dan cenderung menurun di Riau, juga diperburuk dengan tingkat inflasi yang cenderung masih tinggi di Riau. Laju inflasi di Provinsi Riau Laju tahun 2005-2015 mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada tahun 2005 inflasi di Provinsi Riau sebesar 17,1 persen yang merupakan inflasi tertinggi selama tahun 2005-2015. sedangkan pada tahun 2006 mengalami penurunan menjadi 6,32 persen. Pada tahun 2015 inflasi Provinsi Riau menjadi 2,65 persen.

Penurunan laju pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pemerataan pembangunan dan distribusi pendapatan, serta inflasi telah berkontribusi terhadap kemiskinan di Riau. Walaupun telah terjadi penurunan penduduk miskin di Riau dari 12,51 persen pada tahun 2005 hingga menjadi 8,82 persen pada tahun 2015, namun secara absolut jumlah penduduk miskin di Riau terus bertambah. Sebagai dampak ketimpangan pembangunan desa – kota di Riau, telah ditunjukkan oleh tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan (9,95 persen) masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kemiskiann di perkotaan (7,05 persen) pada tahun 2015. Pengaruh inflasi terhadap kemiskinan telah meningkatkan garis kemiskinan sebesar 10

persen pada tahun 2015, dengan komposisi terbesar pada garis kemiskinan pada kelompok bahan makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi pengeluaran penduduk untuk memenuhi kebutuhan makanan telah menjadi salah satu penyebab semakin tingginya angka kemiskinan di Riau.

Kabupaten/Kota yang signifikan menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Riau selama periode 2005 – 2015 adalah Kabupaten Rokan Hulu yang menurun sebesar 58,27% diikuti Kabupaten Kuantan Singingi (53,13%) dan Kabupaten Indragiri Hulu (55,09%). Pada tahun 2015, Kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah dicapai oleh Kota Pekanbaru (3,27%) diikuti Kota Dumai (5,26%) dan Kabupaten Siak (5,67%). Kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Riau dan bahkan termasuk yang tinggi di Indonesia adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (34,08%) diikuti Kabupaten Pelalawan (12,09%), Rokan Hulu (11,05%), dan Kuantan Singingi (10,80%).

Perekonomian yang memburuk dan kemiskinan yang meningkat telah menunjukkan terjadinya peningkatan pada angka kriminalitas di Riau. Selama periode 2005-2013 rata-rata pertumbuhan tindak kejahatan yang dilaporkan meningkat sebesar 0,26 persen per tahun. Perkembangan jumlah tindak kriminalitas yang dilaporkan selama periode 2005 – 2013 memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2005, jumlah tindak kriminal yang dilaporkan di Provinsi Riau sebanyak 10.610 kasus, meningkat menjadi 12,390 kasus pada tahun 2009 dan menurun manjadi 10.857 kasus pada tahun 2013. Pada tahun 2015, jumlah tindak kriminal terbanyak dilaporkan di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 2.104 kasus (19,69%) diikuti di Kabupaten Kampar 1.597 kasus (14,95 %) dan Kabupaten Rokan Hulu 903 kasus (8,45%). Kondisi tingkat kriminalitas yang meningkat akan menjadi salah satu indikator penting dalam penciptaan iklim investasi. Tingkat kriminalitas yang meningkat dapat menghambat investasi, sedangkan investasi sangat diperlukan untuk pembangunan perekonomian. Oleh sebab itu, upaya penanganan kriminalitas diperlukan untuk mendorong pembangunan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Riau.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Secara umum, pembangunan manusia di Riau menunjukkan peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan dalam konteks kesejahteraan sosial. Tingkat pencapaian IPM di Riau meningkat dari 68,65 pada tahun 2010 menjadi 70,84 pada tahun 2015. Kualitas pembangunan manusia didorong oleh perbaikan kondisi kesehatan dengan peningkatan tingkat harapan hidup, dan perbaikan pendidikan yang ditunjukan oleh rata-rata lama sekolah. Walaupun demikian rata-rata lama sekolah penduduk Riau belum mencapai standar wajib belajar 9 tahun. Daya beli *(purchasing power parity)* sebagai komponen penting dalam penenuhan kebutuhan dasar di Riau masih belum merata dan belum mampu tingkatkan secara maksimal. Tingkat pendidikan yang masih relatif rendah perlu didukung oleh peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan pasar tenaga kerja untuk meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran di Provinsi Riau.

Kualitas pembangunan manusia di perkotaan lebih baik jika dibandingkan dengan di perdesaan. Hal ini dapat dilihat dari capaian IPM tahun 2015 Kota Pekanbaru (79,32) dan Kota Dumai (72,20) yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Riau. Kemudian daerah penghasil migas di Riau juga menunjukkan IPM yang lebih tinggi, seperti Siak (72,17), Bengkalis (71,29) dan Kampar (71,28). Secara umum terlihat kaitan antara kemajuan wilayah dengan pencapaian kualitas pembangunan manusia. Kemajuan wilayah dalam pembangunan manusia akan berkaitan dengan kemajuan pembangunan pendidikan, kesehatan, dan kondisi perekonomian.

Pembangunan pendidikan secara umum ditunjukkan oleh capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah yang akan ditempuh oleh penduduk. Angka rata-rata lama sekolah

Provinisi Riau pada tahun 2006 meningkat dari 8.40 tahun menjadi 8.49 tahun pada tahun 2015. Walaupun cenderung meningkat, namun angka rata-rata lama sekolah tersebut mengindikasikan bahwa secara rata-rata penduduk Provinsi Riau belum mencapai wajib belajar 9 tahun. Dengan kata lain Program Wajib Belajar 9 tahun belum mencapai target sebagaimana mestinya. Angka harapan lama sekolah 11,76 pada tahun 2010 meningkat 12,74 pada tahun 2015.

Capaian pembangunan pendidikan ini juga ditunjukkan oleh perkembangan pencapaian angka partispasi kasar (APK) Provinsi Riau pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA selama periode 2005–2015. APK pada jenjang pendidikan SD/MI telah mengalami peningkatan dari 108,73 pada tahun 2005 menjadi 113,12 pada tahun 2015, APK pada jenjang pendidikan SMP/MTs meningkat dari 99,31 pada tahun 2005 menjadi 119,33 pada tahu 2014 dan sedikit menurun pada tahun 2015 menjadi 95,22. Sedangkan pada APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sedikit mengalami peningkatan dari 73,96 pada tahun 2005 menjadi 74,92 pada tahun 2014 dan menurun kembali menjadi 71,69 pada tahun 2015.

Kemudian pada Angka Partisipasi Murni (APM) selama periode 2005–2015 pada semua jenjang pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA) cenderung menurun. Pada tahun 2015, pencapaian APM Provinsi Riau di jenjang pendidikan SD/MI lebih rendah dibanding pencapaian APM SD/MI Indonesia (93,64%). APM dijenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA lebih tinggi dibanding Indonesia (76,44% dan 54,59%). Pada level Sumatera, pencapaian APM di jenjang termasuk yang rendah. Oleh karena itu, upaya meningkatkan APM perlu menjadi prioritas dalam rencana pembangungan jangka panjang Provinsi Riau.

Aspek pembangunan kesehatan di Riau juga mengalami peningkatan jika dilihat dari sisi peningkatan harapan hidup. Harapan hidup penduduk Riau pada tahun 2005 adalah 70,50 tahun dan meningkat menjadi 70,93 tahun pada tahun 2015. Pembangunan fasilitas kesehatan dan peningkatan tenaga medis telah mengakibatkan kesadaran penduduk dalam penggunaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan (medis) semakin membaik.

Angka Kematian Ibu (AKI) berdasarkan laporan rutin dari fasilitas kesehatan provinsi Riau pada tahun 2010 sebesar 109,9 per 100.000 kelahiran mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 108,9. Angka Kematian Bayi (AKB) berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2002 sebesar 43 per 1000 kelahiran hiup menurun pada tahun 2012 menjadi 24 dan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2002 sebesar 60 per 1000 kelahiran hidup menurun pada tahun 2012 menjadi 28. Capaian lain dalam pembangunan kesehatan ditunjukkan oleh penurunan persentase gizi buruk Porvinsi Riau sebesar 1,034% pada tahun 2015 dengan angka gizi buruk pada tahun 2010 sebesar 2,10%

Pembangunan ketenagakerjaan untuk menurunkan angka pengangguran di Provinsi Riau telah menunjukkan perbaikan selama periode 2005-2015. Angka pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 12,2 persen pada tahun 2005 menjadi 7,83 persen pada tahun 2015, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja cenderung stagnan walau sedikit mengalami peningkatan yaitu dari 60,59 persen pada tahun 2005 menjadi 63,22 persen pada tahun 2015. Untuk mencapai angka yang diharapkan dalam capaian pembangunan jangka panjang yaitu 90 persen masih cukup jauh dan masih memerlukan perhatian khusus. Pertumbuhan penduduk yang tinggi (3,58 persen pada Sensus Penduduk 2010) telah mengakibatkan terjadinya pertambahan jumlah angkatan kerja yang terus meningkat di Riau, terutama migrasi masuk risen yang mencapai 8,8 persen dan migrasi masuk seumur hidup yang mencapai 40,9 persen berdasarkan angka Sensus Penduduk 2010.

Secara umum perkembangan tenaga kerja di Provinsi Riau mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Selama periode 2010–2015, rata-rata pertumbuhan penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat sebesar 3,26 persen per tahun dan angkatan kerja meningkat sebesar 3,16 persen per tahun. Dari angkatan kerja, pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja meningkat 3,40 persen per tahun, sedangkan

angkatan kerja yang tidak bekerja meningkat sebesar 3,38 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan bukan angkatan kerja meningkat sebesar 3,67 persen per tahun. Pada periode yang sama, tingkat partisipasi angkatan kerja di Riau menunjukkan trend menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 0,09 persen per tahun. Namun pada pengangguran hanya meningkat rata-rata sebesar 1,68 persen per tahun. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau tahun 2015 sebesar 6,56 persen, lebih tinggi dari tingkat pengangguran terbuka Indonesia (6,18 persen). Tingginya tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau ini salah satunya didorong oleh tingginya migrasi angkatan kerja dari daerah provinsi sekitar seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Aspek pembangunan kesejahteraan sosial lainnya di Riau adalah perkembangan seni, budaya dan olah raga. Seni budaya di Provinsi Riau relatif kurang berkembang. Pada tahun 2007, jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk sebanyak 133 grup dan mengalami peningkatan menjadi 158 grup tahun 2014. Provinsi Riau hanya memiliki 6 gedung kesenian dengan satu gedung megah, yaitu Gedung Idrus Tintin di lokasi Bandar Seni Raja Ali Haji (SERAI). Sedangkan untuk bidang olahraga di Provinsi Riau, tahun 2007 terdapat jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk sebanyak 230 klub, namun mengalami peningkatan tahun 2014 menjadi 350 klub. Namun demikian, Provinsi Riau terbantu dengan di gelarnya PON yang ke XVII di Provinsi Riau dan itu di manfaatkan untuk menunjang infrastruktur bangunan gedung olahraga (*venue*) yang pada tahun 2007 yang hanya berjumlah 15 gedung, sekarang menjadi 38 gedung di tahun 2014 yakni terjadi peningkatan jumlah lebih dari dua setengah kali lipat (253 persen).

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

Penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan di Provinsi Riau telah banyak dilakukan perbaikan baik dalam peningkatan kualitas maupun dalam peningkatan prasarana dan sarana. Salah satu faktor Pencapaian bidang pendidikan Provinsi Riau ditunjukan dengan tingkat Angka Parisipasi Sekolah (APS) yang semakin baik. hal ini terbukti dengan meningkatnya Pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun di Provinsi Riau.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) umur 7 – 12 tahun sebesar 97,68% pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 98,79% pada tahun 2015 dengan rata-rata pertumbuhan APS umur 7- 12 tahun Provinsi Riau sebesar 0,22% per tahun. Sedangkan Pencapaian APS 13 – 15 tahun di Provinsi Riau lebih rendah dibandingkan APS 7 – 12 tahun. Pada tahun 2011, APS 13 – 15 tahun sebesar 88,28% naik menjadi 94,48% tahun 2015, Selama periode 2011 – 2015, rata-rata pertumbuhan APS umur 13 – 15 tahun meningkat sebesar 1,24% pertahun Dan APS 16 – 18 tahun 2011 sebesar 65,41% meningkat menjadi 75,57% tahun 2015. Selama periode 2011 – 2015, rata-rata pertumbuhan APS umur 16 – 18 tahun meningkat sebesar 2,2% per tahun. (gambar 2.3)

Gambar 2. 3. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2003 – 2015 di Provinsi Riau

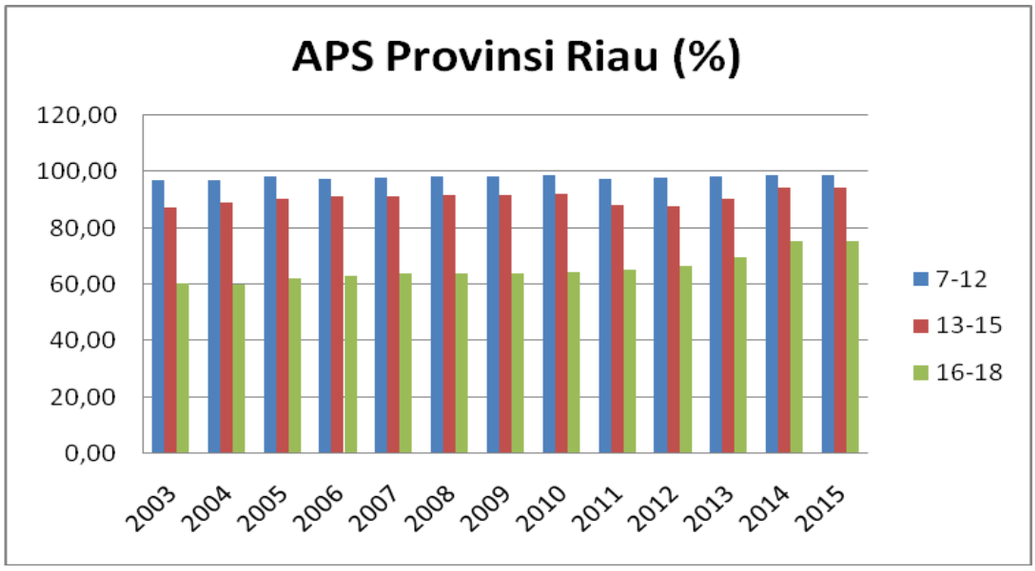

Sumber: BPS RI (APS Tahun 2003– 2015)

Ketersediaan gedung sekolah adalah salah satu faktor untuk meningkatkan Angka Partisipasi sekolah dimana untuk setingkat SD/MI di Provinsi Riau meningkat yaitu sebanyak 3.512 gedung pada tahun 2005 menjadi 3.645 gedung sekolah pada tahun 2014 (meningkat menjadi 3,78%) Sejalan dengan itu, ketersediaan gedung SMP/MTs mengalami sedikit penurunan dimana tahun 2005 sebesar 1.079 buah menjadi 999 buah di tahun 2014.

Keberadaan jumlah guru dan murid adalah salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan pendidikan di Provinsi Riau, dengan semakin tingginya tingkat pendidikan guru maka akan mampu mengahasilkan murid-murid yang berkualitas yang ada di Provinsi Riau, untuk lebih jelasnya jumlah guru dan murid yang ada di Provinsi Riau dapat dilihat di gambar di bawah ini

Tabel 2. 1. Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2005-2015 di Provinsi Riau

No	Jenjang Pendidikan	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	SD/MI											
1.1.	Jumlah Guru	27.971	21.064	21.225	45.347	41.849	43.898	43.614	48.953	47.407	54.566	51.822
1.2.	Jumlah Murid	724.325	730.127	812.169	746.666	647.434	733.719	735.413	718.513	711.522	794.823	803.654
1.3.	Rasio	38,62	28,85	26,13	60,73	64,64	59,83	59,31	68,13	66,63	68,65	64,48
2	SMP/MTs											
2.1.	Jumlah Guru	9.663	7.224	22.143	20.456	12.836	14.137	13.859	15.756	16.882	21.317	20.642
2.2.	Jumlah Murid	260.714	237.483	199.146	210.747	216.321	219.150	224.331	230.202	231.450	242.407	251.579
2.3.	Rasio	37,06	30,42	111,19	97,06	59,34	64,51	61,78	68,44	72,94	87,94	82,05

Sumber: BPS Provinsi Riau 2016

2.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dimana pembangunan kesehatan di Riau telah menunjukkan pencapaian yang positif. Selama periode 2005 – 2015, jumlah rumah sakit, puskesmas, pustu dan pusling di Provinsi Riau memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2005, jumlah rumah sakit, puskesmas, pustu dan pusling sebanyak 1.033 unit yang terdiri dari 34 rumah sakit, 158 unit puskesmas, 702 unit pustu dan 138 unit pusling. Serta pada tahun 2015, jumlah rumah sakit, puskesmas, pustu dan pusling meningkat menjadi

1.445 unit yang terdiri dari 67 rumah sakit, 212 unit puskesmas, 981 unit pustu dan 185 unit pusling.

Gambar 2. 4. Perkembangan Jumlah Puskesmas, Pustu dan Pusling Tahun 2005 – 2015 Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau

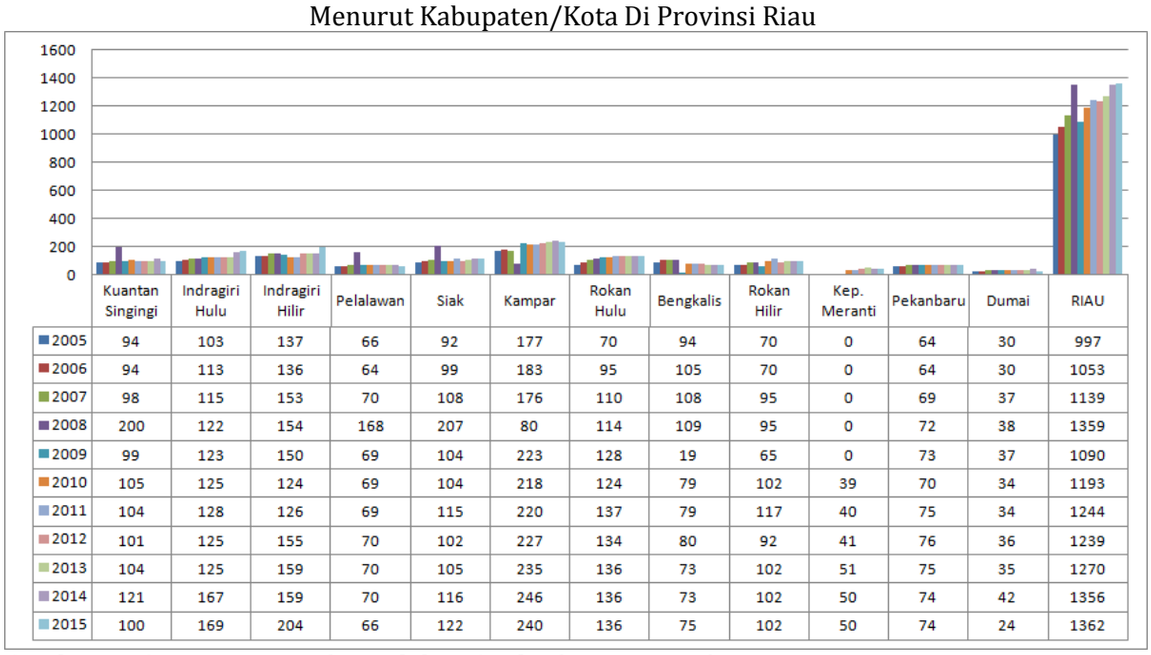

	Kuantan Singingi	Indragiri Hulu	Indragiri Hilir	Pelalawan	Siak	Kampar	Rokan Hulu	Bengkalis	Rokan Hilir	Kep. Meranti	Pekanbaru	Dumai	RIAU
2005	94	103	137	66	92	177	70	94	70	0	64	30	997
2006	94	113	136	64	99	183	95	105	70	0	64	30	1053
2007	98	115	153	70	108	176	110	108	95	0	69	37	1139
2008	200	122	154	168	207	80	114	109	95	0	72	38	1359
2009	99	123	150	69	104	223	128	19	65	0	73	37	1090
2010	105	125	124	69	104	218	124	79	102	39	70	34	1193
2011	104	128	126	69	115	220	137	79	117	40	75	34	1244
2012	101	125	155	70	102	227	134	80	92	41	76	36	1239
2013	104	125	159	70	105	235	136	73	102	51	75	35	1270
2014	121	167	159	70	116	246	136	73	102	50	74	42	1356
2015	100	169	204	66	122	240	136	75	102	50	74	24	1362

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau dalam Angka (2006 – 2016)

Sebagai penggerak pelayanan kesehatan pada tahun 2005 – 2015, jumlah tenaga kesehatan di Provisi Riau terus mengalami peningkatan. Dimana Pada tahun 2005, jumlah dokter sebanyak 1.105 orang yang terdiri dari 219 dokter spesialias, 639 dokter umum dan 247 dokter gigi untuk melayani sebanyak 4,61 jiwa penduduk Prvinsi Riau. Jumlah tenaga medis di Provinsi Riau juga memiliki tren meningkat. Pada tahun 2005, jumlah tenaga medis sebanyak 5.228 orang terdiri dari 3.743 perawat dan 1.485 bidan. Pada tahun 2009, jumlah tenaga medis meningkat menjadi 8.195 orang yeng terdiri dari 5.525 perawat dan 2.670 bidan. Pada tahun 2015, jumlah paramedis meningkat menjadi 14.547 orang. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan jumlah paramedis di Provinsi Riau meningkat sebesar 9,32% per tahun, dimana rata-rata pertumbuhan jumlah bidan meningkat sebesar 14,36% per tahun dan perawat meningkat sebesar 7,45% per tahun.

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

Dalam urusan pekerjaan umum, pelayanan prasarana dan sarana infrastruktur kota merupakan perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi Riau. Selama periode 2011– 2015, panjang jalan di Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 240,96 Km atau rata-rata penurunan sebesar 48,19% per tahun. Selama periode ini, panjang jalan kabupaten meningkat sepanjang 1.594,44 Km atau rata-rata pertumbuhannya meningkat sebesar 0,85% per tahun. Jalan provinsi meningkat sepanjang 870,50 Km atau rata-rata pertumbuhannya meningkat sebesar 3,44% per tahun. Jalan negara meningkat sepanjang 8,35 Km atau rata-rata pertumbuhannya meningkat sebesar 0,07% per tahun.

Gambar 2. 5. Kondisi Jalan Provinsi Riau tahun 2011-2015 (dalam Km)

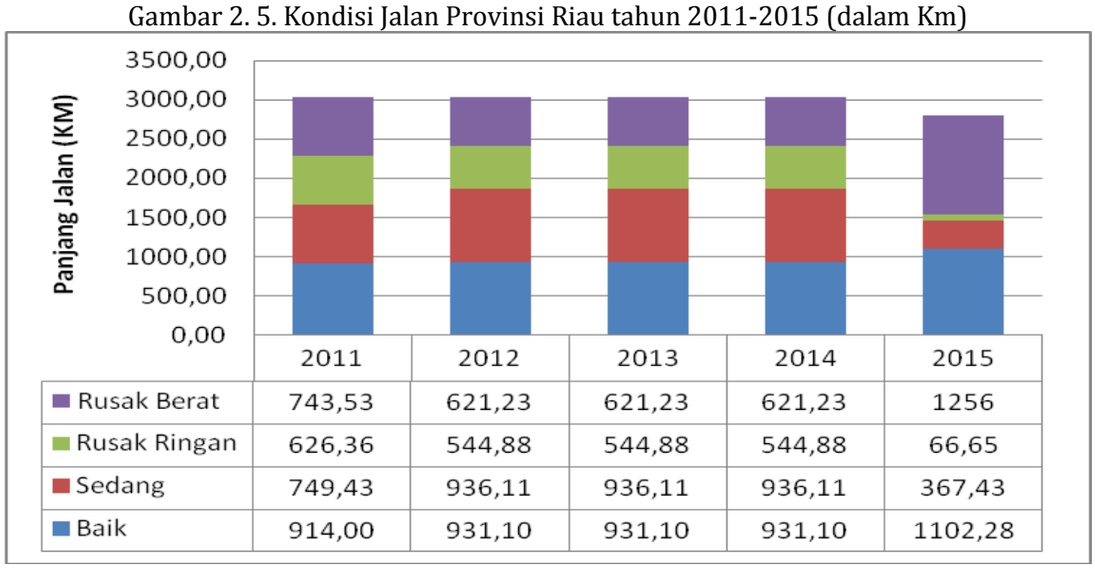

	2011	2012	2013	2014	2015
Rusak Berat	743,53	621,23	621,23	621,23	1256
Rusak Ringan	626,36	544,88	544,88	544,88	66,65
Sedang	749,43	936,11	936,11	936,11	367,43
Baik	914,00	931,10	931,10	931,10	1102,28

Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi Riau

Selama periode 2011 – 2015, jalan dengan kondisi baik terus meningkat sebaliknya jalan dengan kondisi sedang hingga rusak berat terus menurun. Pada tahun 2011, panjang jalan negara dan provinsi dengan kondisi baik sepanjang 743,53 Km atau 30% dari total panjang jalan negara dan provinsi. Panjang jalan dengan kondisi sedang, rusak ringan dan rusak berat masing-masingnya porsinya sebesar 25%, 21% dan 25%. Pada tahun 2015, jalan negara dan provinsi dengan kondisi baik meningkat menjadi sebesar 39% dan jalan rusak sedang, rusak ringan dan rusak berat menurun porsinya dimana masing-masingnya menjadi 13%, 2% dan 45%. Hingga tahun 2015, masih terdapat sekitar 47% jalan negara dan provinsi di Provinsi Riau dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat.

b. Penataan Ruang

Berdasarkan Draft RTRW Provinsi Riau tahun 2016-2035, pola ruang wilayah Provinsi Riau terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi: Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam, Hutan Pelestarian Alam, dan kawasan perlindungan setempat, sedangkan kawasan budidaya meliputi kawasan Hutan Produksi, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, dan kawasan lainnya.

Dalam struktur ruang wilayah diarahkan untuk pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan (*urban system*), fungsi utama pelayanan perkotaan, hubungan antar pusat permukiman perkotaan, orientasi pergerakan barang dan penumpang, serta kebijakan pokok pengembangan permukiman perkotaan di wilayah Riau sampai akhir kurun RTRWP tahun 2033. Rencana sistem perkotaan Provinsi Riau dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan, dimana pengembangan pusat kegiatan diarahkan terdiri atas : Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL). Untuk menunjang aksesibilitas regional maupun global PKL-PKL tersebut, secara umum bagi PKL-PKL yang memiliki pantai dan memungkinkan dikembangkan pelabuhan akan ditunjang oleh fasilitas pelabuhan laut pada jenjang fungsi Pelabuhan Nasional (PN). Pelabuhan laut ini selain untuk pelayanan domestik, juga terbuka bagi pelayaran internasional jarak dekat sampai dengan menengah, seperti ke Singapura, Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lainnya, serta ke negara-negara Asia Timur dan Asia Selatan yang relatif masih dekat.

Untuk menciptakan interaksi ekonomi dan ruang (pola aliran barang dan penumpang) yang efisien dan kompak di antara pusat-pusat, dan antara pusat dengan kawasan-kawasan produksi di wilayah *hinterland* perlu dikembangkan sistem transportasi darat (utamanya jaringan jalan) secara terpadu inter dan intra moda terhadap fasilitas pelabuhan laut,

pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan dan bandar udara. Dari segi transportasi udara ditunjang oleh fasilitas bandar udara dengan jenjang fungsi Pusat Penyebaran Tersier (PPT), yang terutama untuk pelayanan domestik. Namun, untuk beberapa bandara yang lokasinya dekat ke negara tetangga yang berbatasan (terutama Singapura dan Malaysia) maka juga dimungkinkan terbuka bagi penerbangan intenasional yang bersifat lintas batas. Untuk mendukung aksesibilitas global wilayah Riau ke jaringan perkotaan poros perekonomian dunia dalam rangka menyongsong era pasar bebas, meningkatkan pola kegiatan dan keterkaitan ekonomi wilayah provinsi serta mengoptimalkan fungsi-fungsi pelayanan internal dan eksternal/regional, dikembangkan struktur sistem perkotaan PKN, PKW dan PKL sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Provinsi Riau

PKN	PKW	PKWp	PKL
Kota Pekanbaru; Kota Dumai.	Bangkinang; Pasir Pangaraian; Bagan Siapi-api; Pangkalan Kerinci; Teluk Kuantan; Bengkalis; Siak Sri Indrapura; Rengat; Tembilahan.	Selat Panjang, Kuala Enok, Tanjung Buton	Ujung Tanjung; Ujung Batu; Sungai Pakning; Bagan Batu; Duri; Perawang; Air Molek; Sungai Guntung; Sungai Apit; Pulau Kijang

Sumber : Hasil Kajian Tim Penyusunan RTRW Provinsi Riau

2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pembangunan perumahan dan pemukiman terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat Riau secara optimal. Pada tahun 2010, persentase rumah tangga dengan status kepemilikan rumah sendiri di Provinsi Riau sebesar 74,37% dengan rata-rata pertumbuhan rumah tangga yang memiliki rumah sendiri di Provinsi Riau menurun sebesar 0,58% per tahun. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan/akses rumah tangga baru untuk menyediakan sendiri rumahnya semakin menurun.

Gambar 2. 6. Pembangunan Rumah Melalui Perumnas, Developer, Real Estate dan Koperasi Tahun 2005 – 2014 di Provinsi Riau

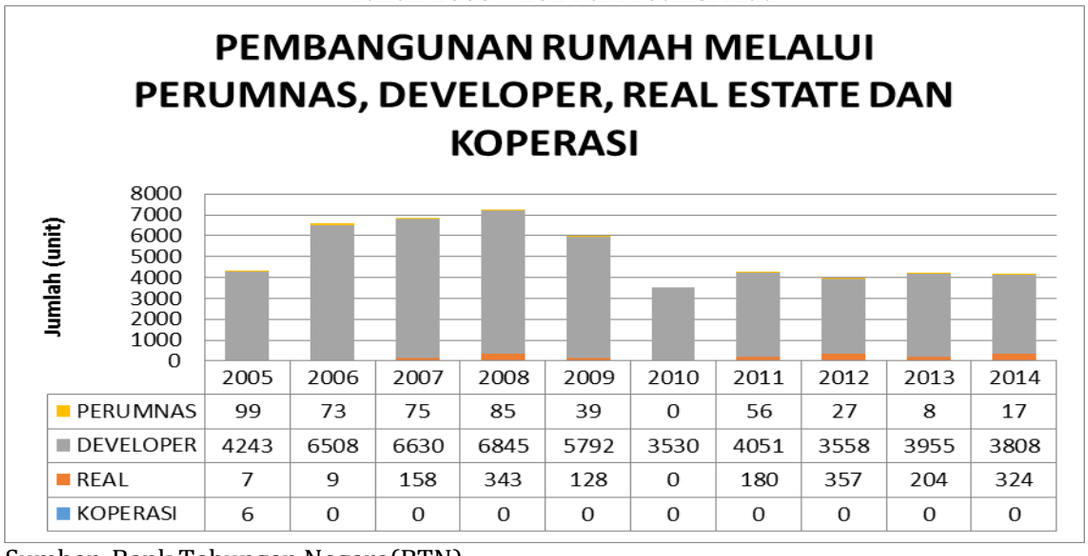

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PERUMNAS	99	73	75	85	39	0	56	27	8	17
DEVELOPER	4243	6508	6630	6845	5792	3530	4051	3558	3955	3808
REAL	7	9	158	343	128	0	180	357	204	324
KOPERASI	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber: Bank Tabungan Negara(BTN)

Disisi lain, pembangunan perumahan oleh Perumnas, developer, real estate dan koperasi semakin terbatas yang ditunjukkan dari jumlah pembangunan perumahan dengan tren yang semakin menurun. Pada tahun 2005, jumlah rumah yang dibangun oleh Perumnas, Developer

dan Real estate serta Koperasi sebanyak 4.355 unit, meningkat menjadi 7.273 unit pada tahun 2008 dan menurun menjadi 4.149 unit pada tahun 2014. Selama periode 2005 – 2014, telah dibangun sebanyak 51.115 unit perumahan dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 2,36 % per tahun.

Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih rendah. Diperkirakan sampai dengan tahun 2020, rata-rata setiap tahun terdapat 1,15 juta unit rumah yang perlu difasilitasi. Saat ini pembangunan/pengembangan rumah baru mencapai 600.000 unit per tahun. Jumlah kekurangan rumah (*backlog*) mengalami peningkatan dari 4,3 juta unit pada tahun 2000 menjadi 5,8 juta unit pada tahun 2004 dan 7,4 juta unit pada akhir 2009. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus berakumulasi di masa yang akan datang akibat adanya pertumbuhan rumah tangga baru rata-rata sebesar 820.000 unit rumah per tahun (Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2010). Status mutu air dipantau dari dua aspek, yaitu kualitas lingkungan baku mutu air sungai Provinsi Riau empat sungai besar yang ada di Provinsi Riau, yaitu Sungai Indragiri, Sungai Rokan, Sungai Siak, dan Sungai Kampar dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan kualitas mutu air.

Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk domestik Provinsi Riau sebagian besar masih mengandalkan air tanah dangkal melalui sumur gali (30%), air hujan (30%), sumur yang tidak terpelihara (20%), lainnya 20% (sungai, situ dan pelayanan PDAM) sedangkan untuk Kebutuhan air di kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, dan Rokan Hilir sebagian tergantung air hujan. Secara umum, persentase penduduk berakses air minum Provinsi Riau sebesar 40,96% pada tahun 2009 mengalami peningkatan hingga tahun 2014 menjadi 94,97% sedangkan untuk jumlah Perusahaan Air Minum di Provinsi Riau sebanyak 24 pada tahun 2009 perusahaan dengan kapasitas potensial air minum 1.998 liter per detik. Sumber air minum rumah tangga umumnya bersumber dari leding dan air kemasan, pompa, sumur terlindung, sumur tidak terlindung, dan mata air .

Persentase luas permukiman yang tertata Provinsi Riau cenderung berfluktuatif hingga tahun 2014. Persentase luas permukiman yang tertata Provinsi Riau sebesar 0,105 % pada tahun 2005 dan terus meningkat menjadi 0,100 %. Tahun 2012, persentase luas permukiman yang tertata Provinsi Riau kembali menurun menjadi 0,093 % dan meningkat hingga tahun 2014 menjadi 0,167%.

2.3.1.5 Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan. Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-nundangan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Selama tahun 2009-2014 masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum memiliki dokumen RPJPD antara lain kabupaten Kuantan Singingi dan Rokan Hilir. Sedangkan yang belum memiliki dokumen RKPD adalah kabupaten Meranti tahun 2009-2011.

Secara umum ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan relatif cukup memadai, namun masih perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Untuk mencapai efektivitas dan kesinambungan pembangunan dokumen perencanaan menghendaki adanya sinkronisasi antar dokumen dan antar dokumen tingkatan pemerintahan, fokus dan terintegrasi antara program satu dengan yang lain dalam satu dokumen.

2.3.1.6 Perhubungan

Dalam hal urusan Perhubungan, Pemerintah Provinsi Riau telah banyak melakukan terobosan dalam meningkatkan pelayanan perhubungan kepada masyarakat. Sehingga

mampu menggerakkan dinamika pembangunan dan mendukung mobilitas manusia dan barang dengan menjangkau daerah daerah baik yang ada dalam Provinsi Riau maupun di luar Provinsi Riau itu sendiri.

Di Provinsi Riau terdapat beberapa bandara khusus yang harus dikembangkan. Pengembangan jaringan transportasi udara sebagaimana disebutkan di atas meliputi: 1). Pengembangan Bandar Udara Pengumpul Sekunder, yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II di Kota Pekanbaru; 2). Pengembangan Bandar Udara Pengumpul Tersier yaitu Bandara Pinang Kampai (Kota Dumai), dan Japura (Kabupaten Indragiri Hulu); 3). Pengembangan Bandar Udara Pengumpan yaitu Bandara Tempuling (Kabupaten Indragri hilir), Pasir Pangaraian (Kabupaten Rokan Hulu), Bangko Pusako (Kabupaten Rokan Hilir), Teluk Kuantan (Kabupaten Kuantan Singingi), Sungai Pakning (Kabupaten Siak), Meranti/Selat Panjang (Kabupaten Kepulauan Meranti), Pelalawan (Kabupaten Pelalawan), Bengkalis (Kabupaten Bengkalis), dan Pulau Rupat (kabupaten Bengkalis).

Sedangkan untuk tarsnportasi laut Pemerintah Provinsi melakukan penataan Kepelabuhan, meliputi: Pelabuhan Utama yaitu Pelabuhan Dumai dan Pelabuhan Pengumpul yang ada di kawasan Pesisir di setiap masing-asing daerah yang ada di Provinsi Riau

Selain itu, juga dikembangkan pelabuhan-pelabuhan khusus untuk sejumlah Kawasan Industri dan pelabuhan khusus bagi kepentingan pariwisata. Untuk Pelabuhan Khusus Industri, akan dikembangkan di Pelintung dan Tanjung Buton. Untuk Pelabuhan Khusus Pariwisata diarahkan pengembangannya di Tanjung Medang (Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis) dan pulau Jemur (Gugusan Kepulauan Aruah) di Kabupaten Rokan Hilir.

2.3.1.7 Lingkungan Hidup

Capaian kinerja pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup dapat dilihat dari Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) berdasar 3 indikator, yaitu: kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. Secara nasional, IKLH Tahun 2015 ditargetkan angka sebesar 64,5 (dari nilai maksimum 100) dan tahun 2019 naik menjadi 66,5-68,5. Pada tahun 2014, IKLH nasional berada angka 63,42, sedangkan IKLH Provinsi Riau sebesar 52,59, termasuk kategori sangat kurang (dengan IKLH 50-58). Walaupun sudah mempertimbangkan *margin error* sebesar 1,84, IKLH Provinsi Riau dari 2010 – 2014 menunjukkan kecenderungan yang terus menurun, dan penurunan terparah terjadi pada tahun 2013 (50,69) karena rendahnya indek kualitas air. IKLH Provinsi Riau berada pada posisi paling rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, sehingga pengelolaan lingkungan hidup di provinsi ini perlu mendapat perhatian oleh pemerintah daerah.

Ada kecenderungan bahwa IKLH berkorelasi dengan kapasitas pengelolaan lingkungan di daerah. Korelasi ini menyiratkan bahwa kapasitas pengelolaan lingkungan yang rendah menjadi salah satunya faktor penyebab upaya perbaikan dan konservasi SDA-LH menjadi tidak optimal. Sebagai contoh, IKLH Provinsi Riau pada tahun 2012 sebesar 53,79, dimana kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Provinsi Riau juga masih rendah, yakni 2,99 poin (SLHI 2012). Oleh karena itu, upaya akselerasi pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Riau harus diikuti dengan penguatan kapasitas pengelolaan (meliputi kelembagaan, anggaran, kelengkapan peraturan daerah terkait isu lingkungan, SDM, dan sarana-prasarana).

Beberapa permasalahan lingkungan hidup yang menyebabkan rendahnya IKLH Provinsi Riau dapat dijelaskan di bawah ini.

a. Degradasi lahan gambut

Lahan gambut di Provinsi Riau mencapai 4,8 juta ha (46% luas wilayah daratan), terdiri dari rawa gambut air tawar dan gambut pasang-surut, 39% diantaranya mempunyai kedalaman >3m. Lahan gambut memiliki kemampuan untuk menyimpan dan mengatur aliran air permukaan, oleh karena itu perlu dipertahankan kondisinya alami. Namun, saat ini sebagian telah terdrainase untuk hutan tanaman dan perkebunan. Pada tahun 2013, tutupan hutan rawa gambut yang rusak mencapai luasan ±1.313.724,191 ha, sekitar 200.191 ha berada di kawasan lindung kubah gambut (BLH Riau, 2014). Peningkatan luasan perkebunan khususnya kelapa sawit telah memberikan tekanan pada hutan rawa gambut, setelah peluang ekspansi ke lahan mineral sudah terbatas.

Kegiatan budidaya di lahan gambut diperkirakan akan terus meningkat sehingga akan mengancam kelestarian hutan rawa gambut. Kondisi ini dipicu oleh peningkatan jumlah penduduk karena migrasi masuk, dan perambahan kawasan hutan yang tidak terkendali. Perubahan penggunaan lahan untuk perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit rakyat merupakan faktor utama yang mengancam kelestarian hutan rawa gambut. Selain itu, hutan rawa gambut juga mengalami degradasi karena pembalakan liar (*illegal logging*) dan kebakaran lahan dan hutan. Secara rinci, faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan tingginya ancaman terhadap hutan rawa gambut adalah: a) Peningkatan jumlah penduduk, b) Perambahan kawasan hutan yang tidak terkendali, c) Penebangan liar (illegal logging), khususnya di hutan mangrove untuk bahan arang dan bahan bangunan, d) Ancaman kebakaran lahan dan hutan yang meluas, e) Masih rendahnya pengetahuan dan tingkat pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, dan f) Pengawasan dan penegakan hukum terhadap *illegal logging* dan perambahan kawasan hutan yang lemah.

b. Wilayah banjir semakin meluas

Wilayah banjir hampir tersebar di seluruh kabupaten/kota. Isu ini tidak hanya terjadi di daerah dataran rendah di sekitar pantai, tetapi juga di dataran sedang, termasuk di daerah perkotaan. Banjir telah menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat. Banjir juga memaksa sebagian warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dan memicu munculnya penyakit-penyakit dan gangguan kesehatan, misalnya penyakit kulit dan diare. Selama tahun 2012, banjir telah melanda beberapa wilayah dan jumlah korban banjir mencapai 16.040 KK dan sekitar 75.512 jiwa. Pada tahun 2013, banjir juga terjadi di Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru. BPBD Provinsi Riau mencatat korban yang mengungsi sebanyak 1.487 orang di Kabupaten Kampar dan 15.503 orang di Kabupaten Rokan Hulu, bahkan tercatat satu orang korban meninggal dunia di Rokan Hulu. Selain itu, banjir juga menyebabkan kerugian materiil akibat rusaknya rumah, sekolah, jalan, dan jembatan sehingga berbagai aktifitas harian masyarakat terganggu.

Banjir di Provinsi Riau disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yang berpengaruh besar adalah: tingginya curah hujan, topografi dataran rendah yang datar di bagian timur, subsidensi tanah, dan naiknya permukaaan air laut. Faktor manusia yang berpengaruh besar adalah perilaku pembukaan hutan di hulu dan tengah DAS/sub-DAS, pengeringan lahan rawa gambut sehingga mengurangi perannya dalam menyimpan air, dan sistem drainase perkotaan yang buruk. Pada musim hujan, hari hujan meningkat hingga 200 hari per tahun dan curah hujan hingga 4.080 mm/tahun. Sementara itu, dalam kurun waktu 2000-2009, tutupan hutan di DAS Kampar mengalami pengurangan seluas ± 98.793 ha atau rata-rata sekitar 9.879 ha per tahun.

Aktivitas pembukaan perkebunan kelapa sawit di daerah hulu dan lahan gambut memperbesar ancaman banjir karena mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan sehingga meningkatkan *run off* yang masuk ke badan sungai dan akan terkumpul di wilayah muara. Lahan gambut yang terdrainase untuk penanaman kelapa sawit akan mengalami kering tak balik (*irreversible drying*) sehingga kemampuan menyerap dan

menyimpan air layaknya *spons* berkurang bahkan rusak. Di daerah perkotaan, pembangunan daerah permukiman, perdagangan, perkantoran, dan industri akan mengurangi daerah resapan air sehingga aliran permukaan (*run off*) akan menjadi lebih besar, apalagi jika perencanaan sistem drainase perkotaan tidak dilakukan dengan baik. Naiknya permukaan air laut yang dipicu oleh pemanasan global juga akan menyebabkan banjir *rob* di wilayah pesisir.

c. Pencemaran air sungai meningkat

Provinsi Riau memiliki 4 sungai utama yaitu Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar dan Sungai Indragiri. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Indragiri (645 kilometer) sedangkan yang terdalam adalah Sungai Siak (8-12 meter). Namun, sungai-sungai tersebut mengalami kerusakan fisik berupa: abrasi, longsoran tebing sungai, dan sedimentasi. Hilangnya vegetasi di pinggir sungai dan besarnya gangguan akibat tingginya lalu lintas sungai meningkatkan abrasi dan longsoran di tebing sungai. Sementara itu, pembukaan hutan di bagian hulu dan tengah DAS untuk pertanian dan perkebunan menyebabkan erosi tanah dan sedimentasi di sungai.

Selain berfungsi sebagai jalur transportasi air, sungai-sungai tersebut berfungsi sebagai sumber air bagi masyarakat. Cadangan air akan mengalami penurunan di masa yang akan datang apabila tekanan terhadap aliran air permukaan dan aliran air bawah tanah mengalami peningkatan. Penurunan debit dan pendangkalan sungai terjadi akibat deforestrasi untuk kegiatan budidaya lainnya. Sedimentasi/pendangkalan sungai di daerah hilir menyebabkan kemampuan sungai tidak cukup untuk menampung debit air puncak sehingga memicu terjadinya banjir.

Air sungai-sungai di Provinsi Riau juga mengalami tekanan penurunan kualitas air akibat pencemaran. Definisi pencemaran lingkungan mengacu pada pengertian pencemaran lingkungan yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga terlampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Dengan kata lain, apabila parameter pencemaran air tidak memenuhi baku mutu lingkungan makan sungai tersebut dikatakan sudah tercemar.

Pencemaran air sungai bersumber dari kegiatan industri, domestik, rumah sakit, penambangan emas tanpa ijin (PETI), dll. Kegiatan industri hulu yang mengolah sumber daya hutan, perkebunan, dan pertambangan, seperti industri pengolahan kelapa sawit (PKS), *crumb rubber, plywood, pulp* dan kertas, dan lainnya banyak yang membuang limbahnya ke badan sungai sehingga menurunkan kualitas air sungai dan pesisir. Berdasarkan hasil kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Riau (Bappeda 2013) sungai-sungai besar di Riau pada umumnya tidak memenuhi baku mutu air, antara lain terhadap: a) Parameter Fisika: Residu tersuspensi (Total Suspended Solid), b) Parameter Kimia Anorganik: Derajat keasaman (pH), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Dissolved Oxygen (DO), dan c) Parameter Mikrobiologi: Fecal coliform, dan Total coliform. Pencemaran air sungai telah berdampak pada menurunnya kualitas ekosistem perairan sehingga mengganggu pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat, terutama air bersih dan ikan.

d. Kerusakan ekosistem pesisir dan pencemaran air laut

Provinsi Riau memiliki luas laut sekitar 18.782,55 (19,89% km^2). Lima belas sungai bermuara di sepanjang pantai Provinsi Riau membentuk ekosistem hutan mangrove, sehingga kawasan pesisir dan laut di sini kaya akan sumber daya perikanan. Vegetasi mangrove di Provinsi Riau didominasi oleh bakau (*Rhizophora* sp), api-api (*Avicennia* sp), pedada (*Sonneratia* sp), tancang (*Bruguiera gymnorhiza*), dan nipah (*Nypah fruticans*). Kawasan pesisir, merupakan ekosistem penting yang mendukung keberlanjutan pembangunan Provinsi Riau pada jangka

panjang. Berbagai kegiatan dilakukan di sini, di antaranya: perikanan, rekreasi dan pariwisata, agroindustri, transportasi dan pelabuhan, dan pemukiman. Kawasan pesisir juga merupakan tempat bermukim para nelayan, yang sebagian besar termasuk golongan ekonomi lemah. Seiring dengan berjalannya pembangunan di kawasan pesisir, buangan limbah industri, dan aktivitas transportasi di laut, kondisi perairan laut sudah mengalami pencemaran. Pencemaran air laut tidak hanya mengancam kelangsungan hidup biota laut tetapi juga berimbas pada penurunan pendapatan nelayan akibat populasi ikan yang menurun.

Laut merupakan sumber kehidupan makhluk hidup, termasuk masyarakat yang bergantung pada sumber daya di dalamnya. Kawasan pesisir merupakan ekosistem pendukung kehidupan biota perairan laut. Ekosistem hutan mangrove bermanfaat secara ekologis dan ekonomis (Santoso dan Arifin, 1998). Manfaat hutan mangrove secara ekologis antara lain: pelindung garis pantai dari abrasi, mempercepat perluasan pantai melalui pengendapan, mencegah intrusi air laut ke daratan, tempat berpijah aneka biota laut, tempat berlindung dan berkembangbiak berbagai jenis burung, mamalia, reptil, dan serangga. Secara ekonomi, hutan mangrove bermanfaat sebagai: penghasil keperluan rumah tangga (kayu bakar, arang, bahan bangunan, bahan makanan, obat-obatan), penghasil keperluan industri (bahan baku kertas, tekstil, kosmetik, penyamak kulit, pewarna), penghasil bibit ikan, nener udang, kepiting, kerang, madu, dan telur burung, dan pariwisata, penelitian, dan pendidikan.

Laporan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau tahun 2013 menyebutkan bahwa hutan mangrove di Riau tersebar di: Kabupaten Kepulauan Meranti seluas 26.862,6 ha, Kabupaten Siak 6.820,5 ha, Kota Dumai 2.125 ha, Rokan Hilir 828.356 ha, Bengkalis 29.330 ha dan Pelalawan 6.203 ha. Sebelumnya, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau (2010) melaporkan bahwa Kondisi tutupan mangrove Pada tahun 2003 seluas ±188.684,7 ha dan turun menjadi ±175.295,3 ha pada tahun 2010. Artinya, terjadi pengurangan luas tutupan mangrove sebesar ±13.389,4 ha dalam kurun waktu 7 tahun, atau sekitar 1.912 hektar per tahun. Perubahan tutupan mangrove sebagian besar terjadi di Bengkalis, Siak, Rokan Hilir dan Indragiri Hilir. Kerusakan hutan mangrove di Provinsi Riau umumnya disebabkan oleh pemanfaatan kayu mangrove untuk kayu bakar, panglong arang, rumah dan lain-lain.

Dengan kondisi mangrove yang rusak maka akan timbul berbagai dampak lingkungan seperti pengurangan wilayah pesisir akibat abrasi pantai, penurunan keanekaragaman flora misalnya *Rhizophora* spp dan *Bruguiera* spp, dan berkurangnya populasi ikan karena mangrove merupakan tempat pemijahan ikan. Hilangnya hutan mangrove juga berdampak pada meningkatnya intrusi air laut. Oleh karena itu, pengendalian kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan kawasan pesisir pada jangka panjang perlu diperkuat untuk mendukung keanekaragaman biota dan keberlanjutan kehidupan nelayan.

e. Keanekaragaman hayati semakin terancam

Hutan dataran rendah merupakan tempat berkumpul dan berkembang biaknya berbagai jenis flora dan fauna. Karena sebagian besar merupakan ekosistem dataran rendah, Provinsi Riau mempunyai keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun, sebagian di antara jenis flora dan fauna di Riau sudah terancam punah atau langka sehingga perlu dilindungi, seperti harimau sumatera dan gajah sumatera. Keberadaan jenis yang dilindungi merupakan suatu indikator perubahan populasi jenis dari populasi berlimpah menuju jarang dan terancam punah di alam bebas. Berdasarkan data Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau (2013), jumlah jenis flora dan fauna yang diketahui sebanyak 130 jenis, dan 73 di antaranya dilindungi, meliputi: 25 jenis mamalia, 10 jenis reptilia, 27 jenis burung/aves, 1 jenis ikan, 4 jenis serangga dan 6 jenis tumbuh-tumbuhan. Karena rusak dan hilangnya habitat alami mereka, beberapa jenis satwa berstatus terancam punah (*endangered*) antara lain: harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), gajah sumatera (*Elephas maximus*), macan dahan, beruang madu, dan tapir.

Kawasan konservasi yang diharapkan menjadi benteng terakhir mereka juga mengalami ancaman perambahan yang tinggi misalnya di Suaka Margasatwa (SM) Balai Raja, SM Giam Siak Kecil, SM. Bukit Rimbang - Bukit Baling, Hutan Wisata Sungai Dumai, dan Taman Nasional Tesso Nilo. Akibatnya, wilayah jelajah (*home-range*) satwa menjadi sempit dan ketersediaan pangannya juga berkurang, sehingga meningkatkan konflik satwa gajah dan harimau dengan manusia karena satwa-satwa tersebut keluar dari habitatnya dan memasuki pemukiman, perladangan, dan kebun penduduk. Selain itu, berkurangnya berbagai jenis flora akan mengurangi stok bahan alami untuk pembuatan obat-obatan, pangan, dan sumber daya lainnya.

2.3.1.8 Pertanahan

Jumlah penduduk Riau pada tahun 2015 sebanyak 6.344.402 jiwa yang terbagi dalam 1.522.673 rumah tangga. Dari total rumah tangga ini sebanyak 39,57 % atau 581.517 rumah tangga berstatus sebagai rumah tangga pertanian (RTP), dimana mengalami peningkatan sebanyak 40.467 RTP (7,48 %) pada tahun 2003 yaitu sebanyak 541.050 RTP. Penguasan tanah oleh RTP pada tahun 2003 seluas 620.582,19 hektar, yang mengalami perluasan 920.173,27 hektar pada tahun 2013 yang dikuasai RTP, yaitu seluas 1.540.755,46 hektar. Berarti bahwa penguasaan tanah RTP mengalami peningkatan dari 1,15 hektar menjadi 2,65 hektar atau perluasan 130,43 % setara 1,50 hektar.

Dari 581,52 ribu RTP sebagai pengguna tanah sebanyak 97,69 % (568,07 ribu RTP), sedangkan sisanya 13,45 ribu RTP (2,31%) bukan pengguna lahan. Dari RTP pengguna lahan pertanian ini terdiri dari: RTP petani gurem yang menguasai atau memiliki tanah seluas kurang dari 0,50 hektar berjumlah 68,58 ribu RTP (12,07%), sedangkan selebihnya berstatus sebagai RTP petani non-gurem sebanyak 499,51 ribu RTP (87,93%). Jumlah petani gurem mengalami penurunan sebanyak 70.838 RTP pada kurun waktu 2003-2013, terutama yang memiliki lahan kurang 0,1 hektar. Dari RTP petani non-gurem yang terbanyak mengalami pertambahan adalah RTP yang menguasai atau memiliki lahan lebih 3 hektar, yaitu 51.187 RTP.

2.3.1.9 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan umum dalam Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Peningkatan Mutu Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil serta Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kependudukan. Di Provisi Riau terdapat sebanyak 1.210.188 KK telah mencetak Kartu Keluarga (KK) atau sebesar 71,71% dari jumlah seluruh KK, sedangkan sisanya yaitu 383.702 KK atau 22,74% belum mencetak Kartu Keluarga. Jumlah penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah 4.034.569 jiwa. Kota Pekanbaru merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbanyak yaitu 639.411 jiwa sedangkan daerah yang terkecil penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini berkaitan dengan jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut.

Secara keseluruhan penduduk Provinsi Riau yang memiliki Akta Kelahiran hanya sebesar 9,76%, atau hanya sebanyak 572.405 jiwa dari 5.867.258 jiwa penduduk Provinsi Riau. Daerah yang menunjukkan kepemilikan Akta Kelahiran terbanyak berada di Kota Dumai yaitu telah mencapai 31,60%, sedangkan daerah terkecil dalam pendataan Akta Kelahiran berada di Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu hanya sebesar 2,52%. Kecilnya persentase kepemilikan Akta Kelahiran dikarenakan ketidak lengkapan data diri yang dilakukan oleh peduduk saat mengurus dokumen kependudukan.

2.3.1.10 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan yang mendapat perhatian khusus guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan antara Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Persentase Partisipasi Perempuan

di Lembaga Pemerintahan, Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta, Rasio KDRT, dan Kesetaraan Gender.

Hasil yang di peroleh dari urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukan bahwa partisipasi angkatan kerja Perempuan Pada tahun 2009 sebanyak 1.728.923 jiwa kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi 2.007.552 jiwa. Kenaikan jumlah tenaga kerja perempuan terus terjadi, sehingga berdasarkan hasil proyeksi jumlah tenaga kerja perempuan meningkat menjadi 2.843.439 jiwa pada tahun 2025Untuk artisipasi perempuan dilembaga pemerintahan danlembaga swasta menunjukan tren positif yang terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah kasus KDRT pada tahun 2009 sebanyak 225 kasus dan mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 308 kasus. Peningkatan jumlah kasus KDRT ini sejalan dengan rasio KDRT terhadap jumlah Rumah Tangga di Provinsi Riau. Pada tahun 2009 rasio KDRT sebesar 1,93, artinya bahwa setiap 10.000 Rumah Tangga terdapat 1,93 kasus KDRT. Rasio KDRT meningkat menjadi 2,09, artinya bahwa setiap 10.000 Rumah Tangga terdapat 2,09 kasus KDRT

2.3.1.11 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah Provinsi Riau sangat menaruh perhatian pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, karena urusan ini akan secara signifikan mempengaruhi tingkat kesejahteraan warga Riau secara keseluruhan. Tingkat Total Fertility Rate (TFR) Provinsi Riau juga mengalami penurunan dari 3,10 pada tahun 1994 terus mengalami tren penurunan hingga mencapai 2,90 pada tahun 2012. Berdasarkan hasil dari proyeksi dihasilkan bahwa pada tahun 2025 tren TFR baik Nasional dan Provinsi Riau turun, yaitu masing-masing menjadi 2,45 dan 2,76. Penurunan ini terjadi akibat tingginya angka peserta KB Aktif setiap tahunnya. Pada data SP 1980, peserta aktif KB sebesar 15,80% dari jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) dan terus meningkat menjadi 61,60% pada tahun 2012 serta pemakaian alat kontrasepsi semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data SDKI 1991 sebesar 39,8% meningkat menjadi 61,1% pada SDKI 2012. Sedangkan bila berdasarkan alat kontrasepsi yang digunakan, alat kontrasepsi Suntikan paling banyak digunakan, yaitu sebanyak 11,9% pada tahun 1991 meningkat menjadi 29,1 % pada tahun 2012.

2.3.1.12 Tenaga Kerja

Jumlah Penduduk Usia Kerja di Provinsi Riau, dari tahun 2011 sampai tahun 2015 cenderung terus meningkat dengan jumlah 4.383.550 jiwa pada tahun 2015. Pada tahun yang sama jumlah pengaguran 217.053 jiwa angka ini naik jika dilihat dari tahun 2011 yang berjumlah 136.222 jiwa. Sedangkan untuk kesempatan kerja/Berkerja pada tahun 2015 tercatat sebanyak 2.554.296 jiwa. Secara umum TPAK dan TPT provisi Riau menujukan tern arah yang baik ini dapat dilihat pada kurun waktu 2005 hingga 2015 angka TPAK dan TPT Provinsi Riau selalu naik walau tidak signifikan. Hal ini merupakan salah satu indikator yang menandakan perekonomian Provinsi Riau juga membaik.

Gambar 2. 7. Perkembangan Ketenagakerjaan Provinsi Riau tahun 2005-2015

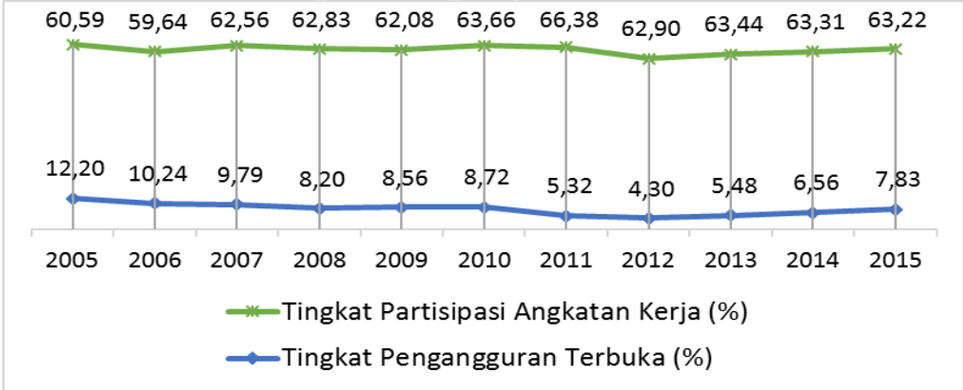

Sumber: Bappeda Provinsi Riau

2.3.1.13 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Perkembangan koperasi di Provinsi Riau dalam satu dasawarsa terakhir periode 2005-2014 mengalami tren positif merata pada setiap kabupaten/kota. Selama periode 2011 – 2015, jumlah koperasi di Provinsi Riau terus meningkat. Pada tahun 2011, jumlah koperasi di Provinsi Riau sebanyak 4.865 koperasi, meningkat menjadi 5.125 koperasi pada tahun 2013. Pada tahun 2015, jumlah koperasi menurun menjadi 5.048 koperasi. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan koperasi aktif di Provinsi Riau meningkat sebesar 1,87% per tahun. Koperasi yang tumbuh dan aktif di provinsi Riau adalah Koperasi Unit Desa Perkebunan. Pada periode yang sama, jumlah anggota koperasi memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2011, jumlah anggota koperasi yang aktif sebanyak 609.876 orang, meningkat menjadi 629.567 orang pada 2013. Pada tahun 2015, jumlah anggota koperasi aktif di Provinsi Riau meningkat menjadi 506.614 orang. Selama periode 2011 –2015, rata-rata pertumbuhan jumlah anggota koperasi aktif di Provinsi Riau menurun sebesar -3,26% per tahun.

2.3.1.14 Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu variabel penting untuk meningkatkan perekonomian daerah. Oleh sebab itu upaya- untuk mendorong meningkatnya investasi senatiasa harus menjadi perhatian. Faktor yang dapat mendorong perkembangan investasi daerah adalah antara lain dengan memermudah proses layanan perizinan, menjaga konsistensi peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal, melakukan promosi investasi, dan menciptakan suasana aman dan nyaman.

Selama kurun waktu 2011 -2015 perkembangan investor di Provinsi Riau selama cenderung berfluaktuatif meningkat baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), Peningkatan jumlah investor PMDN dan PMA di Provinsi Riau diikuti dengan jumlah realisasi nilai investasi. Pada tahun 2011, jumlah nilai investasi PMDN Rp 7.462,59 Milyar dan PMA senilai US$ 212,34 Juta. Sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp 9.943,04 Milyar untuk nilai PMDN dan US$ 653,39 juta untuk PMA yang mengalami penurunan. Jumlah investasi ini sebagian besar adalah pada bidang usaha perkebunan, industri makanan dan jasa lainnya.

2.3.1.15 Kebudayaan

Usaha pelestarian nilai-nilai luhur budaya didukung oleh peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81A 2013 tentang implementasi kurikulum (pasal 2 ayat 1 huruf b tentang pedoman pengembangan budaya lokal). Permen ini didukung oleh Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 12 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Riau. Khususnya pasal 10 huruf b tentang kearifan lokal Provinsi Riau dan pasal 17 ayat 2 huruf e tentang nilai-nilai budaya – Budaya Melayu. Selanjutnya Perda Provinsi Riau No. 12 tahun 2013 tersebut, dalam pelaksanaannya diatur oleh peraturan Gubernur Provinsi Riau No. 72 tahun 2015 tentang pelaksanaan pembelajaran muatan lokal Budaya Melayu Riau.

Pengembangan kebudayaan melayu di Provinsi Riau pada dasarnya merupakan upaya dalam rangka mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh, berbudi luhur, toleran dan berakhlaq mulia serta untuk melestarikan nilai-nilai luhur Budaya Melayu yang mejadi payung budaya di Provinsi Riau, sesuai dengan isi, visi dan misi Riau 2025.

2.3.1.16 Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi kemasyarakatan pemuda yang terdaftar di Peovinsi Riau ada sebanyak 12 ormas. Dimana Organisasi pemuda tersebut, telah ikut memberi warna kepada gerak pembangunan non-fisik di Provinsi Riau khususnya yang menyangkut dengan perjuangan aspirasi masyarakat (kepemudaan). Hal itu sejalan dengan visi dan misi Riau 2025 yang mengarah kepada lebih meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang kehidupan kepemudaan pada masa lalu dan di masa yang akan datang.

2.3.1.17 Kesatuan Bangsa dan Politik Negeri

Selama periode 2009–2014, jumlah ormas yang terdaftar di Provinsi Riau jumlahnya berfluktuatif menurun. Kondisi yang relatif sama pada jumlah LSM dan OKP. Jumlah ormas terbanyak pada tahun 2011 yaitu sebanyak 105, namun pada tahun 2013-2014 jumlah yang terdaftar hanya sebanyak 4 ormas. Jumlah LSM terdaftar terbanyak pada tahun 2010 yaitu sebanyak 220 LSM, akan tetapi pada tahun 2013–2014, yang terdaftar hanya 11 LSM. Jumlah OKP yang terdaftar, terbanyak pada tahun 2011 yaitu sebanyak 7 OKP, akan tetapi pada tahun 2013 – 2014 tidak ada yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri Provinsi Riau. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan dan penegakan organisasi kemasyarakatan/LSM/OKP belum berjalan baik.

Gambar 2. 8. Perkembangan Jumlah Ormas, LSM dan OKP Provinsi Riau 2005-2014

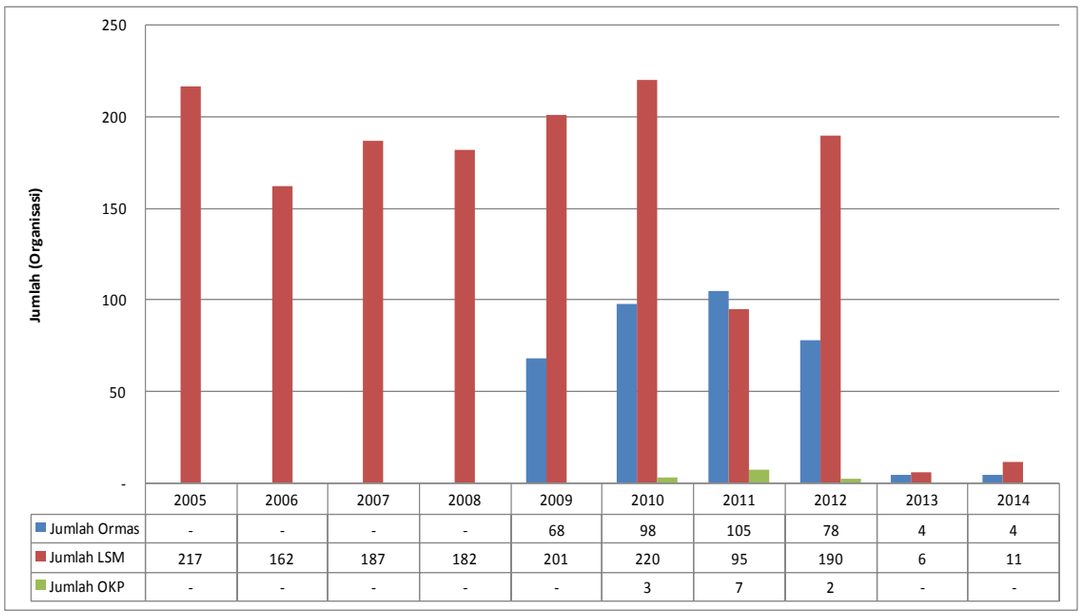

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Ormas	-	-	-	-	68	98	105	78	4	4
Jumlah LSM	217	162	187	182	201	220	95	190	6	11
Jumlah OKP	-	-	-	-	-	3	7	2	-	-

Sumber: Kesbangpol Provinsi Riau (2015) dan RPJMD Provinsi Riau 2014 - 2019

2.3.1.18 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (ii) kecukupan pengungkapan, (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektifitas sistem pengendalai internal. Terdapat 4 (empat) opini yang diberikan pemeriksa yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar dan pernyataan menolak memberikan opini. Pada periode 2010 – 2015 Pemerintah Provinsi Riau hanya sekali mendapatkan WDP pada tahun 2011 sedangkan tahun lainnya mendapatkan prediket WTP, keberhasilan pemerintah Provinsi Riau mendapatkan WTP perlu dipertahankan.

Tabel 2. 3. Penilaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2010 – 2015 Provinsi Riau

Deskripsi	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Opini BPK	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Akuntabilitas	51,40	57,29	59,97	61,91	CC	CC

Sumber : Inspektorat Provinsi Riau

Sementara itu dalam pengelolaan pemerintahan, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Indonesia Governance Index (IGI), pada tahun 2014 Provinsi Riau memperoleh nilai Indek Tata Kelola Pemerintahan Daerah 6,18. Perolehan nilai tersebut menempatkan Provinsi Riau pada peringkat ke 8, masuk dalam 10 daerah yang memperoleh nilai terbaik.

Capaian Indek Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Riau ini perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat mendekati skala maksimal 10.

Dalam bidang kepegawaian untuk meningkatkan kinerja SKPD Provinsi Riau , sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah melakukan seleksi untuk pimpinan tinggi pratama. Seleksi ini merubah tradisi lama dalam perekrutan pejabat setingkat eselon II dari menggunakan *spoil system* kepada meritokrasi sistem. Perubahan sistem ini diharapkan mendapatkan pejabat pimpinan SKPD yang memiliki kemampuan manajerial yang tentunya dapat meningkatkan kinerja SKPD.

2.3.1.19 Pangan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2015 Ketahanan pangan diwujudkan oleh hasil kerja sistem ekonomi pangan yang terdiri atas 3 (tiga) sub sistem yaitu (1) sub sistem ketersediaan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan. Ketersediaan pangan harus dikelola dengan baik sehingga dapat menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannnya. Sebagai acuan kuantitatif adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG) rekomendasi Widya Karya Pangan dan Gizi sebesar 2.200 kalori/kapita/hari untuk energi, dan 57 gram/kapita/hari untuk protein (2) keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat, baik secara fisik maupun ekonomi. Setiap rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. dan (3) pemanfaatan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi Pangan dan Gizi, termasuk pengembangan keamanan Pangan. Pemanfaatan pangan dalam tubuh dapat optimal dengan peningkatan kesadaran atas pentingnya pola konsumsi beragam, bergizi dan berimbang.

Pada periode 2005-2014 konsumsi beras dan jagung terus mengalami kenaikan dengan besaran yang cukup signifikan. Bila dibandingkan antara konsumsi beras penduduk Provinsi Riau (104 kg/kapita/tahun) dengan produksi yang dihasilkan, perimbangan defisitnya terus meningkat dengan kecenderungan berfluktuatif menurun. Secara keseluruhan, rasio produksi terhadap konsumsi beras di Provinsi Riau terkategori defisit. Produksi beras Provinsi Riau tahun 2013 hanya mencukupi kebutuhan konsumsi sebesar 43% dan defisit sebesar 57%. Secara konvensional, untuk menutupi defisit beras Provinsi Riau, beras dipasok dari Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, semakin terbatasnya lahan sawah akibat dari alih fungsi lahan, rusaknya jaringan irigasi, dan perubahan iklim, diprediksi defisit berasa di Provinsi Riau pada tahun 2014 naik menjadi 63%.

2.3.1.20 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada periode 2005–2014, pemekaran terbanyak terjadi pada pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan. Pada tahun 2005, jumlah kecamatan di Provinsi Riau pada 10 Kabupaten/kota sebanyak 130 kecamatan. Pada tahun 2009, jumlah Kabupaten/kota di Provinsi Riau meningkat menjadi 12 Kabupaten/Kota dengan jumlah kecamatan meningkat menjadi 151 kecamatan dan menjadi 166 kecamatan pada tahun 2015. Selama periode ini rata-rata pertambahan kecamatan di Provinsi Riau meningkat sebesar 2,35% per tahun.

Seiring dengan peningkatan jumlah kecamatan, diikuti juga dengan peningkatan jumlah desa/kelurahan. Pada tahun 2005, jumlah desa/kelurahan di Provinsi Riau sebanyak 1.477 desa/kelurahan, meningkat menjadi 1.643 desa/kelurahan pada tahun 2009 dan menjadi 1.846 desa/kelurahan pada tahun 2015. Selama periode 2005 – 2014, rata kenaikan jumlah desa/kelurahan di Provinsi Riau meningkat sebesar 2,20% per tahun. Untuk klasifikasi desa pada Provinsi Riau masih didominasi pada desa Swadaya dengan total 69,35% dari total desa di ikuti dengan swakarya sebanyak 29,73% dan terakhir adalah desa swasembada sebanyak 0,91%

2.3.1.21 Kearsipan

Ketersediaan data-data statistik secara lengkap dan kontinu sangat penting dalam pembangunan suatu daerah atau negara. Di Provinsi Riau, bidang urusan statistik dilakukan oleh Bappeda Provinsi Riau bekerjasama dengan BPS Provinsi Riau. Selama periode 2009 – 2013, publikasi buku Riau Dalam Angka, PDRB Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Dalam Angka dan PDRB untuk masing-masingnya selalu disediakan atau 100% dilaksanakan. Kecuali pada tahun 2009, buku Kepulauan Meranti Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Meranti Tahun 2009 belum tersedia karena pada tahun 2009 Kabupaten Meranti baru dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis. Dari tahun 2010 hingga 2015 seluruh SKPD yang ada pada Provinsi Riau telah menerapkan arsip secara baik namun dalam peningkatan SDM bidang kearsipan dengan jangka waktu yang sama tidak ada penambahan dimana masih berjumlah 27 orang dan hal yang sama juga terjadi pada fungsional arsiparis hingga tahun 2014 berjumlah 13 orang.

2.3.1.22 Komunikasi dan Informatika

Kepemilikan dan penguasaan peralatan komunikasi dan informatika merupakan salah satu indikator kemajuan masyarakat suatu daerah. Pada tahun 2014, persentase rumah tangga yang memiliki telepon sebesar 3,60% dan HP sebesar 95,27% sehingga total rumah tangga yang memiliki sarana telekomunikasi sebesar 98,87%. Rumah tangga yang memiliki desktop sebesar 4,54% dan Laptop sebesar 18,74%.

Tabel 2. 4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon, Telepon Seluler (HP), Komputer Desktop, Komputer Laptop Tahun 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Memiliki			
		Telepon	HP	Desktop	Laptop
1.	Kuantan Singingi	3.91	-	2.19	-
2.	Indragiri Hulu	2.76	-	2.67	-
3.	Indragiri Hilir	1.97	-	2.99	-
4.	Pelalawan	1.35	-	2.39	-
5.	Siak	3.51	-	3.59	-
6.	Kampar	3.75	-	1.89	-
7.	Rokan Hulu	1.90	-	2.17	-
8.	Bengkalis	2.10	-	7.15	-
9.	Rokan Hilir	4.09	-	2.49	-
10.	Kepulauan Meranti	2.69	-	2.75	-
11.	Pekanbaru	6.86	-	11.13	-
12.	Dumai	4.60	-	5.58	-
Provinsi Riau		3.60	-	4.54	-

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2016) Keterangan: sejak 2015, HP dan Laptop ditanyakan ke Individu.

2.3.1.23 Perpustakaan

Perpustakaan daerah yang terdapat pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau pada tahun 2009 masing-masing satu perpustakaan dan tidak terjadi penambahan hingga pada tahun 2015. Jumlah pengunjung pada perpustakaan Soeman H.S sebanyak 378.556 orang pada tahun 2009, dan mengalami peningkatan jumlah pengunjung sampai dengan tahun 2012 sebesar 442.896 (16%), kemudian terjadi penurunan kunjungan pada tahun 2013 sebesar 47,07% dan kembali meningkat pada tahun 2015 sebesar 10,11%. Jumlah koleksi buku perpustakaan di Provinsi Riau (per Judul) pada tahun 2009 sebanyak 71.750 judul dan mengalami penurunan sebanyak 54.235 judul pada tahun 2015 sebesar -37,54%. Jumlah koleksi buku perpustakaan di Provinsi Riau (Per Eks) pada tahun 2009 sebanyak 192.685 eks mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu sebanyak 312.244 eks sebesar 58,82%.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.2.1 Pertanian

Padi dan jagung sebagai komoditas tanaman pangan utama sebagai bahan pangan utama untuk konsumsi masyarakat serta sumber pakan ternak dan ikan. Perkembangan pada tahun

2005-2015 di Provinsi Riau tentang luas panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan utama disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 5. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Utama Tahun 2005-2015 Provinsi Riau

No.	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pert. (%)
1	**Luas Panen (Hektar)**												
a.	Padi Sawah	114.028	114.493	120.482	120.849	127.522	131.263	123.038	117.649	97.796	85.062	86.218	-2,48
b.	Padi Ladang	20.390	21.684	26.685	26.947	21.901	24.825	22.204	26.366	20.722	20.975	21.328	1,47
c.	Jagung	16.524	15.539	18.379	21.397	25.016	18.044	14.139	13.284	11.748	12.057	12.425	-1,58
2	**Produksi (Ton)**												
a.	Padi Sawah	380.335	382.034	430.577	433.855	478.343	507.370	481.911	453.294	387.849	337.233	345.441	-0,58
b.	Padi Ladang	43.760	47.346	59.510	60.406	53.086	67.494	53.877	58.858	46.295	48.242	48.476	2,28
c.	Jagung	36.421	34.728	40.410	47.959	56.521	41.862	33.197	31.433	28.052	28.651	30.870	-0,46
3	**Produktivitas (Ton/Hektar)**												
a.	Padi Sawah	3,34	3,34	3,57	3,59	3,75	3,87	3,92	3,85	3,97	3,96	4,01	1,87
b.	Padi Ladang	2,25	2,18	2,23	2,24	2,42	2,72	2,43	2,23	2,23	2,30	2,27	0,31
c.	Jagung	2,20	2,23	2,20	2,24	2,26	2,32	2,35	2,37	2,39	2,38	2,48	1,23

Sumber : BPS Provinsi Riau

Produksi padi sawah dan jagung dalam periode 2005-2015 mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan masing-masing -0,58 persen/tahun dan -0,46 persen/tahun, sedangkan produksi padi ladang mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 2,28 persen/tahun. Tinggi rendahnya produktivitas sangat dipengaruhi faktor internal dan ekternal petani, seperti alih teknologi, tingkat penerapan teknologi, pengadaan sarana produksi, penyediaan air irigasi dan iklim, permodalan, luas lahan dikelola dan faktor lainnya. Produksi padi (sawah dan ladang) dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) tertinggi yang dicapai pada tahun 2010 (574.864 ton), terutama disebabkan luas panen yang mengalami penambahan, kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2015 (345.441 ton), yang lebih rendah dibanding sebelumnya (2005), yaitu 424.095 ton. Produktivitas tertinggi yang dicapai dan luas panen terluas tanaman padi sawah dan padi ladang terjadi pada tahun 2010 sebagai awal program Operasi Pangan Riau Mandiri. Sedangkan produksi tanaman jagung tertinggi dicapai pada tahun 2009 (56.521 ton), terutama disebabkan luas panen terluas, sedangkan produktivitas tertinggi terdapat pada tahun 2015. Mengenai produksi jagung mengalami penurunan sampai pada tahun 2015 (30.870 ton/ha) yang lebih rendah dari pada tahun 2005 (36.421 ton/ha). Konsumsi beras dan jagung di Provinsi Riau masing-masing sebanyak 647.930 ton dan 50.126 ton pada tahun 2014.

Tabel 2. 6. Perkembangan Produksi Sayur-sayuran Tahun 2005 – 2015 Provinsi Riau

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pert.(%)
1	Cabe	7.731	11.372	12.158	8.740	11.215	11.941	15.832	15.906	15.509	15.608	11.956	6,85
2	Ketimun	5.991	13.037	23.329	14.483	19.241	15.774	15.667	13.545	20.726	19.332	14.175	17,89
3	Terong	2.421	9.962	16.113	9.471	10.651	14.170	14,424	13.861	17.257	14.883	12.102	36,75
4	Kacang Panjang	7.230	9.640	10.450	7.950	9.973	11.056	12.827	11.573	12.447	12.787	8.795	3,94
5	Bayam	5.256	6.013	5.959	4.703	4.899	4.944	6.463	7.804	8.381	7.984	7.258	4,25
6	Kangkung	5.880	8.880	12.977	7.648	8.957	9.716	10.155	12.556	13.955	13.884	9.587	8,95
7	Petsai dan Sawi	967	1.149	1.449	1.979	2.338	2.964	2.424	3.266	3.484	3.190	1.540	8,95
8	Labu	38	408	1.540	601	782	671	333	251	515	522	53	114,78
9	Lainnya	176	95	1.900	2.224	1.912	2.937	3.198	4.747	8.973	577	1.017	203,96
Jumlah		35.690	60.556	85.875	57.799	69.968	74.173	81.323	83.509	101.247	88.767	66.483	10,20

Sumber : BPS Provinsi Riau

Produksi sayuran 2005-2015 mengalami peningkatan, yaitu dari 35.690 ton menjadi 66.201 ton dengan pertumbuhan 10,20 persen/tahun, terutama pertumbuhan komoditas labu dan lainnya. Produksi sayuran rata-rata mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti komoditas cabe, ketimun, terong, kacang panjang, bayam, kangkung, petsai dan sawi. Jika diamati produksi sayuran terbanyak pada tahun 2013 adalah terong, bayam, kangkung dan petai/sawi. Pada tahun 2007 adalah ketimun dan labu, sedangkan kacang panjang pada tahun 2014.

Tabel 2. 7. Perkembangan Produksi Buah-buahan Tahun 2005 – 2015 Provinsi Riau

No.	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pert.(%)
1	Pisang	29.839	35.263	21.420	29.008	31.594	25.243	26.498	20.644	19.685	22.758	21.314	-0,93
2	Durian	7.227	12.696	8.739	10.571	11.510	2.374	11.787	13.250	7.951	10.201	12.366	41,34
3	Duku/Langsat	1.659	3.330	2.622	5.300	3.542	677	2.029	3.383	2.645	2.372	1.369	25,96
4	Mangga	3.067	5.404	4.820	6.012	7.029	5.341	6.005	7.337	6.210	9.785	10.248	16,46
5	Jeruk	85.151	89.959	25.934	27.073	19.221	11.138	4.586	5.057	5.195	7.249	10.243	-9,72
6	Rambutan	14.841	20.277	13.382	11.850	21.989	5.361	10.381	9.223	7.604	9.839	9.963	9,67
7	Pepaya	7.966	8.215	4.314	6.566	8.842	7.570	7.391	12.965	19.517	7.379	7.038	8,49
8	Nenas	46.630	46.400	33.753	45.585	66.422	19.837	109.374	92.444	96.173	107.438	74.389	40,38
9	Jambu	4.570	6.548	3.206	10.372	13.539	4.600	4.215	3.783	3.882	3.407	4.523	18,48
10	Lainnya	26.925	23.116	21.636	20.103	16.705	22.305	23.282	20.780	21.069	25.621	23.537	-0,25
Jumlah		227.875	251.208	139.826	172.440	200.393	104.446	205.548	188.866	189.931	206.049	174.990	4,02

Sumber : BPS Provinsi Riau

Perkembangan produksi buah-buahan mengalami penurunan dari 227.875 ton (2005) menjadi 174.990 ton (2015) dengan pertumbuhan 4,02 persen/tahun sedangkan durian sebagai buahan dengan pertumbuhan yang tertinggi, yaitu 41,34 persen. Kemudian menyusul nenas 40,38 persen yang menduduki produksi terbanyak, yaitu 74.389 ton, namun lebih rendah dari tahun 2011 (109.374 ton). Pisang, durian, dan jeruk menghasilkan produksi terbanyak pada tahun 2006, sedangkan pada tahun 2009 adalah komoditas rambutan dan jambu masing-masing 21.989 ton dan 13.539 ton. Kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2015. Produksi buahan yang fluktuatif, terutama produksi terendah pada tahun 2010, yaitu 104.446 ton, diduga ada ketimpangan pendataan.

2.3.2.2 Peternakan

Produksi dan konsumsi daging di Provinsi Riau berdasarkan sumbernya, yaitu ruminansia dan unggas, mengalami pertumbuhan positif. Produksi daging unggas hampir empat kali lipat dari daging ruminansia, sedangkan konsumsi daging unggas mencapai lebih tiga kali lipat dari daging ruminansia. Produksi daging ruminansia dapat memenuhi kebutuan konsumsi, kecuali pada tahun 2010, 2011 dan 2013. Sedangkan konsumsi daging unggas melebihi produksinya pada kurun waktu 2008 - 2011. Pertumbuhan produksi daging ruminansia dan unggas lebih rendah dari pertumbuhan konsumsinya, sehingga untuk mengantisipasi kebutuhan daging ke depan diperlukan upaya peningkatan pertumbuhan produksi daging. Peningkatan produksi daging melalui penambahan populasi ternak sangat diperlukan untuk mengimbangi pemenuhan kebutuhan konsumsi daging sebagai sumber protein dan lemak.

Tabel 2. 8. Perkembangan Populasi dan Produksi Ruminansia dan Daging Unggas Tahun 2005 – 2015 Provinsi Riau

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pert. (%)
1	**Populasi (Ekor)**												
a.	Sapi	102.352	108.056	114.156	161.202	172.394	180.612	164.707	189.060	175.431	217.652	**229.634**	9,25
b.	Kerbau	47.799	50.195	50.362	49.115	51.697	**52.700**	38.300	41.229	32.237	43.163	39.163	-0,68
c.	Kambing	**256.324**	236.515	221.505	240.809	164.664	196.064	196.115	208.429	175.832	184.899	195.827	-1,62
d.	Domba	2.453	2.582	5.578	5.798	3.366	3.888	3.985	4.583	4.739	8.242	7.354	18,28
e.	Babi	46.386	49.063	31.233	54.567	**65.258**	47.631	47.449	49.873	46.483	47.324	48.033	3,80
f.	Ayam Broiler	27.754.620	24.151.879	24.045.275	30.679.920	29.710.959	35.141.255	35.141.255	38.165.987	36.930.599	**39.987.136**	39.304.056	4,12
g.	AyamKampung	5.738.847	6.978.183	4.487.162	3.466.760	2.819.901	3.601.212	3.601.212	3.377.652	3.163.705	3.327.820	3.746.784	-2,26
h.	Itik	339.269	**455.633**	351.374	293.203	220.491	237.697	237.697	289.564	243.483	289.238	259.363	-0,78
2	**Produksi Daging (Kg)**												
a.	Sapi	4.593.183	6.316.486	6.640.264	7.655.407	7.639.840	7.478.418	8.773.682	11.317.359	8.242.781	9.297.618	8.676.703	8,09
b.	Kerbau	1.099.001	1.850.313	1.667.962	1.799.783	1.272.606	1.359.282	1.021.748	1.607.797	1.367.217	1.839.676	1.813.239	9,46
c.	Kambing	434.806	1.530.233	1.466.306	2.120.127	1.192.510	490.123	446.970	465.571	550.139	620.342	648.241	22,05
d.	Domba	1.490	2.788	32.114	7.850	9.536	8.739	4.268	6.386	10.174	13.462	15.780	118,39
e.	Babi	874.262	1.260.689	383.608	334.158	662.819	985.881	1.081.370	813.267	821.786	2.127.927	2.058.969	25,05
f.	Ayam Broiler	24.045.275	24.151.879	27.754.620	28.703.163	29.901.246	25.209.624	25.618.229	37.034.456	26.609.747	40.731.586	45.307.621	8,96
g.	Ayam Kampung	8.234.085	7.058.545	3.574.856	2.413.497	1.656.175	1.780.741	1.255.545	2.702.121	3.302.202	4.043.996	5.613.968	4,92
h.	Itik	339.269	455.633	351.374	149.974	216.336	262.924	245.886	231.651	245.625	282.502	292.576	3,22
Jumlah Produksi Daging		39.621.371	42.626.566	41.871.104	43.183.959	42.551.068	37.575.732	38.447.698	54.178.608	41.149.671	58.957.109	**64.427.097**	6,75

Sumber : BPS Provinsi Riau

Produksi daging terbanyak terdapat pada tahun 2015 (64.427.097 ton). Pertumbuhan produksi daging mencapai 6,75 persen/tahun, dimana sumbangan terbanyak bersumber dari daging ayam broiler (8,96 persen), diikuti daging sapi (8,09 persen). Daging bersumber dari

domba dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu 118,39 persen/tahun, namun kontribusi terhadap produksi daging masih rendah, yaitu 0,02 persen.

2.3.2.3 Perkebunan

Perkebunan yang menjadi unggulan di Provinsi Riau adalah Komoditi Kelapa Sawit, Kelapa dan Karet. Pertumbuhan produksi kelapa sawit sebesar 9,11 persen sedangkan produksi kelapa dan karet dalam kurun waktu 2005-2015 mengalami penurunan dengan pertumbuhan negatif masing-masing 0,32 persen dan 0,34 persen.

Tabel 2. 9. Luas Areal, Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Perkebunan Utama Tahun 2005 – 2015 Provinsi Riau

No	Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata Pert.(%)
1	**Luas Areal (Hektar)**												
a.	Kelapa Sawit	1.424.814	1.530.154	1.611.382	1.673.551	1.925.341	2.103.174	2.258.553	2.372.402	2.399.172	2.411820	2.424.545	5,55
b.	Kelapa	546.938	551.613	552.022	553.657	527.598	525.398	521.038	521.792	520.260	516.895	515.168	-0,59
c.	Karet	528.734	514.470	532.901	528.655	516.474	499.490	504.139	500.851	505.264	502.906	501.788	-0,50
2	**Produksi (Ton)**												
a.	Kelapa Sawit (CPO)	3.406.394	4.659.264	5.111.338	5.764.201	5.932.308	6.293.542	7.047.221	7.343.498	7.570.854	7.761.293	7.841.947	9,11
b.	Kelapa (Kopra)	451.060	554.590	563.096	575.612	517.773	495.306	481.087	473.221	427.080	421.654	421.465	-0,32
c.	Karet (KKK)	396.291	415.906	392.125	409.445	403.075	336.670	333.069	350.476	354.257	367.261	374.900	-0,34
3	**Rata- rata Produksi (kg/hektar)**												
a.	Kelapa Sawit	2.850	3.864	3.996	4.172	4.056	3.898	3.968	3.836	3.857	3.826	3.752	3,30
b.	Kelapa	1.457	1.451	1.501	1.557	1.470	1.365	1.358	1.319	1.204	1.187	1.170	-2,09
c.	Karet	1.340	1.398	1.353	1.398	1.404	1.143	1.091	1.094	1.100	1.115	1.122	-1,55

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Tanaman kelapa sawit tidak diusahakan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana areal tanam terluas terdapat di Kabupaten Rokan Hulu seluas 422.861 hektar (17,44 persen), kemudian Kabupaten Kampar seluas 416.393 hektar (17,17 persen). Luas areal tanam dan produksi kelapa sawit relatif sama antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.

Tabel 2. 10. Luas Areal, Produksi dan Rata-rata Produksi Tanaman Perkebunan Utama Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 Provinsi Riau

No	Kabupaten/ Kota	Kelapa Sawit			Kelapa			Karet		
		Areal Tanam (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata Produksi (kg/ha)	Areal Tanam (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata Produksi (kg/ha)	Areal Tanam (ha)	Produksi (ton)	Rata-rata Produksi (kg/ha)
1	Kuantan Singingi	129.320	411.262	2.714	2.761	1.925	414	145.364	85.100	1.040
2	Indragiri Hulu	118.969	423.636	3.683	1.828	357.012	546	61.372	43.951	1.243
3	Indragiri Hilir	228.052	701.544	3.336	440.821	347	1.701	5.378	4.286	1.377
4	Pelalawan	306.977	1.247.072	3.914	16.789	17.430	268	30.009	40.609	1.423
5	Siak	288.362	970.269	3.449	1.628	1.193	1.089	15.477	11.380	1.011
6	Kampar	416.393	1.217.174	2.047	1.714	529	1.172	102.234	74.285	990
7	Rokan Hulu	422.861	1.538.092	3.969	1.139	620	1.130	56.710	57.399	1.150
8	Rokan Hilir	183.687	414.263	3.275	10.020	9.728	740	33.433	22.724	1.059
9	Bengkalis	281.474	807.413	2.858	5.362	4.412	1.153	25.830	23.165	862
10	Kepulauan Meranti	-	-	-	31.453	27.384	1.168	20.481	9.858	969
11	Pekanbaru	10.929	30.834	3.693	15	9	1.500	3.085	452	582
12	Dumai	37.521	80.388	3.270	1.638	876	1.112	2.415	1.692	1.337
Provinsi Riau		2.424.545	7.841.947	3.752	515.168	421.465	1.170	501.788	374.901	1.122

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Riau (2015) data sementara, diolah.

Areal tanaman kelapa (Hibrida dan Dalam) yang terluas terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir seluas 440.821 hektar (85,57 persen), kemudian disusul Kabupaten Kepulauan Meranti seluas 31.453 hektar (6,11 persen). Areal tanaman karet yang terluas terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi seluas 145.364 hektar setara 28,97 persen dari luas tanaman karet di Provinsi Riau, kemudian disusul Kabupaten Kampar (20,37 persen). Rata-rata produksi karet tertinggi dicapai Kabupaten Pelalawan sebanyak 1.423 kg/ha.

2.3.2.4 Kehutanan

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Riau atas dasar harga konstan tanpa migas sebesar 12,28 % pada tahun 2008 dan menurun menjadi 11,68% tahun 2009. Pada tahun 2010-2015, penghitungan PDRB menggunakan harga konstan tahun dasar 2010. Dan terjadi penurunan sampai dengan tahun 2015 sebesar 4,62%.

Gambar 2. 9. Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Provinsi Riau Tahun 2008-2015 (%)

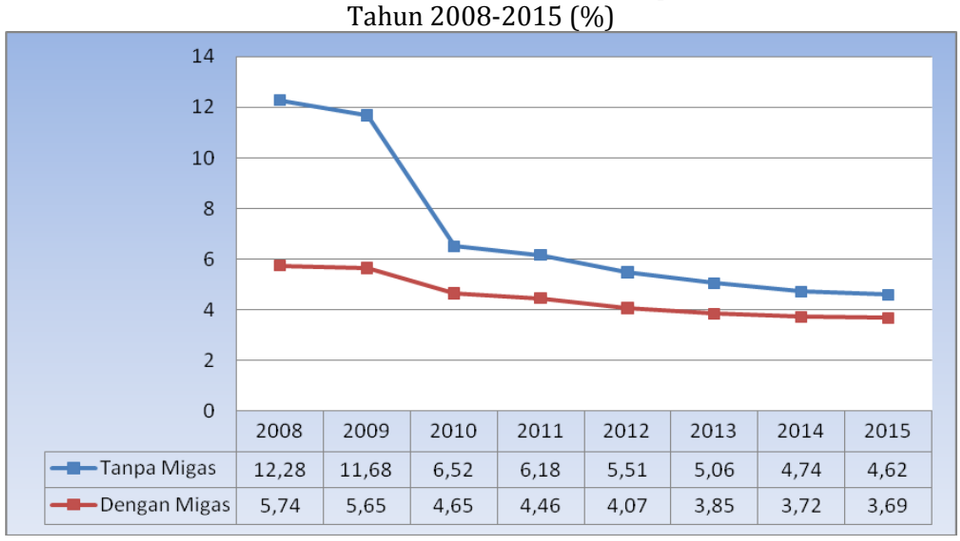

Sumber : BPS Provinsi Riau (Tahun Dasar 2010)

2.3.2.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Riau memiliki potensi pertambangan yang besar. Potensi/cadangan bahan tambang sebagai sumber energi primer yang banyak terdapat di Provinsi Riau adalah Minyak bumi, Gas bumi, Batubara, Bitumin dan Gambut.

Tabel 2. 11. Potensi Pertambangan Menurut Jenis Provinsi Riau

No	Sumber Energi Primer	Potensi	Satuan	Lokasi
1	Minyak Bumi	4,27	MMSTB	Bengkalis, Siak, Rohil, Rohul, Kampar, Pelalawan dan Inhu
2	Gas Bumi	7,75	TSCF	Pelalawan, Siak, Pekanbaru, Bengkalis
3	Batubara	2,37	Milyar Ton	Kuansing, Rohul, Inhil, Inhu dan Kampar
4	Bitumin (Oil shale)	52,8	Juta Ton	Kuansing
5	Gambut	12,88	Milyar Ton	Siak, Bengkalis dan Inhil

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Produksi pertambangan Provinsi Riau yang terus diusahakan selama periode 2010–2015 meliputi minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Produksi minyak bumi Provinsi Riau cenderung menurun dikarenakan meningkatnya jumlah sumur yang tua dan kurang produktif. Pada tahun 2010, produksi minyak bumi Provinsi Riau 133,59 juta barel, menurun menjadi 83,03 juta barel pada tahun 2015.

Gambar 2. 10. Produksi Pertambangan Tahun 2010-2015 Provinsi Riau

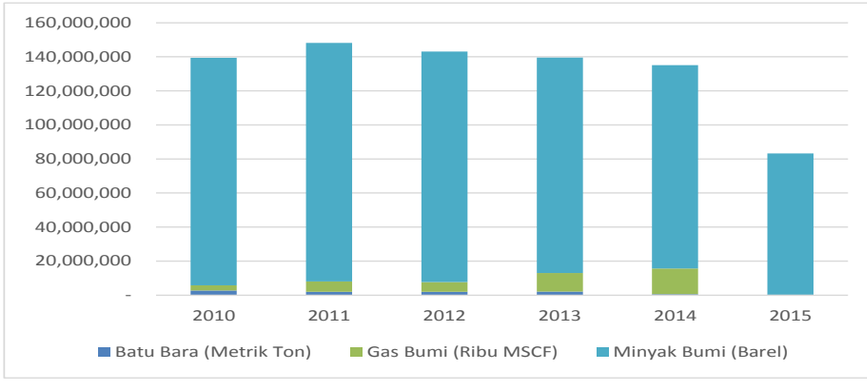

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Produksi minyak bumi dari bumi Provinsi Riau merupakan yang terbesar di Indonesia dengan porsi sebesar 48,31% dari total produksi minyak bumi Indonesia tahun 2011 (288.899 ribu barel). Produksi minyak mentah Provinsi Riau, hanya sebagian kecil yang diolah di Provinsi Riau sebesar yaitu 1.235.261 liter atau setara 0,88% dari total produksi minyak mentah Provinsi Riau tahun 2011, sebagian besar diekspor dalam bentuk minyak mentah sehingga nilai tambah diperoleh negara pengimpor. Sebaliknya Provinsi Riau mengimpor hasil minyak sebesar 425.073.163 kilo minyak olahan dari luar. Oleh karena itu, potensi produksi minyak mentah yang dimiliki Provinsi Riau dapat dikembangkan dengan meningkatkan jumlah pabrik pengolahan minyak mentah.Pada tahun 2008, produksi batubara Provinsi Riau masih sebesar 1.274.181 metrik ton, meningkat menjadi 2.057.139,59 metrik ton tahun 2013. Untuk kontribusi sektor pertambangan dan pengalian kontribusi yang terus menurun sebesar 31,86% pada tahun 2011 kemudian menjadi 24,18% pada tahun 2015.

2.3.2.6 Pariwisata

Provinsi Riau memiliki potensi objek-objek pariwisata yang banyak. Dari potensi objek-objek wisata yang ada, hanya beberapa objek wisata yang mulai dikembangkan seperti (i) Wisata Fenomena Bono yang ada di Kabupaten Pelalawan, (ii) Candi Muara Takus yang terletak di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, (iii) Benteng Tujuh Lapis dan sumber air panas di Kabupaten Rokan Hulu, (iv) Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, (v) Festival Bakar Tongkang di Kabupaten Rokan Hilir, (vi) Danau Buatan di Kota Pekanbaru dan (vii) Istana Siak Sri Indrapura di Kabupaten Siak.

Tabel 2. 12. Data Objek dan Daya Tarik Wisata Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

No	Kabupaten/ Kota	Objek Wisata									
		Alam	Sejarah	Budaya	Religius	Bahari	Tirta	Rekreasi	Agro	Minat Khusus	Total
1	Kuantan Singingi	14	6	4	2	-	12	-	-	3	41
2	Indragiri Hulu	15	9	2	-	-	3	-	-	-	29
3	Indragiri Hilir	10	10	5	4	5	2	1	6	-	51
4	Pelalawan	2	3	1	1	-	1	-	-	2	10
5	Siak	4	19	-	2	-	2	-	1	1	29
6	Kampar	5	5	3	4	-	5	3	1	3	29
7	Rokan Hulu	10	4	-	1	-	2	-	-	-	17
8	Bengkalis	1	3	3	-	3	5	-	2	-	17
9	Rokan Hilir	5	9	-	1	1	-	1	-	2	19
10	Kepulauan Meranti	2	-	-	-	-	-	-	-	4	6
11	Pekanbaru	1	2	2	2	-	1	4	-	7	19
12	Dumai	6	3	-	-	2	1	1	-	3	16
	Riau	75	73	20	21	11	34	10	10	33	287

Sumber: Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau

Kunjungan wisata mancanegara (wisman) yang masuk ke Provinsi Riau mengalami penurunan dimana pada tahun 2005 yaitu 54.724 sedangkan pada tahun 2015 jumlah wisatawan mancanegara berjumlah 28.407 orang.

Akomodasi hotel di Provinsi Riau tersedia dengan kualitas dan kuantitas semakin meningkat, dengan rata-rata presentasi sebagai berikut 48,77% dalam jumlah akomodasi 30,79%, kamar 62,32% dan tempat tidur 53,21%. Apabila industri pariwisata Provinsi Riau dapat dikembangkan secara optimal, diyakini memberikan *Multiplier Effect* yang besar dan kontribusinya akan signifikan dalam perekonomian di Provinsi Riau.

2.3.2.7 Kelautan dan Perikanan

Selama periode 2005–2014, jumlah produksi perikanan di Provinsi Riau memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2005, jumlah produksi ikan Provinsi Riau sebanyak 138.913,30 ton yang terdiri dari perikanan laut sebanyak 97.781,30 ton (66,10%), perikanan perairan umum sebanyak 24.693,70 ton (16,69%) dan perikanan budidaya sebanyak 25.443,30 ton (17,20%). Pada tahun 2009, jumlah produksi perikanan Provinsi Riau menurun menjadi sebesar 123.851,70 ton yang terdiri dari perikanan laut sebesar menurun menjadi 75.517,50 ton (60,97%), perikanan perairan umum menurun menjadi 12.380,60 ton (10,00%0 dan perikanan budidaya meningkat menjadi 35.953,60 (29,03%). Pada tahun 2014, jumlah produksi perikanan kembali meningkat menjadi 187.269,32 ton yang terdiri dari perikanan laut sebanyak 107.306,2 ton (49,19%), perikanan perairan umum sebanyak 18.384,1 ton (9,64%) dan perikanan budidaya sebanyak 54.560,5 ton (41,17%).

2.3.2.8 Perdagangan

Letak Provinsi Riau yang strategis dan didukung dengan kekayaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan menjadikan posisi perdaganagan Provinsi Riau tumbuh. Dimana pada tahun 2015 ekspor netto Provinsi Riau berada dalam posisi surplus, ekspor netto komoditas migas surplus sebesar Rp 3,259,449.37 ribu yang sebagian besar berasal dari ekspor minyak mentah. Ekspor netto komoditas non migas juga surplus sebesar Rp 9,771,293.15 ribu, dimana sebagian besar ekspor non migas ini dari industri kelapa sawit, kelapa dan karet. Sedangkan Ekspor netto hasil tambang dan hasil lainnya relatif defisit.

Tabel 2. 13. Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2011 – 2015 Provinsi Riau

No	Komoditas	Ekspor		Impor		Ekspor Netto	
		Berat (ton)	Nilai (ribu)	Berat (ton)	Nilai (ribu)	Berat (ton)	Nilai (ribu)
1	Migas	8,083,945.97	3,530,979.82	572,796.05	271,530.45	7,511,149.92	3,259,449.37
	a. Minyak Mentah	7,399,783.28	3268927.79	0.00	0.00	7,399,783.28	3,268,927.79
	b. Hasil Minyak	684,162.69	262052.03	572,796.05	271530.45	111,366.64	-9,478.42
	c. Gas Alam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Non Migas	19,538,957.05	10,840,754.12	2,138,411.28	1,069,460.97	17,400,545.77	9,771,293.15
	a. Hasil Pertanian	287,093.46	30376.55	40,929.05	26,580.02	246,164.41	3,796.53
	b. Hasil Industri	19,132,801.68	10804373.91	1,902,444.32	1,028,896.77	17,230,357.36	9,775,477.14
	c. Hasil Tambang	119,061.91	6,003.66	195,035.39	13,979.77	-75,973.48	-7,976.11
	d. Lainnya	0.00	0.00	2.52	4.41	-2.52	-4.41
	Total Tahun 2015	27,622,903.02	14,371,733.94	2,711,207.33	1,340,991.42	24,911,695.69	13,030,742.52
	2014		17.261.858,75		1,716,762.64		15.545.096,10
	2013		17,557,157.09		1,972,524.97		15,584,632.12
	2012		19,144,904.70		2,261,998.50		16,882,906.20
	2011		20,139,981.40		2,039,386.70		18,100,594.70
	2010		14,891,323.60		1,118,575.70		13,772,747.90

Sumber: BPS Provinsi Riau
Keterangan : (nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor)

Nilai ekspor Riau menurut negara asal pada tahun 2015 yang terbesar dari negara negara di Asia dengan nilai Rp 9,827,273.49 sedangkan upaya mempertahankan impor yang relatif kecil dapat diupayakan dengan dengan memperbesar produk lokal dan menanamkan cinta produksi dalam negeri. Seiring dengan peningkatan nilai ekspor dan ekspor netto, konstribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Riau memiliki trend menaik yaitu dari 7,65% pada tahun 2011 menjadi 8,65% pada tahun 2015.

2.3.2.9 Industri

Berdasarkan klasifikasi industri yang terbanyak adalah pada kelompok industri makanan (Kode 10 KBLI 2009) yaitu sebanyak 152 perusahaan diikuti kelompok industri karet, barang dari karet dan barang dari plastik (Kode 22 KBLI 2009) sebanyak 15 perusahan, klasifikasi industri yang terkecil terdapat di Provinsi Riau adalah industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia (Kode KBLI 20).

Untuk industri besar sedang (IBS) pada Provinsi Riau terdapat terdapat sebanyak 217 industri yang terdiri dari 11 jenis industri (Gambar 2.11). IBS mampu menyerap tenaga kerja total sebanyak 61.468 orang, dengan penyerapan tenaga kerja terbesar adalah industri makanan sebanyak 43.395 orang, dan industri kertas dan barang dari kertas sebanyak 12.403 orang. Sementara industri dengan serapan tenaga kerja paling kecil adalah industri logam dasar yaitu sebanyak 45 orang. Untuk pertumbuhan industri Provinsi Riau tahun jika dilihat dari peningkatan jumlah perusahaan besar dan sedang yang ada di Provinsi Riau setiap tahunnya. Pertumbuhan pada tahun 2005 adalah sebesar 0%, selanjutnya cenderung meningkat menjadi 24,54% pada tahun 2010. Tahun 2007 hingga 2010, pertumbuhan industri Provinsi Riau mengalami penurunan menjadi -4,19% dan meningkat kembali menjadi 12,02% pada tahun 2011. Pertumbuhan industri Provinsi Riau kembali mengalami penurunan menjadi -1,46% pada tahun 2012.

Permasalahan yang dihadapi daerah saat ini adalah belum diterapkannya perencanaan perekonomian daerah yang menjadi komitmen bersama di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Upaya meningkatkan kontribusi sektor industri dalam pembentukan PDRB Riau dapat dilakukan apabila ada jaminan pasokan bahan baku dengan berbagai jenisnya, jumlah produksi dan harga stabil untuk sektor primer yang akan diolah. Dalam hal ini diperlukan mobilisasi pada pelaku usaha sektor primer (petani, nelayan, peternak) agar menjamin kelangsungan produksi di sektor industri.

Gambar 2. 11. Jumlah Tenaga Kerja Industri Provinsi Riau

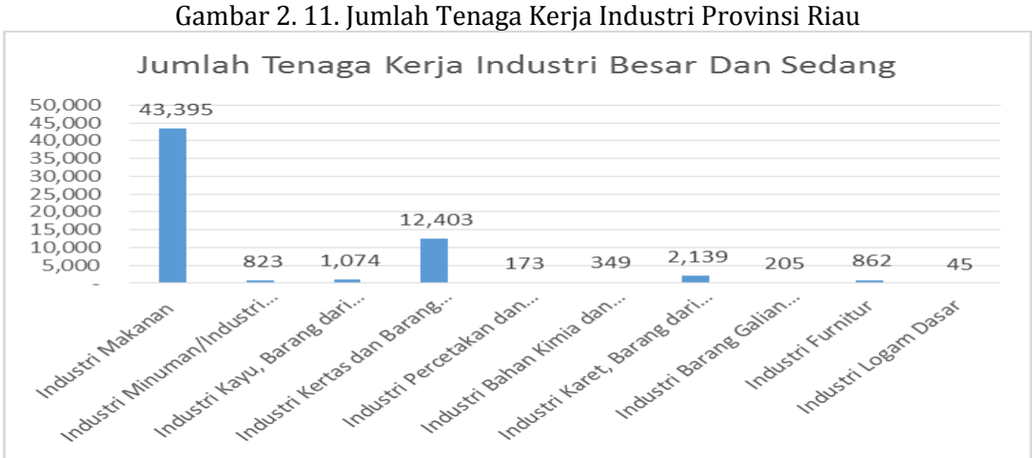

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun, 2016)

2.3.2.10 Transmigrasi

Transmigrasi adalah salah satu Program nasional untuk pemerataan jumlah penduduk tertuma di daerah jawa dengan melakukan perpindahan ke daerah-daerah yang jarang penduduknya. Untuk Provinsi Riau Pada tahun 2013 terdapat 30 KK yang melakukan transmigrasi dengan 115 jiwa anggota.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Secara absolut perekonomian makro Provinsi Riau terus meningkat selama periode 2005-2015. Namun pertumbuhan ekonomi Riau cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi Riau sebesar 5,41 persen dan sebesar 0,22 persen pada tahun 2015. Selama periode 2005-2011, pertumbuhan ekonomi Riau relatif stabil. Namun sejak tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi Riau terus menurun dari 5,57 persen pada tahun 2011 hingga mencapai 0,22 persen pada tahun 2015. Anjloknya pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh penurunan harga minyak bumi dunia, dimana kontibusi sektor pertambangan terhadap PDBR harga berlaku Riau hampir mencapai 40 persen pada tahun 2014 dan hampir 34 persen ada pada golongan pertambangan minyak bumi *(petroleum).* Penurunan pertumbuhan ekonomi Riau juga disebabkan oleh penurunan harga-harga pada komoditas minyak kelapa sawit (CPO) dunia, dimana sektor perkebunan Riau menyumbang 12,17 persen terhadap PDRB harga berlaku 2014 dan sektor industri pengolahan pada golongan industri makanan dan minuman yang didominasi oleh industri minyak sawit menyumbang sebesar 15,26 persen terhadap PDRB harga berlaku 2014. Kemampuan ekonomi Riau sangat tergantung pada 3 (tiga) golongan industri yang memberikan kontribusi lebih 60 persen terhadap PDRB Riau, yaitu minyak bumi *(petroleum)*, perkebunan kelapa sawit, dan industri pengolahan minyak sawit.

Pada sisi pengeluaran, PDRB Riau dibentuk oleh 3 (tiga) komponen utama, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga (PK-RT), pembentukan modal tetap brotu (PMTB), dan ekspor luar negeri barang dan jasa. Sumber pertumbuhan ekonomi pada PDRB sisi pengeluaran adalah konsumsi pengeluaran rumah tangga, diikuti oleh ekspor luar negeri, sementara konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan yang negatif.

Sedangkan dari segi produktivitas total Provinsi Riau mengalami berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2005 produktivitas total Provinsi Riau sebesar Rp 36.60 per jiwa (angkatan kerja), meningkat menjadi Rp 41.48 per jiwa pada tahun 2014. Produktivitas tertinggi masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Produktivitas sektor ini meningkat dari Rp 20.27 juta per jiwa pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp 20.74 juta per jiwa.

Nilai Tukar Petani (NTP) di Riau pada tahun 2014 sebesar 95,03 persen dan mengalami penurunan lebih dari 2 persen dari tahun 2013 (97,14). Nilai tukar petani Riau berada pada posisi terendah di antara provinsi di Pulau Sumatera, walaupun Riau memiliki nilai PDRB terbesar di Pulau Sumatera. Artinya kesejahteraan petani di Riau paling rendah dibandingkan dengan petani di provinsi lain di Sumatera. Jika dibandingkan antar sub sektor pada tahun 2015, dapat dilihat bahwa NTP sub sektor perikanan (106,03) lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Sedangkan NTP paling rendah adalah sub sektor tanaman perkebunan rakyat (91,17). Secara umum berdasarkan data NTP, bahwa petani perikanan, petani tanaman pangan, dan petani peternakan lebih sejahtera dan besaran yang diterima petani mampu menutupi konsumsi rumah tangga dan biaya produksi. Sedangkan petani perkebunan rakyat dan petani hortikultura tidak mampu membayar pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan pengeluaran biaya produksi dari besaran penerimaan.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Persaingan perekonomian global diproyeksikan semakian ketat setelah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Provinsi Riau sebagai Provinsi yang multifungsi yang secara langsung berbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Malasyia dan Singapura dan memiliki lokasi yang strategis di jalur perdagangan Internasional membutuhkan infrastruktur yang memadai guna menghadapi persaingan global agar dapat

memberikan pelayanan optimal kepada seluruh warga dalam mewujudkan Provinsi Riau yang berdaya saing global kedepannya.

Kelancaran transportasi angkutan barang dan penumpang merupakan salah satu indikator dari daya saing daerah di bidang infrastruktur. Dimana jumlah keberangkatan sarana transportasi serta jumlah penumpang dan barang pada suatu pelabuhan udara bisa menjadi ukurannya. Jumlah keberangkatan pesawat, penumpang, barang, dan pos menurut pelabuhan udara dapat dilihat pada Tabel 2.14

Tabel 2. 14. Jumlah Keberangkatan Pesawat, Penumpang, Barang dan Pos menurut Pelabuhan Udara Tahun 2015

Bandara	Pesawat		Penumpang			Barang (ton)		Pos (ton)	
	Datang	Berangkat	Datang	Berangkat	Transit	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru	8.629	8.613	1.542.567	1.260.210	1.755	7.325,6	1.757,96	94,18	120,4
Pinang Kampai Dumai	540	540	20.762	21.476	89	8,12	1,33		
Japura Rengat	399	398	20	20	15	-	-	-	-
Sultan Syarif Harun Setia Negara Pelalawan	566	648	3.776	3.561	-	-	-	-	-
Tempuling Tembilahan	27	37	167	286	-	-	1,36	-	-
Pasir Pengaraian	15	15	1	14	-		-	-	-
Jumlah	10.276	10.251	1.567.293	1.285.567	1.859	7.333,78	1.760,65	94,18	120,4

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Riau (Riau Dalam Angka 2016)

Infrastruktur energi juga dibutuhkan untuk aktivitas produksi yang ada di Provinsi Riau. Dengan ketersediaan energi yang mencukupi didukung dengan efisiensi dalam penggunaanya akan mendorong tingkat produktivitas daerah yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan kemampuan daya saing. Salah satu infrastruktur energi yang krusial bagi Provinsi Riau adalah infrastruktur listrik.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi yang baik akan dapat mendorong meningkatkan investasi dalam suatu daerah. Iklim investasi dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu: 1) faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi yang mempengaruhi iklim inevstasi adalah ketersediaan tenaga kerja, tingkat inflasi, suku bunga dan veraibel ekonomi makro lainnya. Sementara itu faktor non ekonomi dipengaruhi oleh kemudahan dalam perizinan, regulasi dalam investasi, kondisi keamanan dan ketertiban yang ditunjukkan dengan angka kriminalitias serta kondisi perpolitikan suatu daerah dianataranya aksi unjuk rasa yang terjadi.

Jumlah angkatan kerja selama periode 2011 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan. Jika pada tahun 2011 jumlah angkatan kerja hanya 2.560.402 juta, pada tahun 2015 mencapai 2.771.349 juta. Selain jumlah angkatan kerja, faktor penentu investasi adalah kebijakan penentuan upah minimum provinsi (UMP) untuk pekerja. UMP di Provinsi Riau terus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan iklim investasi agar menjadi lebih kondusif. Nilai UMP Riau tahun 2011 mencapai Rp 1.120.000 per pekerja perbulan. Sementara UMP 2015 menjadi sebesar Rp 1.878.000 per pekerja per bulan.

Dalam hal untuk mempermudah proses perizinan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki iklim investasi, Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan perbaikan dalam pelayanan dengan melakukan pelayanan perizinan satu pintu. Berdasarkan Indeks Kepuasan Pelanggan, diperoleh hasil kategori nilai Baik. Hasil ini perlu ditingkatkan lagi dengan memperbaiki pelayanan sehingga dapat memperoleh nilai sangat baik, sehingga dapat mendorong meningkatnya laju investasi.

Sementara itu angka kriminalitas sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi iklim investasi secara keseluruhan di Provinsi Riau relatif kecil. Hal ini menyebabkan suasananya

relatif aman. Tindak kriminal yang paling banyak terjadi adalah pencurian dan penipuan. Sedangkan tindak kriminal yang lainnya dengan frekuensi yang relatif kecil.

Tabel 2. 15. Angka Kriminalitas

No.	Jenis Kriminal	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Kasus Narkoba	1.195	1.133	532	642	823	880	831	1.075
2.	Kasus Pembunuhan	154	82	36	29	33	37	28	28
3.	Kejahatan Sosial	252	489	214	111	128	-	-	-
4.	Kasus Penganiayaan	1.316	1.682	1.238	1.189	1.045	-	-	-
5.	Kasus Pencurian	4.620	3.468	4.064	3.348	3.626	3.813	4.187	3.860
6.	Kasus Penipuan	1.087	1.350	626	413	381	444	435	128
7.	Jumlah Penduduk	5.070.952	5.306.533	5.538.367	5.726.241	5.879.109	6.033.268	6.188.442	6.344.402
8.	Angka Kriminalitas	0,0017	0,0015	0,0012	0,0010	0,0010	0,0009	0,0009	0,0008

Sumber : Biro Operasi Polda Riau

Selama tahun 2008 hingga 2015, angka kriminalitas di Provinsi Riau menunjukkan kecenderungan menurun. Dilihat dari rasio antara angka kriminalitas dengan jumlah penduduk selama kurun waktu yang sama juga menunjukkan penurunan rata-rata per tahunnya sebesar 7,84%. Meskipun kasus-kasus kriminalitas di Riau jumlahnya relatif kecil dan umumnya dapat ditangani, namun upaya pencegahan harus terus mendapat perhatian sehingga iklim investasi Provinsi Riau dapat terus meningkat.

Demonstrasi juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat investasi di Riau. Sepanjang tahun 2013 jumlah demontrasi di Provinsi Riau sebanyak 162 demontrasi. Penyebab demontrasi dengan frekuensi terbanyak adalah masalah tenaga kerja yaitu sebanyak 53 demontrasi diikuti masalah lahan sebanyak 34 demontrasi, terkait politik dan hukum 23 demontrasi, masalah pemerintah daerah dan pusat 21 demontrasi dan masalah pendidikan 2 demontrasi, serta masalah lainnya 29 demontrasi. Dengan frekuensi yang relatif kecil, pelaksanaan demontrasi umum dilakukan dengan damai.

Kondisi kecenderungan angka krimilitas di atas berkorelasi negatif dengan peningkatan investasi masuk di Provinsi Riau. Artinya penurunan angka kriminalitas berdampak pada meningkatnya jumlah investasi baik PMDN maupun PMA. Jumlah invesasi masuk PMDN dari Rp. 7.462,59 milyar tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 9.943,04 milyar tahun 2015. Hal yang sama juga terjadi pada PMA dari 212,34 juta US$ tahun 2011 meningkat menjadi 6.53,39 US$ pada tahun 2015.

2.4.4 Fokus Sumberdaya Manusia

Selama periode 2005 hingga 2014, kualitas tenaga kerja di Provinsi Riau yang ditunjukkan dari lulusan S1/S2/S3 semakin meningkat. Pada tahun 2005, rasio lulusan S1/S2/S3 sebesar 174.06 dari total penduduk. Rasio ini terus meningkat, dimana pada tahun 2014 sebesar 472.97 dari jumlah penduduk.

Meskipun secara kuantitas angka tenaga kerja di Provinsi Riau (lulusan S1/S2/S3) cenderung meningkat namun tingkat kesiapakaian ketenagakerjaan tersebut masih rendah. Hal itu ditandai oleh banyaknya lowongan-lowongan yang tidak terisi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Di lain pihak, jumlah tenaga kerja yang tersedia terus bertambah dari tahun ke tahun dari lulusan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Riau dan yang datang dari luar Provinsi Riau.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Permasalahan pembangunan adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional.

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.

3.1.1.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Perekonomian Riau masih tergantung dengan sektor migas yang cenderung menurun akibat penurunan produksi minyak di Riau. Tingkat kemiskinan masih cukup tinggi dan gap kemiskinan antar wilayah perdesaan dan perkotaan semakin tinggi. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) dipedesaan meningkat dari 1,501 (September 2014) menjadi 1,847 (September 2015) dan di perkotaan dari 0,728 menjadi 0,834. Indeks keparahan kemiskinan (P2) dipedesaan 0,403 (September 2014) menjadi 0,599 (September 2015) dan di perkotaan yaitu 0,110 menjadi 0,206. Kondisi ini disebabkan oleh ketergantungan ekonomi Riau terhadap migas yang cenderung menurun (2005: 55,38% dan 2014: 41,58%). Disisi lain perekonomian non migas belum menunjukkan perkembangan yang baik, dan bahkan nilai absolut PDRB sektor pertambangan masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai absolut PDRB dari keseluruhan sektor non pertambangan lainnya. Lambatnya perkembangan perekonomian diluar minyak dan gas mengakibatkan terjadinya permasalahan ketimpangan pendapatan antar penduduk (Gini Ratio 0,37 tahun 2015) dan ketimpangan pembangunan antar wilayah (Indeks Williamson 0,52 pada 2015). Pertumbuhan ekonomi yang menurun, ketimpangan pembanguan antar wilayah, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (3,58% Sensus Penduduk 2010) ikut serta memicu peningkatan angka kemiskinan dan berdampak terhadap peningkatan angka tindak kejahatan, dan menurunkan minat investasi. Aspek ketergantungan perekonomian pada sector migas, kurang berkembangnya perekonomian diluar migas khususnya perekonomian yang berbasis masyarakat dan tingginya pertumbuhan penduduk semakin memperburuk kondisi perekonomian jangka panjang di Provinsi Riau.

3.1.1.2 Kesejahteraan Sosial

Walaupun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Riau sudah cukup baik (70,84 tahun 2015), namun masih belum mencapai tingkat IPM ideal pada tingkat 80. Secara mikro permasalahan kesejahteraan sosial masih ditandai oleh capaian pendidikan yang masih belum mencapai tingkat pendidikan 9 tahun (rata-rata lama sekolah baru mencapai 8,49 tahun pada tahun 2015), partisipasi sekolah masih

rendah pada tingkat pendidikan menengah dan tinggi (APK untuk jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di bawah 80% dan untuk APM di bawah 70%). Akses wilayah yang terbatas pada pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan, pemerataan ketersediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan antar wilayah kabupaten/kota yang belum merata, dan ketersediaan tenaga pendidikan dan kesehatan yang masih belum merata antar wilayah kabupaten/kota telah menjadi pemicu terhadap kualitas kesejahteraan sosial penduduk. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Riau masih di atas 4%, lebih tinggi dari nasional dan termasuk kelompok tinggi di Sumatera. Kualitas pelayanan kesehatan yang belum merata ditunjukkan oleh AKI dan AKABA yang belum mencapai target MDGs. Dengan demikian, dalam jangka panjang kondisi ini akan mengakibatkan kualitas pembangunan manusia menurun yang mengakibatkan pembangunan berkelanjutan tidak tercapai.

3.1.1.3 Seni, Budaya dan Olahraga

A. Seni budaya

Pembangunan budaya dan pembentukan karakter sumber daya manusia yang berbudaya masih belum didukung sepenuhnya dari elemen-elemen pembangunan yang ada. Lemahnya sinergisitas pembangunan seni dan budaya menjadi salah satu pemicu terhadap rendahnya pencapaian pembangunan seni dan budaya. Perwujudan Riau sebagai pusat kebudayaan melayu sangat tergantung dengan kemampuan pembangunan seni dan budaya yang ditandai dengan dukungan kelompok seni dan budaya, semakin baiknya partisipasi generasi muda dalam kelompok seni dan budaya, dan terintegrasinya nilai-nilai budaya melayu dalam kehidupan masyarakat. Rendahnya aktivitas dan masih rendahnya partisipasi generasi muda dalam seni dan budaya menjadi permasalahan jangka panjang dalam pembangunan Riau sebagai Pusat Kebudayaan Melayu.

B. Olahraga

Pengembangan keolahragaan di Provinsi Riau masih memerlukan perhatian. Lemahnya sinergi kerjasama antar *stakeholder* untuk menumbuh kembangkan olahraga berprestasi telah mengakibatkan belum berkembangnya klub-klub olahraga di masyarakat yang berorientasi pada prestasi. Jumlah klub olahraga (350 klub olahraga) dan hanya ditopang oleh 38 buah gedung olahraga, sehingga masih diperlukan pembinaan dan pengelolaan klub dan gedung olahraga di Provinsi Riau.

3.1.2 Pelayanan Umum.

3.1.2.1 Urusan Wajib

A. Pendidikan

Pelayanan pendidikan dasar masih menjadi permasalahan pembangunan di Riau dalam jangka panjang. Hal ini dapat dilihat dari capaian wajib belajar 12 tahun belum terwujud. Capaian APS SMA/SKM/MA pada tahun 2013 baru sebesar 69,79%. Hal itu jauh sekali dari APS tingkat SLTP yang sudah mencapai 92% pada priode yang sama. Sedang pada tahun 2015 terjadi peningkatan APS SMA/SKM/MA menjadi 75.57% dimana APS tingkat SLTP mencapai 94.48%. Dalam jangka panjang kualitas sumber daya manusia akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah karena rendahnya APS SMA/SMK/MA

menyulitkan untuk melangkah kepada pendidikan yang berkualitas dengan kemampuan tinggi.

B. Kesehatan

Pelayanan kesehatan masih menjadi permasalahan pembangunan kesehatan di Provinsi Riau dalam jangka panjang. Cakupan puskesmas, pustu, puskesmas keliling per desa/kelurahan di Provinsi Riau hanya 0,58 yang berarti setiap 1 desa/kelurahan hanya dilayani oleh 0,58 unit puskesmas, Pustu, Puskesmas Keliling disamping kualitas sarana dan prasarana yang masih dibawah standar. Pemerataan pelayanan kesehatan antar wilayah masih mengalami ketimpangan, meskipun cakupan puskesmas per kecamatan di Provinsi Riau tahun 2014 sudah 1,29, namun di Kabupaten Bengkalis masih 0,73 atau 1 kecamatan oleh 0,73 unit puskesmas. Sebagian besar Kabupaten/kota di Provinsi Riau memiliki Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk tahun 2014 dibawah standar (kecil dari satu). Selain ketidakmerataan fasilitas pelayanan kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan juga masih menjadi permasalahan. Rasio dokter spesialis masih dibawah standar nasional 15 dokter per 100.000 penduduk (Provinsi Riau 13,5 dokter spesialis per 100.000 penduduk). Rasio dokter umum masih dibawah standar nasional 40 dokter per 100.000 penduduk (Provinsi Riau 19,1 dokter umum per 100.000 penduduk). Rasio dokter gigi masih dibawah standar nasional 11 dokter gigi per 100.000 penduduk (Provinsi Riau 5,9 dokter gigi per 100.000 penduduk). Distribusi dokter belum merata lebih terkosentrasi di perkotaan (Rasio di Pekanbaru 0,92) dan kurang di pedesaan (0,09 di Kabupaten Indragiri Hilir dan 0,19 di Kabupaten Rokan Hilir). Masih terbatasnya pelayanan kesehatan dan ketimpangan pelayanan kesehatan telah mengakibatkan angka kesakitan DBD dalam 5 tahun terakhir cenderung meningkat dimana pada tahun 2015 menjadi 51,4 per 100.000 penduduk.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyediaan infrastruktur jalan masih menjadi permasalahan jangka panjang di Provinsi Riau. Kondisi ini ditunjukkan oleh stagnannya panjang jalan negara, provinsi dan kabupaten. Panjang jalan Provinsi Riau pada tahun 2015 2.792,36 Km. Jalan negara dan provinsi yang dengan perkerasan tanah pada tahun 2014 masih sepanjang 818,79 Km. Jalan negara dan provinsi dengan kondisi rusak dan sangat rusak pada tahun 2014 hampir sepertiga bagian panjang jalan yaitu sepanjang 1.262,66 Km. Jembatan dengan kontruksi kayu hingga tahun 2014 masih sepanjang 1.020 meter. Laju kerusakan jalan dan jembatan yang tinggi dengan umur ekonomis yang lebih pendek sebagai akibat beban kendaraan yang tinggi dibanding kapasitas jalan dan jembatan. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang demikian akan menghambat terhadap arus distribusi dan mobilitas barang dan orang yang berdampak terhadap perkembangan ekonomi dan pelayanan publik di Provinsi Riau dimasa yang akan datang.

Sampai tahun 2015 Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRWP) belum ditetapkan sehingga mengganggu terhadap perencanaan pembangunan Riau. Dalam jangka panjang permasalahan RTRW ini akan semakin penting dalam proses pembangunan di Riau, khususnya yang berkaitan dengan penentuan struktur ruang dan fungsi Riau. Dengan kata lain belum optimalnya rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pembangunan didaerah akan menjadi permasalahan pembangunan jangka panjang di Riau. Hal ini berdampak pada belum optimalnya perwujudan Nilai Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang.

Menurunnya ketersediaan ruang untuk ketahanan pangan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan belum optimalnya perwujudan ruang investasi di kawasan metropolitan dan pusat-pusat pertumbuhan di Riau.

D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penyediaan perumahan bagi penduduk di Provinsi Riau masih perlu menjadi perhatian dimasa mendatang. Kondisi saat ini digambarkan bahwa masih terdapat sekitar 13,05% rumah tangga di Provinsi Riau dengan status kepemilikan rumah kontrak/sewa. Rumah tangga dengan luas hunian per kapita <= 7,2 M2 masih sekitar 9,66%, atau luasan ini masih terkategori luas lantai rumah dengan kategori miskin. Persentase rumah tangga dengan sanitasi yang kurang layak sebesar 31,49% dan khusus di pedesaan lebih dari 50%. Pembangunan perumahan oleh Perumnas, *developer* dan *real estate* serta koperasi terus menurun dengan rata-rata pertumbuhan pembangunan rumah menurun sebesar -1,62% per tahun.

E. Perencanaan Pembangunan

Kondisi perencanaan pembangunan di Riau pada dasarnya telah terpenuhi, kecuali RTRW yang belum ditetapkan, dan masihterdapat 2 kabupaten yang belum menetapkan RPJPD dalam peraturan daerah yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi. Dokumen perencanaan belum sepenuhnya berbasis Informasi teknologi *(e-planning)*. Perencanaan pembangunan Provinsi Riau dan kabupaten/kota belum menerapkan *one map policy* atau penggunaan data terpadu mengakibatkan pengukuran hasil-hasil pembangunan sering berbeda antar daerah. Selain itu, kurangnya sinkronisasi dokumen perencanaan dengan realisasi dokumen penganggaran (RPJPD–RPJMD-KUA PPAS-APBD) juga menjadi permasalahan dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau.

F. Perhubungan

Ketersediaan infrastruktur perhubungan antar wilayah dan antar provinsi di Riau telah menjadi permasalahan dalam aksesibilitas wilayah dan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Riau. Posisi strategis wilayah Riau di tengah Pulau Sumatera belum dalam dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi Riau. Beberapa kondisi infrastruktur perhubungan di Riau digambarkan belum terealisasinya jalan bebas hambatan dan kereta api untuk mengatasi beban berat dan kemacetan jalan lintas timur. Belum tersedianya terminal peti kemas yang memadai di Pelabuhan Dumai sebagai pintu ekspor/impor utama Provinsi Riau. Belum berfungsi secara baik dan rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C. Masih terbatasnya panjang landasan pacu bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sehingga belum dapat disinggahi pesawat besar. Masih rendahnya kualitas transportasi dan sarana-prasarana transportasi laut khususnya pelabuhan laut rakyat. Maka untuk mendorong pembangunan daerah Riau dimasa mendatang masih memerlukan peningkatan dan optimalisasi infrastruktur perhubungan.

G. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Riau berada pada posisi paling rendah (52,59 tahun 2014) dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera. Beberapa permasalahan lingkungan hidup yang menyebabkan rendahnya IKLH Provinsi Riau adalah : tingginya deforestasi dan degradasi hutan , degradasi lahan gambut, meluasnya wilayah banjir, pencemaran air sungai yang meningkat, kerusakan ekosistem pesisir dan pencemaran air laut, dan keanekaragaman hayati yang semakin terancam. Luas kawasan hutan Provinsi Riau mencapai 5.434.568 ha atau 60,14% dari luas daratan. Namun, 1,5 juta ha diantaranya sudah mengalami kerusakan dan berubah penggunaan menjadi areal pertanian, perkebunan dan permukiman. Selain karena investasi, pertambahan jumlah penduduk yang tinggi karena migrasi masuk akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan permukiman dan usaha perkebunan di masa datang. Hal ini akan memberi tekanan pada kawasan hutan, -termasuk hutan rawa gambut-, semakin besar. Kondisi ini akan menyebabkan ancaman terhadap keanekaragaman hayati sehingga konflik antara satwa dengan manusia semakin meningkat. Pembukaan hutan di daerah hulu dan lahan gambut juga akan memperbesar ancaman banjir karena mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air hujan sehingga meningkatkan *run off* yang masuk ke badan sungai dan dataran rendah. Di sisi lain, industri yang berkembang juga akan meningkatkan pencemaran air dan udara sehingga mengganggu kehidupan masyarakat di masa datang.

H. Pertanahan

Penguasaan lahan dalam konsesi perkebunan dan kehutanan sangat luas (mendekati 40 persen dari total luas daratan Riau) oleh perusahaan besar dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) dan IUPHHK (HPH dan HTI). Pada sisi lain pengakuan kepemilikan lahan masyarakat oleh negara masih lemah baik kepemilikan individu maupun komunal. Pertumbuhan penduduk yang tinggi (3,58% per tahun pada Sensus Penduduk 2010) akan mengakibatkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap lahan. Hal ini dapat memicu tingginya konflik lahan antar masyarakat dengan masyarakat dan antar masyarakat dengan perusahaan di Riau. Dalam jangka panjang permasalahan ini dapat berdampak pada memburuknya iklim usaha dan semakin terbatasnya akses masyakat terhadap lahan untuk kebutuhan usaha, perumahan, dan penggunaan lainnya. Permasalahan ini akan diperburuk dengan belum ditetapkannya RTRW Provinsi Riau.

I. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan kependudukan di Riau yang perlu menjadi perhatian dalam jangka panjang adalah adanya kecenderungan semakin tingginya tingkat pertumbuhan penduduk Riau, terutama pada periode 2009-2010 yaitu sebesar 3.59% (Bappeda, 2010). Pada tahun 2015 terjadi pertambahan jumlah penduduk menjadi 6.344.402 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,52%. Disamping disebabkan oleh meningkatnya jumlah migrasi masuk dan menurunnya angka kematian juga diduga meningkat angka kelahiran akibat lemahnya penanganan Keluarga Berencana. Penduduk Provinsi Riau telah memasuki era Bonus Demografi yang ditandai dengan struktur umur telah memasuki kategori umur intermediet yang ditandai dengan umur penduduk 20-30 tahun. Maknanya sebagian besar penduduk telah memasuki usia kerja. Persebaran penduduk tidak merata. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu kota Provinsi sekaligus pusat perekonomian. Pada tahun 2008 proporsi penduduk yang terdapat di Kota Pekabaru sebesar 16.11% dan meningkat menjadi 16.34% pada tahun 2014.

Letak strategis Riau yang berada di tengah Pulau sumatera telah mengakibatkan arus migrasi masuk sangat tinggi dan arus migrasi penduduk antar daerah kabupaten/kota juga semakin tinggi ke daerah perkotaan. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi, yang ditandai dengan proporsi penduduk kota yang meningkat dari tahun 2009 sebesar 38.66% meningkat menjadi 40.44% pada tahun 2010.

J. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi permasalahan pembangunan jangka panjang di Riau. Berdasarkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terlihat masih terdapat ketimpangan gender yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan terutama dala keterlibatan perempuan di parlemen. Sedangkan UU telah jelas menjelaskan bahwa proporsi perempuan didalam parlemen minimal (30%). Keberdayaan perempuan yang masih rendah digambarkan oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan masih tergolong rendah dan partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah dan politik masih dalam kategori rendah. Relatif masih tingginya tingkat kelahiran, kondisi ini ditandai dengan Tingkat TFR Provinsi Riau diatas TFR Nasional. Pada tahun 1971 tingkat TFR Nasional sebesar 5.61 dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 2.60 pada tahun 2012. Tingkat TFR Provinsi Riau juga mengalami penurunan dari 5.94 pada tahun 1971 terus mengalami tren penurunan hingga mencapai 2.90 pada tahun 2012, Pada tahun 2015 Tingkat TFR Provinsi Riau diperkirakan bergerak pada angka 2.78 sedangkan pada tingkat nasional berada pada 2.37. (Buku Annual Riau 2015). Masih tingginya tingkat ASFR pada tahun 2013 terdapat 31 kelahiran per penduduk perempuan usia 15-19 tahun. Sedangakan bila berdasarkan daerahnya maka terdapat beberapa daerah dengan tingkat ASFR diatas ASFR Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 57, Kabupaten Indragiri Hulu sebesar 50, Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 34, Kabupaten Pelalawan sebesar 52, Kabupaten Siak sebesar 42 dan Kabupaten Kampar sebesar 39. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera masih tergolong besar sebanyak 98,909 KK pada tahun 2013. Rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Terbatasnya media KIE tentang PUP yang bisa diakses remaja. Berkurangnya tenaga KIE lini lapangan. Terbatasnya biaya operasional di lini lapangan.

K. Sosial

Permasalahan kesejahteraan sosial dimasa mendatang akan menjadi penting di Riau karena perkembangan perkotaan. Masih tingginya jumlah penyadang permasalahan kesejahteraan sosial (PMKS) pada tahun 2014 antara lain: (a) Anak terlantar (19.200 orang), (b) Wanita rawan sosial ekonomi (14.097 orang), (c) Lanjut usia terlantar (20.896 orang), (d) Penyandang cacat/disabilitas (11.838 orang), (e) Keluarga fakir miskin (124.291 orang), (f) Komunitas adat terpencil (19.219 orang), (g) Korban bencana alam (83.633 orang), (h) Korban bencana sosial (1.298 orang), dan (i) Keluarga rentan (8.126 orsng). Jumlah PMKS lainnya (13 jenis) dibawah angka seribu orang pada setiap jenisnya. Satu hal diantara ke 13 jenis itu yaitu orang dengan HIV/AIDS (ODHA) masih mengawatirkan keadaannya (390 penderita) karena sifat dari penyakit ini sangat rentan untuk berkembang di tengah-tengah masyarakat.

L. Tenaga Kerja

Permasalahan pertumbuhan penduduk dan migrasi masuk yang tinggi Riau telah menjadi pengungkit terhadap tingginya angka pengganggguran di Riau, dan akan tetap menjadi permasalahan pembangunan dalam jangka panjang. Kecenderungan jumlah penduduk pengangguran di Riau terus meningkat. Pada tahun 2012 terdapat 107.774 jiwa pengangguran dengan tingkat TPT sebesar 4.30% dan terus mengalami peningkatan menjadi 217.053 pada tahun 2015 dengan tingkat TPT sebesar 7,83%. TPAK penduduk laki-laki lebih tinggi dari pada TPAK penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari perkiraan TPAK menurut jenis kelamin Provinsi Riau, yaitu pada tahun 2015 mencapai TPAK penduduk laki-laki mencapai 85.18% dan penduduk perempuan hanya 44.09%. Tingkat partisipasi Angkatan Kerja perempuan lebih rendah dari pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja laki-laki, baik dilihat dari aspek pendidikan, umur, maupun daerah tinggal (desa, kota). Masih terdapatnya sengketa antar perusahaan-pekerja berupa PHK. Pada tahun 2014 terjadi 21 kasus PHK yang dilakukan oleh perusahaan yang mengakibatkan konflik. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja masih menjadi permasalahan, yang dapat dilihat dari pelaksanaan program latihan kerja belum optimal karena keterbatasan dana, sarana dan prasarana (Peralatan di UPT Latihan Kerja) dan pegawai fungsional (Instruktur, Pengantar Kerja, Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator/Perantara, PPNS bidang ketenagakerjaan serta ahli K3). Kualitas tenaga kerja, realtif masih rendah hal ini ditandai dengan pada tahun 2013 terdapat 20,744 jiwa pekerja yang tidak/belum pernah sekolah, 198,660 jiwa pekerja tidak/belum tamat SD, dan 449,422 jiwa pekerja dengan ijazah tertingginya adalah SD. Tingkat persaingan di pasar kerja akan semakin tinggi, dengan globalisasi dan diberlakukannya MEA pada akhir tahun 2015 dengan negara anggota MEA adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja.

M. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Perkembangan koperasi menjadi sangat penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, namun kondisi ini belum terdorong dengan baik. Kondisi perkembangan koperasi di Riau terjadi fluktuasi perkembangan koperasi di Propinsi Riau, pada tahun 2010 mengalami pelambatan pertumbuhan sebesar 0,5% dibandingkan tahun 2009 yang mencapai 4,1%. Kemudian terjadi penurunan tajam pada tahun 2013 sebesar -2,3% setelah peningkatan yang tinggi sebelumnya di tahun 2012 sebesar 7,7%. Namun masih terjadi peningkatan yang rendah di tahun 2014 hanya sebesar 0,3%. Terjadinya tren penurunan perkembangan koperasi aktif di Propinsi Riau dilihat dari tahun 2009 sebesar 7,5% sedangkan tahun 2012 sebesar 5,4% dan apabila dilihat dari tahun 2011 perkembangan mencapai 12,2%. Tidak sebandingnya perkembangan jumlah koperasi dengan perkembangan koperasi yang aktif (Tahun 2012 perkembangan koperasi meningkat 7,7% sedangkan ditahun yang sama jumlah koperasi aktif menurun 5,4%). Dimasa mendatang pembangunan Koperasi menjadi sangat penting untuk mendukung pembangunan perekonomian masyarakat melalui penataan kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat dalam rangka mendorong pembangunan perekonomian daerah untuk menggantikan dominasi sektor migas dalam perekonomian Riau.

N. Penanaman Modal

Penanaman modal baik modal asing dan modal dalam negeri menjadi sangat penting dalam mendukung pembangunan Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian. Permasalahan investasi dalam jangka panjang adalah pendataan realisasi investasi dari persetujuan investasi yang sudah disetujui masih lemah. Hal ini berdampak pada tidak akuratnya data realisasi investasi. Pertambahan jumlah investasi masuk lebih didominasi dari penggantian investasi yang sudah ada.Masih terbatasnya infrastruktur pendukung yang dapat mendorong investasi.

O. Kebudayaan

Pengembangan Budaya Melayu di Provinsi Riau sampai pada tahun 2013 belum memberikan kemajuan yang berarti dalam tatanan pendidikan. Hal itu ditandai oleh masih rendahnya aspirasi dan perlindungan terhadap budaya lokal dan belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aspek budaya. Permasalahan ini perlu diselesaikan dalam jangka panjang untuk menwujudkan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu. Salah satu permasalahan adalah tingginya angka sekolah/madrasah yang belum mengakomodir Budaya Melayu dalam kurikulum pendidikan (3.566 sekolah – 70.75%) dengan kata lain hanya sebesar 29.25% saja sekolah/madrasah yang sudah mengakomodir Budaya Melayu dalam kurikulum pendidikannya. Pembangunan budaya Melayu di riau juga msih dihadapkan dengan permasalahan ketersediaan pusat referensi dan promosi budaya dan pelaksanaan budaya masih terbatas pada event dan kegiatan budaya saja. Pembangunan jangka panjang di Riau seharusnya mendorong pada perwujudan pusat refensi dan promosi budaya Melayu dan perwujudan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat Riau.

P. Kepemudaan dan Olahraga

Meskipun sudah tercatat 46 organisasi kepemudaan dengan berbagai latar belakang pendiriannya dan ruang geraknya di tambah dengan 12 organisasi kemasyarakatan pemuda sampai dengan tahun 2015 di Provinsi Riau, kenyataannya belum dimaksimalkan peranan dan fungsinya oleh organisasi pemuda itu sendiri, masyarakat dan pemerintah Provinsi Riau serta kabupaten/kota. Organisasi pemuda itu sendiri bersinergi secara sendiri-sendiri untuk kepentingan-kepentingan sesaat saja. Meskipun sudah tercatat jumlah organisasi olahraga sebanyak 54 sampai dengan tahun 2014, masih banyak lagi organisasi olahraga yang belum terdata secara cermat apalagi dikaitkan dengan aktifitas atau kegiatan kepemudaan secara formal dan informal.

Q. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kurangnya pendataan (kecil dari 10% yang terdata) dan pembinaan ORMAS, LSM dan OKP. Relatif tingginya konflik lahan di masyarakat (20,99% dari jumlah unjuk rasa. Permasalahan jangka panjang adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga lembaga dan organisasi masyarakat menjadi penting dalam mendukung pembangunan di Riau.

R. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Akuntabilitas pengelolaan pemerintah daerah dan keterbukaan informasi menjadi penting dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam jangka panjang pembangunan pemerintahan menjadi penting untuk mendorong peningkatan indeks keterbukaan informasi publik Pemerintah Daerah Propinsi Riau yang

menurun (Tahun 2008 sebesar 2,30 turun tahun 2013 menjadi 2,13). Belum efesien dan efektifnya birokrasi dan masih lemahnya kapasistas sumberdaya aparatur.

S. Pangan

Akses penduduk terhadap pangan untuk terpenuhinya kebutuhan pangan penduduk merupakan hak asasi manusia. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mendorong peningkatan kebutuhan pangan dan harus diimbangi dengan peningkatan produksi pangan daerah. Ancaman terhadap peningkatan produksi pangan dihadapkan pada terjadi alih fungsi lahan pangan menjadi lahan perkebunan dan pemukiman secara sistematis. Tingkat kerusakan sarana dan prasarana irigasi, khususnya untuk padi sawah, cukup tinggi. Elnino akibat dari *global warming* mengancam ketahanan pangan dari aspek ketersediaan. Masih ditemukan masyarakat yang belum menerapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman.

T. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan desa mandiri dan membangun desa yang memiliki kemampuan membangun desa secara mandiri menjadi penting dimasa mendatang. Tingkat perkembangan desa saat ini di Riau sebagian besar (69,27%) desa merupakan desa dengan tingkat perkembangan desa swadaya dan hanya 1,03% yang merupakan desa swasembada. Keberhasilan pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa (PPD) di 984 desa/kelurahan (53,59%) desa di Provinsi Riau belum dirasakan oleh 852 desa/kelurahan (46,41%).

U. Statistik

Perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan membutuhkan ketersediaan data yang valid dan sahih. Permasalahan jangka panjang adalah penyediaan *one map policy* atau penyediaan data terpadu di Riau sangat diperlukan dalam jangka panjang. Ketersediaan data dan informasi masih belum lengkap untuk menerapkan *good governance* dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Ketersediaan data dan informasi masih cukup sulit untuk diakses oleh masyarakat.

V. Kearsipan

Sampai dengan tahun 2014 baru terdapat 33 SKPD diantara 53 SKPD yang ada yang menerapkan pengelolaan kearsipan secara baku dan didukung oleh tenaga yang fungsional yang minim jumlahnya yakni 27 orang tenaga kearsipan dan 13 orang tenaga arsiparis

W. Komunikasi dan Informatika

Masih ditemukan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pada hal-hal yang negatif. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi secara global juga membawa dampak negatif bagi masyarakat.

X. Perpustakaan

Sampai dengan tahun 2014, perpustakaan Soeman H.S dan perpustakaan daerah jumlah pengunjungnya baru mencapai 451.953 orang dari jumlah penduduk Provinsi Riau (enam juta lebih) (7.28%). Angka tersebut sangat kecil jumlahnya jika dikaitkan dengan sumber-sumber pengetahuan dan informasi yang sangat perlu diketahui oleh masyarakat Riau dalam konteks pencerdasan kehidupan bangsa di masa yang akan datang.

3.1.2.2 Urusan Pilihan

A. Pertanian

Tingginya alih fungsi atau konversi lahan pertanian pangan untuk penggunaan lain, seperti perkebunan dan pemukiman. Terbatasnya pemberdayaan petani dalam mengakses informasi paket teknologi, pemanfaatan potensi pasar dan permbiayaan. Kuantitas dan kualitas penyuluhan pertanian yang masih terbatas dan peranan kelembagaan petani yang semakin menurun. Rendahnya perlindungan terhadap petani produsen pertanian dari aspek pemasaran produksi dan sarana produksi pertanian. Rekomendasi paket teknologi spesifik lokalita masih terbatas dan penerapan teknik budidaya pertanian tidak berpedoman pada rekomendasi teknologi. Dalam jangka panjang kondisi ini mengakibatkan belum optimalnya produktivitas lahan pertanian dan perkebunan. Permasalahan pertanian di Riau juga ditunjukkan oleh masih terbatas penerapan diversifikasi usaha dalam pengelolaan perkebunan dengan usaha peternakan. Semakin luas areal tanaman perkebunan petani swadaya yang rusak dan tua khususnya pada komoditas karet dan kelapa yang merupakan komoditi yang telah diusahakan oleh masyarakat. Produksi yang masih pada tingkat primer memerlukan pembangunan industry pertanian dan mendorong pembanguan agroindustry di Riau. Permasalahan penting lain dalam pembangunan pertanian adalah terbatasnya infrastruktur prasarana jalan dan pengairan (irigasi dan drainase) ke sentra produksi pertanian. Pengelolaan daerah aliran sungai masih sangat terbatas dan rusaknya *Cachtment area* sebagai pelindung sumber daya air. Terbatas minat pemuda mengelola usaha pertanian dan semakin terbatasnya ketersediaan lahan pertanian yang dapat dimiliki petani. Belum optimal pengelolaan usaha pertanian untuk memanfaatkan potensi pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen.

B. Kehutanan

Upaya rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang dilakukan pemerintah masih rendah (kurang dari 10% dari luas kerusakan hutan) dan belum memenuhi standar yang ditetapkan. Meskipun cenderung semakin menurun setiap tahunnya, namun kerusakan kawasan hutan di Provinsi Riau masih sangat tinggi (lebih dari 1 juta Ha). Peningkatan luas kerusakan hutan ini disebabkan sering terjadinya kebakaran hutan dan perambahan hutan. Kontribusi rata-rata sektor kehutanan terhadap PDRB Provinsi Riau relatif masih rendah (sekitar 5% dengan migas). Permasalahan jangka panjang dalam pembangunan kehutanan di Riau dalah penataan tata ruang wilayah dan pengelolaan kawasan kehutanan.

C. Energi dan Sumberdaya Mineral

Provinsi Riau memiliki potensi pertambangan yang besar, seperti minyak bumi, gas bumi, batubara, bitumin dan gambut; hanya bitumin yang terdapat di Kabupaten Kuansing yang belum dioptimalkan penambangannya. Provinsi Riau juga memiliki potensi penambangan lainnya seperti emas, pasir dan kerikil. Namun penambangan material tersebut di beberapa kabupaten banyak dilakukan tanpa izin, seperti yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singigi dan dan Kabupaten Indragiri Hulu. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB masih lebih dari 40% yang didominasi sektor migas (kontribusi rata-rata sektor non migas hanya sekitar 2%), namun cenderung menurun dari tahun ke tahun.

D. Pariwisata

Pada tahun 2015, wisatawan manca Negara yang berkunjung ke Provinsi Riau sebanyak 52.971 jiwa. Untuk 3 tahun terakhir 2013 sampai dengan 2015 mengalami kenaikan kunjungan wisatawan ke Provinsi Riau kenaikannya ialah dari angka 49.537 orang tahun 2013 turun menjadi 47.934 orang pada tahun 2014 dan naik menjadi 52.971 orang pada tahun 2015. Dengan rata-rata kenaikan 3,2% per tahun

E. Kelautan dan Perikanan

Meski produksi ikan khususnya perikanan budidaya meningkat dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,39% per tahun namun pertumbuhan produksi perikanan laut dan perairan umum menurun (-3,08% per tahun dan-0,60% per tahun) sehingga target produksi untuk kecukupan konsumsi penduduk Provinsi Riau (87,3 gram/kap/hari) tahun 2006–2014 masih dibawah 100%. Penurunan produksi perikanan laut Provinsi Riau (99.188 ton tahun 2006 menjadi 211.341 ton tahun 2014) selain karena berkurangnya wilayah laut Provinsi Riau (pemekaran dengan Provinsi Kepulauan Riau) juga karena *over fishing* dan kerusakan ekosistem. Untuk kondisi akhir 2015 produksi perikanan laut Provinsi Riau sebesar 209.691 ton. Belum optimal diberdayakannya potensi sumberdaya perairan untuk pengembangan budaya perikanan untuk pencapaian swasembada ikan di Provinsi Riau

F. Perdagangan

Terjadinya surplus nilai ekspor netto (ADHB-DM) sebesar Rp. 13.772.747,9 pada tahun 2010 dan selama periode tahun 2010-2014 terus terjadi surplus dimana nilai ekspor netto Provinsi Riau berjumlah Rp 20.148.402,49. Perkembangan ekspor Riau dari tahun 2006-2014 cukup baik dengan kondisi akhir pada tahun 2015 sebesar Rp. 14.371.733,9. Yaitu dari US $ 8.694,71 juta pada tahun 2006 menjadi US $21.865,17 juta pada tahun 2014. Dibanding tahun 2013 nilai eksportahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 24,54%. Untuk Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) pada tahun 2014 sebesar 8.48% menurut tajam pada kondisi tahun 2015 sebesar 4.64% (Kondisi Triwulan III).

G. Industri

Kontribusi rata-rata sektor industri terhadap PDRB Provinsi Riau relatif stabil dari tahun ke tahun, namun masih rendah (yaitu sekitar 11%, termasuk mingas). Hal ini disebabkan masih kurang optimalnya faktor-faktor peningkatan investasi

yang terintegrasi, seperti teknologi, peralatan, infrastruktur, dan sumberdaya manusia. Pemerintah sudah menetapkan Provinsi Riau sebagai sebagai klaster pengembangan industri hilir kelapa sawit. Sasaran jangka panjang (2025) yang ingin dicapai adalah (1) memperluas pengembangan produk akhir, (2) terbentuknya centre of excellent industri oleokimia, (3) penguasaan pasar, (4) pemantapan industri berwawasan lingkungan, dan (5) terintegrasinya industri turunan kelapa sawit di Riau. Disamping itu, Provinsi Riau juga sudah ditetapkan sebagai wilayah pengembangan industri pengolahan kelapa (2013). Namun pengembangan yang sudah dilakukan belum menunjukkan ke arah sasaran tersebut secara optimal. Kelompok pengrajin yang ada di Provinsi Riau cukup beragam, seperti pengrajin kain tenun, pengrajin limbah plastik, pengrajin batu akik, pengrajin pandai besi dan sebagainya. Permasalahan utama untuk jangka panjang yang dihadapi adalah kekurangan akses permodalan usaha dan pemasaran serta penentuan kawasan industry sebagai prioritas pembangunan Riau.

3.1.3 Daya Saing Daerah.

3.1.3.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Peningkatan daya saing daerah menjadi hal penting dalam pembangunan daerah Riau. Ketidakseimbangan pembangunan ekonomi antarwilayah telah mengakibatkan terjadi ketimpangan pengeluaran per kapita antara kota dan desa dengan selisih 33%. Produktivitas daerah lebih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian. Terjadinya penurunan nilai tukar petani dua tahun terakhir dengan NTP kecil dari 100 kecuali sub sektor perikanan. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan perekonomian Riau mengalami ketimpangan antarsektor dan antarwilayah, yang memerlukan penangan dimasa mendatang.

3.1.3.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Daya saing daerah akan ditunjukkan oleh ketersediaan infrastruktur berkualitas. Infrastruktur perhubungan, energi dan ketersediaan air bersih/air minum yang masih rendah yang ditunjukkan dari rendah persentase ledeng diperkotaan (0,62%) dan di pedesaan (0,48%) serta pelanggan industri yang hanya sebanyak 51 industri. Masih rendahnya produksi energi listrik PLN yaitu sebesar 15,67% dari total energi listrik PLN yang disuplai, sehingga ketergantungan terhadap dari sistem interkoneksi Sumatera Barat-Riau. Lebih rendahnya suplai energi listrik yang disediakan oleh PLN dibanding demand rumah tangga dan industri sehingga voltase menjadi tidak stabil dan pemadaman bergilir serta tingginya penggunaan listrik non PLN.

3.1.3.3 Iklim Investasi

Regulasi dan Birokrasi pemerintah yang masih yang masih berpotensi menjadi penyebab ekonomi biaya tinggi dan menjadi permasalahan jangka panjang dalam mendorong peningkatan investasi masuk di Riau. Keterbatasan infrastruktur pendukung yang dapat mendorong lajunya investasi masuk. Masih lemahnya koordinasi antar lembaga dalam penanaman modal. Terjadi Kriminalitas tertinggi yaitu kasus pencurian sebesar 4.187 pada tahun 2014.

3.1.3.4 Sumberdaya Manusia

Pada tahun 2014, rasio ketergantungan penduduk usia tidak produkti kepada penduduk usia produktif adalah sebesar 51.96%. Rasio tersebut menggambarkan beban tanggungan setiap 100 orang penduduk produktif terhadap yang tidak produktif dengan kata lain keadaan tersebut menimbulkan kesulitan bagi kelompok produktif untuk melepaskan diri terhadap kelompok yang tidak produktif. Pada tahun 2014, rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Riau baru mencapai 4,73.97. Hal tiu masih dirasakan kecil jumlahnya sebagai pertanda kelompok intelektual yang ada ditengah-tengah masyarakat di Provinsi Riau secara luas.

3.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah suatu kondisi yang dampaknya signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa depan. Suatu kondisi/ kejadian penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan maka menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan ilmiah (teknokratik) melalui pengumpulan dan analisis informasi, termasuk analisis kebijakan terhadap entitas pemerintahan diatasnya. Isu yang terkait kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Riau dapat diidentifikasi pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Isu Strategis

Aspek Pembangunan	Fokus	Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Riau	
Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi	**Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi**	1.	Pertumbuhan ekonomi Riau melambat dan masih sangat tergantung pada Sektor Migas yang menunjukkan kecendrungan terus menurun
		2.	Disparitas Pembangunan antarkelompok masyarakat dan antarwilayah di Provinsi Riau masih mengalami ketimpangan
		3.	Tingkat kemiskinan di Riau masih tinggi dengan tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan yang semakin memburuk
	Kesejahteraan Sosial	4.	Tingkat pendidikan Masyarakat Riau masih rendah
		5.	Tingkat penganguran terbuka di Provinsi Riau masih tinggi dibanding nasional dan sumatera
		6.	Tingkat kesehatan dan kesadaran hidup sehat masyarakat Riau masih rendah
	Fokus Seni, Budaya dan Olahraga	7.	Upaya pelestarian seni dan budaya di Riau masih lemah dan ditangani secara sistemis
		8.	Pergeseran nilai-nilai budaya yang secara terus-menerus berlangsung dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Riau
Aspek Pelayanan Umum [Urusan Wajib]	**Pendidikan**	9.	Kualitas pelayanan pendidikan masih belum optimal yang ditandai dengan masih rendahnya rasio guru terhadap murid and ruang kelas serta disparitas kuantitas dan kualitas guru antar wilayah.

Aspek Pembangunan	Fokus	Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Riau	
	Kesehatan	10.	Kuantitas dan kualitas, serta distribusi tenaga medis dan para medis masih kurang
		11.	Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan di Rumah sakit pemerintah, puskesmas, pustu dan pusling masih kurang
		12.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan dan gizi terutama bagi penduduk miskin
		13.	Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular (PTM) dan penyehatan lingkungan masih belum memadai
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.	Sebagian besar jalan provinsi masih dalam kondisi buruk (62%)
		15.	Disparitas ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan antar wilayah dan antara pedesaan dan perkotaan di Provinsi Riau masih besar
		16.	Infrastruktur dengan sistem angkutan masal khususnya jalan tol dan kereta api yang terkoneksi dengan pemadu antar moda belum ada
		17.	Pengelolaan DAS dan wilayah sungai yang merupakan konsentrasi penduduk belum terintegrasi menyebabkan ketertinggalan pembangunan sarana dan prasarana publik
		18.	Sistem pusat-pusat pertumbuhan yang belum berkembang secara hirarkis serta kesenjangan penyediaan prasarana dan sarana wilayah termasuk RTH
		19.	Belum efektifnya pranata bidang penataan ruang khususnya RTRW
	Perumahan dan Kawasan Permukiman	20.	Meningkatnya kebutuhan perumahan yang layak akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi
		21.	Terbatasnya pelayanan air bersih perkotaan dan wilayah pesisir
	Perencanaan Pembangunan	22.	Data pembangunan di Provinsi Riau belum tersusun dengan baik
		23.	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antar kabupaten Kota dan dengan pemerintah pusat masih rendah
	Perhubungan	24.	Sarana, prasarana dan pelayanan transportasi darat, laut, sungai dan udara serta terminal dan pemadu antar moda masih perlu ditingkatkan
		25.	Untuk menunjang perekonomian daerah, provinsi Riau perlu membangun bandar udara baru mengantisipasi jenuhnya bandar udara SSK serta mengembangkan bandar udara lokal lainnya
		26.	Dukungan prasarana dan pelayanan terminal transportasi darat, laut maupun udara sebagai pemadu moda transportasi pada pusat-pusat kegiatan belum memadai

Aspek Pembangunan	Fokus	Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Riau	
	Lingkungan Hidup	27.	Perubahan tutupan hutan alam (Deforestasi) yang luas oleh hutan tanaman dan perkebunan monokultur
		28.	Degradasi lahan gambut dalam skala luas karena terdrainase sehingga rentan terhadap kebakaran lahan
		29.	Banjir di DAS Indragiri, Kampar, Siak, dan Rokan dan potensi genangan air di perkotaan yang cendrung meningkat dan merusak infrastruktur dan kehidupan masyarakat
		30.	Abrasi dan pencemaran air di 4 sungai utama dan pesisir pantai yang mengganggu biota dan kehidupan masyarakat
		31.	Keanekaragaman hayati yang semakin terancam oleh kehilangan habitat dan perburuan sehingga menimbulkan konflik satwa dengan manusia.
		32.	Pemanfaatan air bawah tanah secara berlebihan dan belum terkendali sepenuhnya
	Pertanahan	33.	Konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan semakin meningkat
		34.	Kepemilikan bukti hak milik tanah berstatus sertifikat hak milik di masyarakat masih terbatas
		35.	Kepemilikan lahan perkebunan yang melebihi 25 hektar dan tidak berstatus Hak Guna Usaha belum terdata dan tertata
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36.	Pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan penyebaran yang tidak merata antar wilayah,
		37.	Tingkat migrasi masuk yang tinggi di pedesaan dan perkotaan telah mengakibatkan terjadinya tekanan terhadap kebutuhan lahan yang semakin tinggi, sehingga berpotensi mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan non pertanian
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	38.	Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perlindungan anak semakin meningkat
		39.	Rendahnya Kualitas Hidup dan Peran perempuan dalam Pembangunan
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40.	Kelembagaan dalam pelaksanaan Keluarga Berencana melemah
		41.	Kesejahteraan bagi keluarga pra-sejahtera masih memprihatinkan
	Sosial	42.	Pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih kurang
	Tenaga Kerja	43.	Kualitas dan daya saing tenaga kerja Riau masih rendah menyebabkan berkurangnya kesempatan dan peluang berusaha masyarakat

Aspek Pembangunan	Fokus	Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Riau	
	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	44.	Jumlah koperasi aktif masih rendah
		45.	Pembinaan dan permodalan Usaha Kecil Menengah(UKM) dan koperasi serta pengembangan jiwa kewirausahaan masih lemah
	Penanaman Modal	46.	Birokrasi perizinan investasi belum mendorong pertumbuhan penanaman modal
	Kebudayan	47.	Integrasi Budaya Melayu dalam kurikulum pendidikan formal belum dilaksanakan secara mendalam
		48.	Peningkatan pelestarian Budaya Melayu dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat terakomodir dalam kebijakan pembangunan
	Kepemudaan dan Olahraga	49.	Belum optimalnya pemanfaatan sarana Olahraga dan Rekreasi untuk pembinaan prestasi olahraga
		50.	Belum optimalnya kapasitas kegiatan kepemudaan dan olahraga berprestasi
	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	51.	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masih kurang
	OtDA, Pem. Umum, Adm keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Pesandian	52.	Keterbukaan informasi publik masih belum terjamin
	Pangan	53.	Koordinasi ketahanan pangan antar pemerintah daerah masih lemah
		54.	Tingginya ketergantungan penduduk pada konsumsi beras dan lemahnya pengetahuan dan kemampuan penerapan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman
		55.	Semakin terbatasnya lahan pertanian dengan infrastruktur pertanian yang memadai untuk menjamin produksi pangan daerah
		56.	Ketergantungan pasokan produk pangan dari luar daerah dan luar negeri di Riau menyebabkan ketahanan pangan lokal dapat terganggu dan ketahanan pangan lokal Riau sangat rentan dengan keadaan ekonomi daerah lain dan luar negeri
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	57.	Tingkat perkembangan desa di Riau masih rendah (69,35 persen dengan klasifikasi desa swadaya)
		58.	Pemberdayaan sumberdaya manusia, ekonomi dan kelembagaan perdesaan masih lemah
		59.	Terbatasnya akses masyarakat perdesaan terhadap sumberdaya alam, sumberdaya modal, dan infratsruktur pendukung

Aspek Pembangunan	Fokus	Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Riau	
	Statistik	60.	Ketersediaan data dan informasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan daerah masih lemah
	Kearsipan	61.	Sistem dokumentasi dan kearsipan daerah masih lemah
	Komunikasi dan Informatika	62.	Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi, dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan daerah belum maksimal
		63.	Perpustakaan Soeman H.S belum terintegrasi dengan perpustakaan lainnya dan masih terbatasnya referensi Budaya Melayu di perpustakaan sekolah dan daerah
	Tata Kelola Pemerintahan	64.	Kelembagan pemerintahan belum sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip good governance. Hal terlihat dari perolehan nilai rata-rata keterbukaan informasi publik untuk kategori Pemerintahan Provinsi masih di bawah Capaian Nasional
		65.	Kualifikasi, komptetensi profesionaliasi, integritas dan penempatan aparatur/pegawai belum mengacu kepada prinsip the right man and the right place, sehingga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
		66.	Kinerja penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Provinsi Riau masih belum optimal
		67.	Belum optimalnya pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik (electronic Government/e-Gov)
		68.	Belum optimalnya koordinasi internal dan antar instansi pada pemerintah daerah, sehingga terjadi duplikasi atau kesenjangan dalam implementasi kebijakan daerah
Aspek Pelayanan Urusan Pilihan	**Pertanian**	69.	Tingginya alihfungsi lahan dan semakin sempitnya peluang pengembangan pertanian seiring dengan kebutuhan lahan untuk perumahan, komoditas Kelapa Sawit, HTI dan penggunaan lain.
		70.	Lemahnya kelembagaan petani dalam mendorong peningkatan kerjasama dan pengembangan kemitraan usaha
		71.	Dukungan lembaga riset dan SDM Pertanian yang masih lemah juga menyebabkan terjadinya pelambatan dalam pengembangan pertanian rakyat, sehingga menyebabkan produktivitas dan nilai produk pertanian semakin rendah

Aspek Pembangunan	Fokus	Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Riau	
		72.	Keterbatasan infrastruktur pertanian, seperti irigasi dan jalan usaha tani telah menyebabkan terjadinya hambatan pengembangan pertanian, termasuk terhambatnya mobilitas distribusi input produksi dan produksi hasil pertanian,
		73.	Terhambatnya bentukkan aglomerasi atau cluster-cluster pengembangan ekonomi diluar perkebunan kelapa sawit akibat lemahnya jaringan kerjasama yang dapat membangun kegiatan produksi dan pemasaran bersama untuk menarik kegiatan-kegiatan yang saling mendukung baik ke depan atau ke belakang dalam suatu kawasan
		74.	Lemahnya dukungan pengembangan komoditas tradisional Riau, seperti karet, kelapa, sagu dan sector perikanan
		75.	Pemasaran hasil pertanian terkendala ketersediaan infrastruktur, mutu produk, dan teknologi pasca panen yang belum memenuhi tuntutan pasar
		76.	Belum berkembangnya industri hilir sektor pertanian dan perkebunan
		77.	Lemahnya integrasi sistem produksi hulu – hilir dan dukungan sector lainnya seperti perdagangan, transportasi, dan keuangan,
		78.	Pertanian tanaman hortikultura dilakukan pada lahan yang sempit, teknologi tradisional, modal terbatas, dan pasar berskala lokal
		79.	Rendahnya kualitas SDM pertanian dan keterampilan petani dalam penguasaan dan kepemilikan teknologi dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian,
		80.	Terbatasnya sarana, prasarana, infrastruktur dan teknologi dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian rakyat
	Kehutanan	81.	Tidak ada/lemahnya pengelolaan hutan di tingkat tapak sehingga perambahan kawasan dan kerusakan hutan terus meningkat
		82.	Manfaat dari pengelolaan sumber daya hutan belum dirasakan oleh masyarakat sekitar secara langsung
	Energi dan Sumberdaya Mineral	83.	Produksi minyak bumi Riau cenderung menurun dikarenakan meningkatnya jumlah sumur yang tua dan kurang produktif
		84.	Riau masih mengalami defisit energi listrik dan rasio elektrifikasi yang masih rendah dibandingkan rata-rata nasional

Aspek Pembangunan	Fokus	Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Riau	
	Pariwisata	85.	Daya tarik wisata Provinsi Riau belum dikembangkan dengan baik, belum didukung sarana dan prasarana, belum didukung peranserta masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah sehingga belum mendorong kunjungan wisata
		86.	Potensi sektor wisata Riau didominasi oleh wisata budaya yang masih bersifat musiman, dan lemahnya keterkaitan antar kegiatan budaya dan objek wisata menyebabkan belum dapat menjamin perkembangna sector pariwisata,
	Kelautan dan Perikanan	87.	Lemahnya kelembagaan nelayan, belum berkembang budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan
		88.	Perikanan tangkap cenderung overfishing dan ditemukan illegal fishing
	Perdagangan	89.	Sektor jasa, ekonomi syariah dan perdagangan kecil belum berkembang dan masih mengandalkan produk kelapa sawit, minyak mentah, dan HTI, sednagkan jasa perdagangan kecil belum berkembang dengan maksimal
	Industri	90.	Perkembangan sektor industri pengolahan di Riau didominasi oleh perkembangan sektor industri pengolahan kelapa sawit dan hutan tanaman industri yang cenderung padat modal
		91.	Industri hilir pengolahan kelapa, karet dan sagu tidak berkembang dengan baik
		92.	Pembangunan kawasan industri belum optimal dengan ketersediaan investasi dan tata ruang wilayah yang belum ditetapkan, dan infrastruktur penghubung antar kawasan belum optimal
		93.	Industri Kecil Menengah (IKM) belum berkembang dengan baik dengan kelembagan yang lemah
		94.	Produktivitas tenaga kerja industry masih rendah
		95.	Tingkat kesejahteraan petani masih rendah yang ditandai oleh Nilai Tukar Petani (NTP) masih rendah
	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	96.	Sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya menunjang terselenggaranya pelayanan umum, terutama di kawasan perdesaan
		97.	Pasokan listrik dan air bersih kepada rumah tangga dan industri masih terbatas
	Iklim Investasi	98.	Keamanan dan kenyamanan berinvestasi belum terjamin sehingga arus invetasi masuk masih rendah

Aspek Pembangunan	Fokus	Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Riau	
	Sumberdaya Manusia	99.	Penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi aparatur pemerintahan yang masih minim menghambat perencanaan kegiatan satuan kerja; kurang responsif terhadap tuntutan keadaan yang membutuhkan penanganan cepat ; dan menurunkan sensitifitas dalam membangun perspektif perubahan ke masa depan

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

4.1 VISI

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD tersebut memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, Visi Pembangunan Provinsi Riau yang dijadikan acuan dalam RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 menurut Perda No. 9 Tahun 2009 dinyatakan yakni:

"Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020"

Dalam dokumen perubahan ini, Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Riau, disesuaikan untuk menyelaraskan dimensi waktu dengan visi pembangunan jangka panjang Nasional dan dimensi tempat dengan memperhatikan perkembangan terkini, sehingga visi jangka panjang pembangunan Riau 2025 dirumuskan sebagai berikut:

"Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025"

Adapun dasar pertimbangan untuk tetap mempedomani Visi Riau 2025 pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 adalah:

1. Visi Riau 2025 telah dimusyawarahkan bersama masyarakat dan pemerintah daerah melalui Forum Konsultasi Publik pada tanggal 23 Mei 2016 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah pada tanggal 22 Juni 2016.
2. Visi Riau 2025 pada implementasinya relevan dan sejalan dengan rentang waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sesuai dengan tuntutan UU No. 17 tahun 2007.

Pendekatan misi, strategi, arah kebijakan serta program dan indikator capaian berpedoman pada Master Plan Riau 2020, Visi Riau 2020 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, serta evaluasi pencapaian pembangunan jangka panjang Riau sampai dengan tahap kedua, dengan mempertimbangkan perubahan kondisi aktual perekonomian dan isu-isu kemasyarakatan.

Adapun berkenaan dengan arti dan maksud Visi Riau 2025 adalah sebagai berikut:

Visi Riau; merupakan kristalisasi komitmen seluruh lapisan masyarakat Riau, Subjek utama yang ingin dicapai dari setiap aktivitas pembangunan di Riau adalah Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Pusat Kebudayaan Melayu dengan bentangan ruang Indonesia, yang mengarahkan secara empirik bahwa pembangunan ekonomi dan kebudayaan Melayu

merupakan dua hal yang memiliki hubungan yang krusial. Pembangunan ekonomi yang berbasis keadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat diharapkan akan memberi insentif bagi perubahan-perubahan positif pada kebudayaan. Sementara itu, kebudayaan menjadi modal penting pula untuk menggerakan perkembangan aktivitas ekonomi.

Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian; Potensi perekonomian Riau dan posisi geografis Provinsi Riau yang strategis merupakan modal dasar yang kuat dalam menuju Riau sebagai pusat perekonomian di Kawasan Selat Malaka. Provinsi Riau yang berhadapan langsung dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara sangat mampu menjadikan Riau sebagai outlet utama bagi aktivitas perdagangan antar negara bagi Kawasan Selat Malaka. Posisi Riau yang berada di tengah pulau Sumatera menjadi sangat penting sebagai lintasan pergerakan antar wilayah di Pulau Sumatera, sehingga memberikan peluang untuk membangun akses yang tinggi bagi lalu lintas barang, orang, informasi dan modal; keuntungan lokasi sebagai pusat kegiatan; dan sebagai lokasi transit pergerakan orang dan barang.

Provinsi Riau sebagai Pusat Kebudayaan Melayu; Merupakan sumber penggalian, penerapan, dan orientasi bagi nilai-nilai Budaya Melayu, dimana Budaya Melayu menjadi ruh bagi prilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Provinsi Riau. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan Budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Riau sebagai tanah leluhur Budaya Melayu semakin perlu menegaskan jati diri Melayu di Kawasan Selat Malaka.

Masyarakat yang Agamis dan Sejahtera; Tujuan akhir pembangunan adalah masyarakat yang beriman dan bertakwa, di samping kesejahteraan secara fisik. Dalam aspek sosial dan budaya ditunjukan dengan kestabilan politik, ketentraman dan ketertiban, pengamalan agama secara konsisten, kerukunan hidup antar umat beragama, kelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya daerah.

4.2 MISI

Sebagai upaya untuk merealisasikan Visi Pembangunan Provinsi Riau hingga tahun 2025 melalui tahapan pencapaian target yang lebih fokus dan terarah, maka ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai Pusat Kegiatan Perekonomian;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah
4. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah
5. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah daerah
6. Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal
7. Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera
8. Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan
9. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak
10. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat
11. Mewujudkan lingkungan yang lestari
12. Mewujudkan masyarakat madani

Adapun berkenaan dengan arti dan maksud misi Riau 2025 adalah sebagai berikut:

1) **Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian** adalah mendorong dan membangun kegiatan dan prasarana ekonomi serta menciptakan pusat-pusat lintasan darat, laut dan udara bagi Pulau Sumatera, Indonesia, dan Kawasan Selat Malaka.

2) **Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan berdaya saing** adalah meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dan pendapatan daerah berbasis pada potensi sumberdaya daerah terbarukan melalui pengembangan sektor ekonomi unggulan diluar minyak dan gas serta ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan masyarakat.

3) **Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah** adalah mempersempit disparitas pembangunan antar wilayah melalui pendistribusian pembangunan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, mengintegrasikan infrastruktur transportasi antar moda, mendistribusikan pembangunan prasarana wilayah lainnya, dan pembangunan sumberdaya manusia yang seimbang antar wilayah di Provinsi Riau.

4) **Mewujutkan kerjasama pembangunan antar wilayah** adalah membangun dan memperkuat koordinasi dan kerjasama pembangunan antar kabupaten/kota dalam Provinsi, antar Provinsi, dan antar Negara dalam bidang infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

5) **Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah daerah** adalah membangun dan memperkuat tata kelola pemerintah dan pembentukan aparatur yang berkemampuan tinggi, professional, bersih dan beribawa.

6) **Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal** adalah membangun sistem informasi pembangunan, pendapatan dan informasi yang lengkap, akurat dan dapat diakses oleh seluruh pihak melalui pemanfaatan teknologi maju guna mendukung pembangunan.

7) **Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera** adalah meningkatkan kualitas hidup msyarakat dan sumberdaya manusia Riau melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, pembinaan etika, moral dan budaya serta meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi melalui pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan.

8) **Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan** adalah penyediaan sarana dan prasarana pusat referensi dan pusat promosi kebudayaan melayu dan membina serta memberdayakan Budaya Melayu sebagai alat pemersatu tanpa menghilangkan jati diri dalam rangka mewujudkan masyarakat Riau yang maju, mandiri, dan berdayasaing.

9) **Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak** adalah meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat yang toleran, rukun, dan damai.

10) **Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat** adalah membangun kondisi yang kondusif bagi kehidupan dan kegiatan perekonomian, sosial, politik, dan kebudayaan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Riau.

11) **Mewujudkan lingkungan yang lestari** adalah mengendalikan dan memulihkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan guna mendukung pembangunan Provinsi Riau yang berkelanjutan.

12) **Mewujudkan masyarakat madani** adalah mempercepat penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, dan kehidupan masyarakat yang demokratis.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan sasaran pokok akan diuraikan berdasarkan misi pembangunan jangka panjang daerah. Namun demikian, perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau akan ditekankan pada perubahan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk tahap ketiga dan keempat. Dengan kata lain, sasaran pokok dan arah kebijakan pada dokumen RPJPD yang lama (Perda No. 9 Tahun 2009) akan tetap dimasukkan sebagai sasaran pokok arah kebijakan untuk tahap pembangunan kesatu dan kedua. Sedangkan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan untuk tahap ketiga dan keempat telah mengalami perubahan sebagai bahagian dari penegasan untuk pencapaian visi pembangunan jangka panjang Riau.

5.1 ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud oleh arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Riau diperlukan pentahapan dan skala prioritas pembangunan yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun berkesinambungan dan periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang.

Dokumen perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang ini lebih memfokuskan pada tahap lima tahun ke 3 dan ke 4 dari periode pembangunan jangka panjang hingga tahun 2025. Sasaran dan arah kebijakan prioritas disusun kembali berdasarkan hasil evaluasi pembangunan jangka panjang hingga awal tahap lima tahun ke 3 dan beberapa hasil kajian lainnya yang terkait capaian pembangunan jangka panjang Provinsi Riau. Secara umum, tahapan dan prioritas utama pembangunan jangka panjang Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar berikut ini.

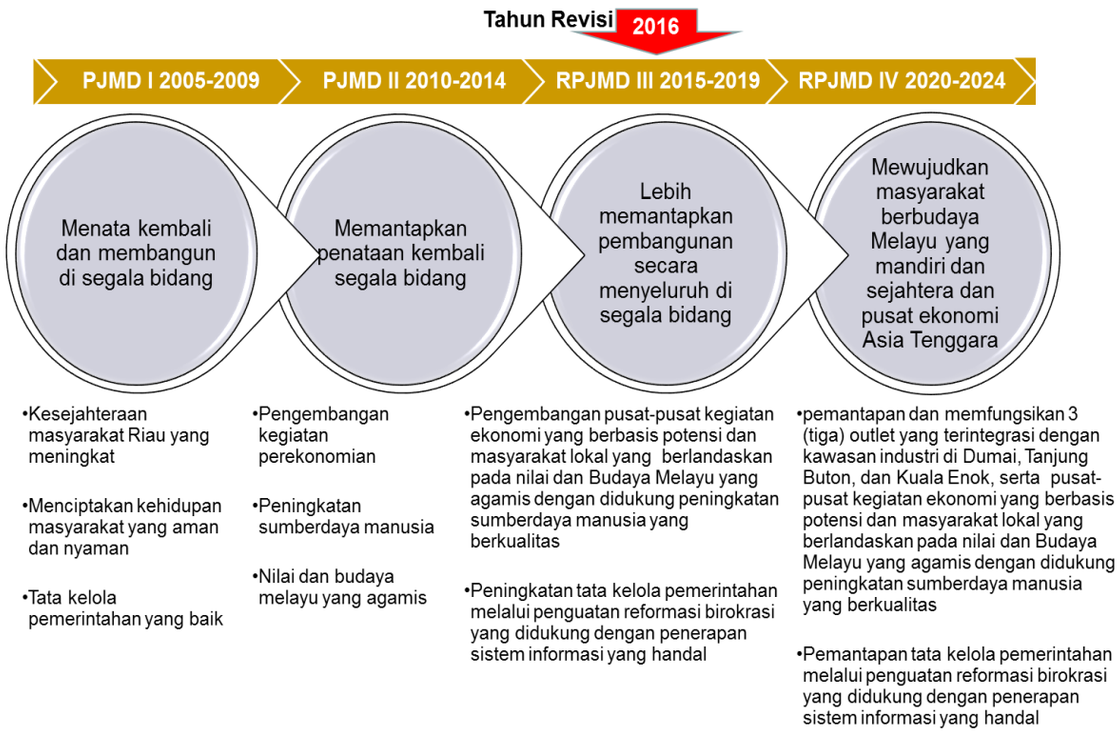

Gambar 5.1: Tahapan Pembangunan dan Prioritas Umum Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau

5.1.1 Tahap Lima Tahun Ke 1 (2005-2009)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM Ke-l diarahkan untuk menata kembali dan membangun Provinsi Riau di segala bidang berdasarkan nilai-nilai Budaya Melayu yang ditujukan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, kesejahteraan masyarakat Riau yang meningkat, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Nilai-nilai Budaya Melayu menjadi ruh dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan ditandai oleh wujud estetika yang berciri khas Melayu; toleransi dan asimilasi kultural; semangat heterogenitas; pemasyarakatan nilai melalui pendidikan formal, publikasi, dan kegiatan seni dan budaya; masyarakat yang mandiri dalam berusaha; dan penerapan nilai-nilai agama dalam pembentukan sikap dan perilaku aparatur pemerintahan dan masyarakat. Pemantapan kebudayaan Melayu sebagai ruh kehidupan masyarakat dan pembangunan didukung oleh keteladanan para pemimpin formal dan tokoh masyarakat Riau secara nyata dan langsung; kemauan dan semangat asimilasi kultural dalam pluralitas masyarakat Riau guna bersinergi dalam pembangunan; dan kehidupan masyarakat yang agamis.

Kehidupan masyarakat Riau yang aman dan nyaman ditandai oleh rendahnya frekuensi dan intensitas kejadian konflik berlatar belakang suku, agama, sosial-ekonomi, dan sosial-budaya dalam kehidupan masyarakat Riau; keberhasilan pemilihan kepala daerah dan wakil masyarakat; penegakan dan penghormatan terhadap hukum; serta kondisi yang kondusif bagi pembangunan Provinsi Riau. Kondisi tersebut didukung oleh kehidupan bermasyarakat yang religius; toleransi masyarakat yang tinggi dalam heterogenitas sosial dan ekonomi; semangat persaudaraan dan kekeluargaan yang terjaga; partisipasi

dan kesiagaan aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam mencegah penyakit sosial yang negatif dan gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat ditunjukkan oleh menurunnya angka pengangguran terbuka dan setengah menganggur; menurunnya bagian penduduk miskin; meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM); meningkatnya tingkat partisipasi aktif angkatan kerja (TPAK); meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; berkurangnya kesenjangan antar bagian wilayah Provinsi Riau; serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Peningkatan kesejahteraan masyarakat ditandai oleh meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dan peningkatan IPM hingga mencapai indeks *75,* terutama di kawasan perdesaan sehingga mengurangi kesenjangan IPM antara kawasan perkotaan dengan perdesaan dan secara keseluruhan meningkatkan IPM Provinsi Riau; mempertahankan TPAK pada kondisi kini sekitar 90%; penurunan angka pengangguran hingga 10% dan penduduk usia kerja, terutama pengangguran terdidik di kawasan perkotaan; dan penurunan bagian masyarakat yang tergolong miskin menjadi sekitar 10% dan penduduk Provinsi Riau.

Kondisi tersebut dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang mantap dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tanpa migas pada laju di atas 8% per tahun bertumpu pada pengembangan industri pengolahan, intensifikasi pertanian, pertambangan, perdagangan, dan jasa. Pembangunan industri pengolahan diarahkan pada industri hilir berbasis sumber daya alam terbarukan; didukung oleh intensifikasi pertanian dan perkebunan; pengembañgan kegiatan peternakan dan perikanan; dan eksplorasi dan penerapan teknologi maju dalam kegiatan eksploitasi migas.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga didukung oleh pengembangan usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil pada sektor primer, sekunder, dan tersier serta pembangunan bagian wilayah Provinsi Riau yang lebih merata. Percepatan pembangunan wilayah didorong melalui penguatan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur transportasi antara lain dengan peningkatan dan pemeliharaan jalan provinsi, energi dengan pencapaian ratio elektrifikasi sebesar 41%, dan telekomunikasi di wilayah bagian Selatan Provinsi Riau; peningkatan kualitas infrastruktur perekonomian di wilayah bagian Tengah dan Utara Provinsi Riau; dan memperkuat penyediaan prasarana dan sarana angkutan barang dan penumpang antar moda transportasi.

Pembangunan sumber daya manusia didukung oleh pembangunan prasarana dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan dasar, menengah, kejuruan dengan pencapaian angka pertisipasi pendidikan kasar (APK) untuk SD/MI mencapai sebesar 108,45%, untuk SMP/MTs sebesar 98,44% untuk SMA/SMK/MA sebesar 76,10%, dan pendidikan tinggi; prasarana dan mutu pelayanan kesehatan yang berujung pada angka harapan hidup telah mencapai 71 tahun; peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembãngunan; peningkatan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosialpolitik yang demokratis; dan perkuatan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh.

Dukungan terhadap pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan melalui perbaikan iklim pembangunan ekonomi yang lebih kondusif di bidang investasi; peningkatan kemitraan dan peran serta sektor swasta dan masyarakat dalam usaha ekonomi; peningkatan tata kelola pemerintahan yang Iebih baik; peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur; dan penyiapan pranata dasar bagi pembentukan sistem informasi pembangunan yang menyeluruh.

Bersamaan dengan pencapaian tujuan tersebut dilakukan upaya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW Provinsi Riau; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; peningkatan kemampuan mitigasi bencana alam melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sarana mitigasi yang memadai; pengenalan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; pengembangan sumber-sumber dan pemanfaatan energi terbarukan, termasuk yang dapat diterapkan pada skala setempat; serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengawasan penurunan kualitas lingkungan.

Secara menyeluruh tujuan pembangunan masyarakat Riau yang aman dan sejahtera dicapai melalui pentaatan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat.

5.1.2 Tahap Lima Tahun Ke 2 (2010-2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM Ke-1, RPJM Ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali segala bidang dengan menekankan peningkatan sumberdaya manusia dan pengembangan kegiatan perekonomian di Provinsi Riau berlandaskan nilai dan Budaya Melayu yang agamis.

Pemantapan penataan kembali seluruh aspek pembangunan diwujudkan melalui terbangunnya ruh kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai Budaya Melayu secara lebih mantap yang terwujud sebagai etika dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam penyelenggaraan pembangunan; peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan; peningkatan toleransi dan asimilasi kultural; semangat heterogenitas; pemantapan kegiatan dan penyediaan prasarana pendukung bagi terbangunnya pusat kebudayaan Melayu; serta kemampuan masyarakat secara mandiri untuk menyelesaikan permasalahan dan konflik sosial, ekonomi, maupun budaya.

Lebih mantapnya tatanan kehidupan masyarakat Riau yang aman dan nyaman ditandai oleh kerukunan dan toleransi kehidupan bermasyarakat tanpa memandang latar belakang suku, agama, sosial-ekonomi, dan social-budaya; penghormatan terhadap agama, tradisi, dan nilai-nilai yang berlaku secara umum; keberlanjutan pemilihan kepala daerah dan wakil masyarakat yang lancar dan aman; penegakan hukum tanpa kecuali; serta terpeliharanya kondisi pembangunan yang kondusif di Provinsi Riau. Kondisi tersebut tetap membutuhkan dukungan kehidupan bermasyarakat dengan toleransi terhadap heterogenitas agama, sosial, dan ekonomi; peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang ditujukan bagi publik; kesiagaan aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Kesejahteraan dan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin berkualitas ditunjukkan oleh keberlanjutan penurunan indikator pengangguran terbuka dan setengah menganggur; penurunan bagian penduduk miskin; peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM); peningkatan tingkat partisipasi aktif angkatan kerja (TPAK); peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; berkurangnya kesenjangan antar bagian wilayah Provinsi Riau; serta peningkatan kualitas lingkungan hidup sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Kesejahteraan masyarakat yang meningkat secara lebih mantap ditandai oleh peningkatan IPM hingga mencapai indeks 80 dengan asumsi bahwa IPM kawasan perdesaan telah berhasil meningkat, sehingga disparitas semakin berkurang; tetap bertahannya TPAK path kondisi sekitar 90%; penurunan angka pengangguran hingga 8% dan penduduk usia kerja dan penurunan

pengangguran terdidik; dan bagian masyarakat yang tergolong miskin menurun hingga sekitar 8% dan penduduk Provinsi Riau.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih mantap dicapai melalui pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tanpa migas pada laju diatas 8% per tahun yang bertumpu pada pengembangan industri pengolahan, pertambangan, agroindustri, perdagangan, dan jasa. Pembangunan industri pengolahan diarahkan pada diversifikasi industri dan pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam terbarukan; penguatan penambahan nilai melalui pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan; dan eksplorasi dan penerapan teknologi maju dalam kegiatan eksploitasi migas. Peningkatan akselerasi pengembangan industri didukung oleh pembangunan kawasan industri di Kota Dumai dan pusat-pusat kegiatan di wilayah Riau bagian Utara dan Selatan. Proses perkembangan ini didukung oleh identifikasi sektor-sektor unggulan yang secara nyata berperan dalam perekonomian Provinsi Riau.

Guna mengurangi disparitas pertumbuhan dan perkembangan antara pusat- pusat kegiatan ekonomi dengan kawasan perdesaan dan antara wilayah Riau bagian Tengah dengan bagian Utara dan Selatan, maka prioritas diberikan pada pengembangan usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil di sektor sekunder dan tersier. Prioritas tersebut perlu didukung oleh berbagai bentuk insentif berupa dukungan perijinan, permodalan, pembinaan, pemasaran, serta penyediaan infrastruktur ekonomi. Selain itu, disparitas perkembangan antar bagian wilayah dikurangi melalui prioritas pembangunan infrastruktur dan fasilitas ekonomi lainnya di wilayah Riau bagian Utara dan Selatan. Prioritas pembangunan wilayah didorong rnelalui penyebaran fungsi distribusi dan koleksi barang dan jasa pada pusat-pusat pertumbuhan berskala lokal (PKL) di wilayah Riau bagian Selatan dan Utara; peningkatan aksesibilitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi multi moda berfungsi pengumpan (feeder); penyediaan sumber daya energi primer dan fasilitas telekomunikasi di wilayah Riau bagian Utara dan Selatan; dan memperkuat kemampuan dan kapasitas penanganan angkutan barang dan penumpang (handling) antar moda pada lokasi pergantian antar moda (transhipment point).

Pembangunan ekonomi juga didukung oleh pembangunan sektor-sektor unggulan yang selama ini telah berkembang, antara lain produk CPO, pulp and paper, crumb rubber, dan minyak kelapa.Pertumbuhan sektor unggulan tetap dipertahankan untuk memantapkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau secara makro.Pembangünan infrastruktur ekonomi selain dilakukan melalui pembangunan prasarana jalan dan angkutan sungai di kawasan perdesaan, juga dilengkapi dengan pembangunan jalan tol Pekanbaru — Dumai dan pembangunan Pelabuhan Dumai, Buatan, dan Kuala Enok menuju terciptanya 3 (tiga) outlet utama Provinsi Riau.Pelabuhan laut lainnya dibangun secara bertahap untuk memperkuat struktur prasarana transportasi laut. Gagasan pembangunan jaringan kereta api regional sebagai bagian Trans Sumatera Railway dimanifestasikan melalui telaah kelayakan dan perancangan lebih rinci.

Seiring dengan pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan pembangunan sumber daya manusia melalui perluasan pembangunan prasarana dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan pendidikan tinggi; perluasan pembangunan prasarana dan mutu pelayanan kesehatan; pembangunan sistem informasi pembangunan yang handal; pemantapan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan; menjaga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial-politik yang demokratis; dan lebih memperkuat kelembagaan demokrasi.

Pada sektor publik dilakukan pemantapan iklim pembangunan ekonomi di bidang investasi melalui kepastian birokrasi, kepastian hukum, dan kepastian usaha; peningkatan format dan skema kemitraan sektor swasta dan publik dengan masyarakat dalam usaha ekonomi; pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik; pemantapan kinerja dan profesionalisme aparatur; dan penegakan hukum secara menyeluruh.

Upaya peningkatan perekonomian dan peningkatan kualitas kelembagaan dan sumber daya manusia dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berpedoman kepada RTRW Provinsi Riau. Arahan pembangunan dalam dimensi spasial dilaksanakan dan dikendalikan secara taat asas terutama dalam tujuan pembentukan struktur ruang dan pola ruang. Dalam kaitan tersebut dilaksanakan pengelolaan lingkungan pada kawasan lindung melalui program pembangunan dan perijinan. Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dilaksanakan bersamaan dengan pemanfaatan sumber energi terbarukan; pelaksanaan program mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim; pemantapan pengendalian penurunan kualitas lingkungan oleh aparatur yang kompeten; serta pelembagaan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pengawasan kualitas lingkungan. Pernantapan kemampuan mitigasi bencana alam dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi; upaya mitigasi secara struktural dan non struktural; serta pemantapan kelembagaan mitigasi bencana.

5.1.3 Tahap Lima Tahun Ke 3 (2015-2019)

Berlandaskan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian PJM Ke-1 dan PJM Ke-2 serta hasil-hasil kajian terkait pembangunan jangka panjang Provinsi Riau dapat disimpulkan bahwa beberapa sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang menjadi fokus pada 2 tahap lima tahun tersebut belum terlaksana sesuai dengan arahan pentahapan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menjaga kesinambungan dan keutuhan skenario arah pembangunan sesuai dengan cita-cita jangka panjang Provinsi Riau, maka arah kebijakan prioritas pada RPJM Ke-3 dan RPJM ke 4 perlu disusun kembali agar dapat mendekati sasaran-sasaran yang telah ditetapkan hingga akhir periode pembangunan jangka panjang tahun 2025. Penegasan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Riau akan disusun pada tahap pembangunan lima tahun ke 3 dan ke 4 berikut ini.

Berdasarkan telaah evaluasi pembangunan jangka panjang Provinsi Riau pada Tahun 2015, beberapa hal yang disimpulkan tentang pencapaian pembangunan jangka panjang Provinsi Riau adalah:

1. Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian, belum menunjukkan hasil yang baik. Pembangunan 4 (empat) outlet sebagai pusat-pusat pertumbuhan utama tempat berlokasinya kegiatan ekonomi berskala regional yang berfungsi produksi, koleksi, pengolahan, dan distribusi barang dan jasa bagi Provinsi Riau, Sumatera bagian tengah, Pulau Sumatera, dan Negara-negara di wilayah Asia Tenggara belum dapat diwujudkan. Sampai dengan tahun 2015 baru Kawasan Industri Dumai (KID) yang telah beroperasi dan dioperasionalkan oleh pihak swasta. Sementara itu 3 (tiga) kawasan industri lainnya yaitu, Kawasan Industri Tanjung Buton (Siak), Kawasan Industri Kuala Enok (Indragiri Hilir), dan Kawasan Industri Tenayan (Pekanbaru) belum beroperasi. Pembangunan kawasan industri yang terkendala telah menyebabkan tidak terjadinya keseimbangan pembangunan antara ekonomi skala besar (bermodal besar) dan ekonomi kerakyatan, sehingga sumberdaya alam Riau banyak terkuras untuk mendukung pembangunan ekonomi berskala besar dibandingkan dengan ekonomi yang berbasis masyarakat. Hal ini

semakin buruk karena pembangunan infrastruktur menuju kawasan industri tidak terbangun sehingga disparitas pembangunan antar wilayah semakin tinggi. Namun demikian, dalam menghadapi penurunan harga minyak dunia dan integrasi ekonomi regional dan globalisasi ekonomi dunia, masih dipandang perlu untuk memperkuat struktur ekonomi skala besar ini sebagai penopang terhadap pertumbuhan ekonomi Riau.

2. Pengembangan kegiatan-kegiatan perekonomian di Provinsi Riau juga belum banyak berkembang, hal ini ditandai oleh belum berkembangnya pusat-pusat kegiatan ekonomi dan belum tumbuhnya pusat-pusat aglomerasi yang berbasis potensi dan masyarakat lokal. Hal ini mengakibatkan, sampai dengan tahun 2015 perekonomian Riau masih bertumpu pada sektor migas dan industri skala besar yang dikuasai oleh beberapa pihak swasta dengan exploitasi relatif besar terhadap sumberdaya alam dan lahan di Provinsi Riau. Perekonomian Riau yang mengandalkan sektor migas dan industri besar, dikahawatirkan dalam jangka panjang tidak menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dan tidak mendukung terhadap pembentukan ketahanan ekonomi daerah. Pada sisi lain, tata kelola pemerintahan belum optimal dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi ini telah berdampak pada stagnasi pembangunan sektor lain di Riau, seperti tingkat kemiskinan yang masih bertahan pada 8 persen dan tingkat pengagguran yang masih bertahan pada kisaran 7 – 8 persen. Pembangunan ekonomi pedesaan yang berbasis masyarakat menjadi sangat penting untuk dilaksanakan, dengan beberapa alasan penting, seperti: a) ekonomi pedesaan yang berbasis masyarakat dan potensi lokal dipersiapkan sebagai pembentuk ketahanan ekonomi Riau yang cenderung terbuka dengan pasar dunia; b) pembangunan wilayah pedesaan dianggap sangat penting, karena dalam jangka panjang akan memberi dampak positif terhadap pembangunan daerah dan nasional secara keseluruhan, khususnya menekan arus migrasi penduduk yang berlebihan dari wilayah pedesaan ke kawasan kota yang selanjutnya akan dapat menimbulkan persoalan-persoalan dalam masyarakat kawasan kota yang sudah terlalu padat, sehingga menimbulkan kongesti, pencemaran hebat, permukiman kumuh, sanitasi yang buruk, menurunnya kesehatan dan pada gilirannya akan menurunkan produktivitas kawasan perkotaan; c) pembangunan wilayah pedesaan dan ekonomi pedesaan akan mempercepat akan memperkecil disparitas pembangunan antar wilayah dan meningkat kesejahteraan masyarakat.

3. Tata kelola pemerintahan di Riau saat ini belum didukung kapasitas aparatur yang handal dan sistem informasi pembangunan dan sistem informasi pemerintahan belum tersedia dengan baik. Kemudian, penerapan niai-nilai budaya pada kehidupan masyarakat dan pada pelaksanaan pemerintahan belum menunjukkan hasil yang baik. Lemahnya dukungan perencanaan pembangunan yang integratif dan sinergi antar provinsi dan daerah kabupaten/kota menjadi salah satu penyebab kegagalan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan berbasis masyarakat, dan gagalnya pembangunan infrastruktur jalan, listrik, dan air bersih yang dapat melayani kebutuhan hidup mastarakat. Pelayanan publik yang berlum optimal menjadi salah satu tanda masih diperlukannya penataan tata kelola pemerintahan di Provinsi Riau.

4. Program dan kegiatan pembangunan kebudayaan yang dilaksanakan pada pembangunan 2 periode lima tahunan yang lalu masih lebih didominasi oleh kegiatan pelaksanaan event dan seremoni budaya yang belum mampu mendukung pengembangan industri pariwisata dan perekonomian masyarakat. Artinya pembangunan dimensi budaya masih parsial dalam hal perayaan atau event yang belum menunjukkan arahan yang kuat menuju identitas pusat kebudayaan Melayu di Provinsi Riau.

Berdasarkan telaah hasil dan capaian pembangunan jangka panjang Riau yang disebutkan diatas, maka RPJMD Tahap ke-3 (2015 -2019) ditujukan untuk mencapai sasaran pokok

pembangunan dengan lebih meningkatkan dan memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan penekanan kebijakan umum pembangunan pada hal-hal berikut:

a. Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan utama tempat berlokasinya kegiatan ekonomi berskala regional yang berfungsi produksi, koleksi, pengolahan, dan distribusi barang dan jasa bagi Provinsi Riau, Sumatera bagian tengah, Pulau Sumatera, dan Negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi darat berfungsi arteri primer yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan utama di wilayah Utara, Tengah, dan Selatan yang terintegrasi dengan jaringan jalan dan moda transportasi lainnya. Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi laut berfungsi international port dan national port di pelabuhan Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok dan terbangunnya struktur kepelabuhan di Provinsi Riau secara hirarkis yang terintegrasi dengan transportasi laut dengan moda transportasi lainnya. Terbangunnya pembangkit energi listrik yang bersifat otonom yang dikelola daerah untuk pelayanan kebutuhan kawasan industri serta kebutuhan masyarakat perkotaan dan perdesaan, sebagai antisipasi krisis energi listrik negara.

b. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan sektor perekonomian jangka panjang pada sektor non-migas yaitu pertanian, perikanan, dan peternakan yang terintegrasi pada sektor hulu dan hilir, dan terbangunnya industri berbasis agro (agroindustri) dan industri manufaktur lainnya yang mendorong nilai tambah produksi daerah. Tumbuhnya kegiatan usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil di sektor primer, sekunder, dan tersier yang saling terkait dalam proses penambahan nilai, terutama di kawasan perdesaan. Tersedianya infrastruktur ekonomi dengan tingkat pelayanan yang berkualitas di bidang transportasi, komunikasi, informasi, produksi, lembaga keuangan dan pemasaran. Terbangunnya industri pariwisata yang didukung oleh jasa-jasa pelayanan transportasi, perhotelan, restaurant, telekomunikasi dan kegiatan perekonomian masyarakat

c. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa *(good governance and clean government)* yang ditandai oleh penguatan reformasi birokrasi yang didukung dengan penerapan sistem informasi yang handal. Tata kelola pemerintahan menjadi sangat penting karena menjadi determinan dalam kemampuan melakukan telaah prioritas pembangunan dan melakukan *switching budget* dan *switching regulation* terhadap orientasi pembangunan perekonomian berbasis masyarakat, dengan tetap meberikan kesempatan pada sektor swasta untuk berperan dalam pembangunan di Provinsi Riau. Terwujudnya penerapan sistem Informasi yang handal dan terjaminnya keamanan dan tumbuhnya partisipasi dan tanggung jawab masyarakat yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.

d. Terbangunnya sarana dan prasarana pusat referensi dan promosi Budaya Melayu yang diikuti oleh terintegrasinya nilai-nilai Budaya Melayu dalam semua aspek kehidupan masyarakat . Terlaksananya upaya-upaya pengintegrasian Budaya Melayu pada perekonomian masyarakat dan pembangunan kepariwisataan. Penerapan nilai-nilai budaya melayu dalam kehidupan masyarakat yang ditunjukkan oleh terciptanya kehidupan yang agamis dan toleransi kerukunan antar umat beragama dan terwujudnya nilai-nilai positif dan mulia di kalangan masyarakat yang berlandaskan pada ajaran agama, sehingga dapat menjadi nilai utama di dalam masyarakat.

Indikator pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fokus pembangunan yang dilaksanakan pada tahap ke-3 RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mendorong dan mempertahankan kembali laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tanpa migas yang bertumpu pada pengembangan agroindustri, industri pengolahan,

perdagangan, dan jasa (sektor non migas) dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tingkat 3,0 – 4,0 persen, dan kontribusi sektor non-migas yang terus meningkat dan semakin kuat dalam struktur perekonomian Riau.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau hingga mencapai IPM pada indeks 72-73, dengan tingkat kemiskinan di Riau yang terus menurun hingga 6 – 7 persen dengan prioritas penurunan kemiskinan pada wilayah pedesaan, dan menurunkan ketimpangan pendapatan antar penduduk hingga mencapai gini rasio sampai dengan indek gini 0,37 – 0,34.
3. Menurunnya tingkat pengangguran hingga pada tingkat 6 – 7 persen dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) hingga kondisi kisaran 60 - 70 persen,
4. Pengendalian Laju Inflasi hingga mencapai 4 - 5 persen per tahun,
5. Berkurangnya disparitas pertumbuhan dan perkembangan antara kawasan perdesaan dan perkotaan dan antara wilayah Riau bagian Tengah dan Riau bagian Utara dan Riau bagian Selatan,
6. Tersedianya sarana dan prasarana pusat kebudayaan Melayu di Riau yang berfungsi sebagai pusat referensi dan pusat promosi kebudayaan melayu dan terintegrasinya nilai-nilai Budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran pokok pembangunan tahap ke-3 RPJPD tersebut, dan setelah memperhatikan pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam arah kebijakan, maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang Tahap Ketiga (2015 – 2019) sebagai berikut:

1. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan masyarakat,
2. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas,
3. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang pembangunan nilai dan Budaya Melayu yang agamis,
4. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penguatan reformasi birokrasi yang didukung dengan penerapan sistem informasi yang handal,
5. Memantapkan pembangunan bidang lingkungan hidup dan penanganan bencana untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Lebih rinci arah kebijakan pembangunan jangka panjang Tahap Ketiga (2015 – 2019) tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebijakan umum memantapkan pembangunan Riau secara menyeluruh pada bidang pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan masyarakat, akan dijabarkan pada tiga kebijakan pembangunan yaitu:
    a) Meningkatkan kembali dan memantapkan laju pertumbuhan ekonomi Riau untuk mengantisipasi penurunan harga minyak dunia, melalui fasilitasi dan mendorong pengembangan kawasan industri melalui regulasi dan deregulasi pembangunan daerah dan meningkatkan koordinasi pembangunan kawasan strategis daerah dengan pemerintah. Dengan pertimbangan keadaan perekonomian nasional serta global diharapkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik yang dicapai

dengan meningkatkan kembali laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dengan migas pada laju sekitar 3 hingga 4 persen, yang bertumpu pada pengembangan pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama tempat berlokasinya kegiatan ekonomi berskala regional yang berfungsi produksi, koleksi, pengolahan, dan distribusi barang dan jasa bagi Provinsi Riau, Sumatera bagian tengah, Pulau Sumatera, dan Negara-negara di wilayah Asia Tenggara, harus didukung dengan pembangunan sektor ekonomi unggulan daerah Riau seperti pertanian terutama pada komoditas unggulan daerah yang berbasis potensi lokal dan masyarakat, pembangunan industri berbasis pertanian (agroindustri) dan mendorong industry hilir kelapa sawit pada industri *derivative* lainnya, untuk menggantikan kedudukan migas sebagai sektor utama daerah. Penekanan utama harus difokuskan untuk mendorong dan memfasilitasi perkembangan industri hilir produk turunan *(derivative industry)* berbasis minyak kelapa sawit dan produk turunan hutan tanaman industri. Merespon secara cermat terhadap integrasi ekonomi regional Asia Tenggara yang telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut kawasan Asia Tenggara sebagai sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi. Kesatuan pasar dan basis produksi akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan *skilledlabour* menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, mendorong dan memfasilitasi pengembangan kegiatan industri, perdagangan, yang didukung oleh industri jasa-jasa berskala regional dan internasional pada pusat-pusat kegiatan berskala PKN dan PKW sesuai dengan fungsi utama yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Riau. Arah kebijakan lain yang diperlukan dalam mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Riau adalah:

i. Pengembangan **terminal regional** yang berfungsi koleksi dan distribusi komoditi pada **kota-kota pelabuhan utama**,

ii. Mendorong akselerasi **pengembangan kawasan industri** dan **pusat-pusat aglomerasi** industri di Dumai, Tanjung Buton, dan Kuala Enok

iii. Membangun dan memantapkan **keterkaitan (integrasi) pengembangan kluster-kluster ekonomi berbasis masyarakat**, khususnya komoditas karet, kelapa, sagu, perikanan dan kelapa sawit dengan kawasan industri

iv. Mendorong pembangunan **jalan Tol Pekanbaru - Dumai** dan **pengembangan Pelabuhan** Dumai, Tj. Buton, dan Kuala Enok **menuju terciptanya 3 (tiga) outlet utama** Provinsi Riau yang terintegrasi dengan jaringan jalan dengan moda transportasi lainnya,

v. Mendorong percepatan koordinasi dan implementasi **pembangunan jaringan kereta api** regional sebagai bagian **Trans Sumatera Railway** yang terintegrasi dengan jaringan terminal antar moda transportasi lainnya,

vi. Mendorong terbangunnya **infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi laut berfungsi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul** di pelabuhan Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok, dan terbangunnya struktur kepelabuhan secara hirarkis yang terintegrasi dengan transportasi laut dan moda transportasi lainnya,

vii. Mendorong percepatan **pembangunan pembangkit energi listrik milik** daerah untuk memenuhi kecukupan elektrifikasi masyarakat dan kebutuhan industri,

viii. Mendorong terbangunnya **pembangkit listrik dari sumber energi alterlatif** untuk memenuhi kebutuhan energi daerah,

ix. Mendorong pembangunan Pembangunan Waduk untuk Pembangkit Listrik Lompatan Harimau (Rokan Kiri) dan Pengembangan Bandara SSK II di Pekanbaru serta Bandara Pinang Kampai di Dumai.

x. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air bersih melalui SPAM Regional.

xi. Mendorong Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukit Tinggi, Pembangunan Jalan Tol Jambi – Rengat, Pembangunan Jalan Tol Rengat – Pekanbaru dan Pembangunan Jalan Tol Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat sebagai bagian dari Trans Sumatera.

xii. Mendorong pembangunan kilang minyak dengan melakukan *upgrading* kilang-kilang eksisting (RDMP).

b) Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis komoditas potensi lokal dan masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan perekonomian Riau yang berkelanjutan dan berdaya saing. Pembangunan struktur perekonomian Riau yang kokoh berdasarkan keunggulan sektor perekonomian dalam jangka panjang sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan perekonomian Provinsi Riau yang berkelanjutan dan berdaya saing untuk mengantisipasi habisnya cadangan migas Riau. Pembangunan kegiatan ekonomi berbasis komoditas potensi lokal dan berbasis masyarakat pada sektor pertanian (pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan), industri pengolahan, pariwisata, dan jasa merupakan upaya perlindungan masyarakat dari perkembangan industri besar dan menyelaraskan pembangunan ekonomi modern dan ekonomi tradisional (ekonomi kerakyatan). Arah kebijakan pembangunan ekonomi dalam peningkatan ketahanan struktur perekonomian yang berkelanjutan dan berdaya saing dapat dilakukan melalui peningkatan dan pembangunan aktivitas ekonomi berbasis komoditas potensi lokal dan berbasis ekonomi masyarakat melalui dukungan peningkatan infratsruktur transportasi, infrastruktur penelitian dan pengembangan *(research and development)*, peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan integrasi hulu dan hilir dan integrasi horizontal dengan pelaku ekonomi lain berbasis ekonomi masyarakat (kerakyatan) yang besifat spasial dan kewilayah, dan mendorong terjalinnya kemitrausahaan antar usaha kecil, menengah dan besar sehingga membentuk struktur kluster-kluster ekonomi spesifik wilayah. Pengembangan kluster-kluster pengembangan komoditas berbasis masyarakat dibangun terintegrasi dengan kawasan industri, sehingga membentuk struktur pengembangan komoditas dan ekonomi masyarakat spesifik wilayah dan bercirikan kawasan industri yang dibangun. Beberapa rincian arah kebijakan pembangunan untuk mendukung kebijakan umum ini sebagai berikut:

i. Pemantapan pembangunan **komoditas unggulan berbasis sumberdaya alam terbarukan dan potensi lokal** yang selama ini telah ada namun belum berkembang antara lain karet, kelapa, sagu dan perikanan yang didukung oleh pengembangan industri hulu dan hilir,

ii. Pemantapan dan rehabilitasi **kegiatan ekonomi** berbasis komoditas unggulan lokal dan berbasis masyarakat **pada sektor pangan dan bahan baku industri pangan** untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah

iii. Pemantapan pembangunan **peternakan yang terintegrasi** dengan potensi perkebunan kelapa sawit

iv. **Menekan alih fungsi lahan dan perlindungan lahan pertanian** untuk keberlanjutan produksi pangan daerah,

v. **Pemulihan ekosistem dan restorasi gambut untuk pengembangan pertanian** dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis sagu, dan tanaman endemik lainnya,

vi. Mendorong **pengembangan industri turunan *(derivative industries)*** pada komoditi pertanian, khususnya kelapa sawit, kelapa, karet,

vii. Mendorong peningkatan **nilai tambah *(value added)* pada sektor industri berbasis potensi lokal dan masyarakat** melalui pemanfaatan teknologi tepat guna khususnya pada industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,

viii. Pengembangan lembaga keuangan, ekonomi syariah dan peningkatan **akses masyarakat dan UMKM** terhadap **sumber pembiayaan**.

ix. Pengembangan **usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil pada sektor sekunder dan tersier** sesui dengan kluster-kluster kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal,

x. Peningkatan **kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan** melalui pembangunan integrasi ekonomi dan hubungan kemitraan yang kuat antara usaha kecil, menengah dan usaha besar,

xi. Memperkuat **kemampuan dan kapasitas penanganan angkutan barang dan penumpang** *(handling)* antar moda pada lokasi pergantian antar moda *(transhipment point),*

xii. Peningkatan aksesibilitas distribusi barang melalui penyediaan **infrastruktur transportasi multi moda** berfungsi **pengumpan *(feeder),***

xiii. Membangun **jaringan distribusi produk dan pengembangan kelembagaan pemasaran** komoditas berbasis potensi lokal dan pemantapan sistem pemasaran dan kelembagaan pemasaran komoditas

xiv. Pengembangan **pawisata berbasis nilai dan cagar budaya dan alam khususnya pada koridor empat aliran sungai** dan potensi pariwisata lainnya di Provinsi Riau

xv. **Pemberdayaan masyarakat pada kepariwisataan** melalui pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat

xvi. Eksplorasi serta **penerapan teknologi maju** dalam penggalian **sumber tambang baru** terutama diluar migas.

c) Pemerataan pembangunan antar wilayah di Riau bagian Utara, Tengah, dan Selatan sebagai upaya untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Riau, khususnya pada pengembangan infratsruktur yang mendukung pembangunan ekonomi wilayah dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, pemerataan pembangunan antar wilayah ditujukan untuk membentuk sistem struktur ruang Provinsi Riau yang terpadu untuk membentuk

konektifitas antar wilayah pengembangan ekonomi dan aksesibilitas masyarakat. Untuk mendukung keberhasilan dan optimalnya pemerataan pembangunan antarwilayah di riau diperlukan memperkuat kerjasama pembangunan Provinsi Riau dengan provinsi lain dan negara tetangga dibidang infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Beberapa arah kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mempersempit disparitas pembangunan antar wilayah di Riau adalah:

i. Peningkatan kualitas **infrastruktur multi moda dan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal dan masyarakat** di wilayah Riau bagian Utara, Tengah, dan Selatan,

ii. **Penyebaran fungsi distribusi dan koleksi** barang dan jasa pada pusat-pusat-pusat pertumbuhan **berskala wilayah dan lokal (PKW dan PKL)** di wilayah Riau bagian Utara, Tengah, dan Selatan

iii. Pembangunan **pelabuhan laut dan penyeberangan** untuk memperkuat struktur prasarana transportasi laut dan penyeberangan,

iv. Pembangunan infrastruktur ekonomi melalui pembangunan **prasarana jalan dan angkutan sungai di kawasan perdesaan**,

v. Pembangunan **prasarana dan utilitas perkotaan** yang mendukung perkembangan pusat-pusat pertumbuhan baru,

vi. Penyediaan **sumberdaya energi primer, air bersih dan fasilitas telekomunikasi** di wilayah Riau bagian Utara dan Selatan,

vii. Pembangunan **infrastruktur pedesaan** (jalan, listrik, irigasi, air bersih, dan pasar) untuk mendukung **modernisasi ekonomi pedesaan,**

viii. Pembangunan **infrastruktur hulu yang mendukung pengembagan perekonomian berbasis potensi lokal dan masyarakat**, seperti pusat-pusat penelitian dibidang pertanian yang dapat menyediakan kebutuan teknologi produksi dan pengolahan hasil.

2. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, untuk mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dimaksudkan untuk menciptakan sumberdaya manusia Riau yang mampu menggerakkan usaha ekonomi berbasis masyarakat berskala menengah dan kecil untuk menampung peningkatan jumlah penduduk usia kerja, sehingga mampu meningkatkan produktivitas penduduk untuk memperoleh pendapatan, dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di perdesaan, dan meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran, serta mendukung terjadinya pergeseran atau transformasi tenaga kerja akibat perkembangan industri dan struktur perekonomian Riau. Aspek pembangunan penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek kependudukan, dan aspek ketenagakerjaan. Beberapa arah kebijakan yang diperlukan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah:

   i. Perluasan pembangunan **prasarana dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan** kejuruan, dan dukungan pengembangan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi,

ii. Peningkatan **peran perguruan tinggi daerah dalam menyiapkan tenaga ahli** dan tenaga profesional untuk mendukung pembangunan daerah pembangunandaerah,

iii. Perluasan pembangunan **prasarana, sarana dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan** dasar dan lanjutan (rujukan) masyarakat dan perlindungan kesehatan masyarakat miskin,

iv. Pemantapan **kapasitas lembaga dan pelayanan kesehatan** masyarakat,

v. Peningkatan **kualitas kependudukan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemberantasan** penyalahgunaan narkoba, HIV AIDS dan prilaku hidup bebas dalam kalangan generasi muda,

vi. Peningkatan **kompetensi tenaga kerja** melalui pembangunan dan peningkatan kualitas balai-balai pelatihan kerja yang berbasis potensi lokal dan masyarakat serta perkembangan industri,

vii. **Revitalisasi dan pemantapan peran Balai Latihan Kerja (BLK**) dalam rangka mendorong pembangunan ketenagakerjaan daerah.

3. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang pembangunan nilai dan Budaya Melayu yang agamis dimaksudkan untuk pemantapan nilai-nilai Budaya Melayu yang terdefinisi dalan kesantunan, toleransi dan islami sebagai ruh kehidupan masyarakat terwujud sebagai etika, orientasi, dan sumber inspirasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Riau dan dalam hal penyelenggaraan pembangunan, serta pelestarian lingkungan dengan menjaga asimilasi kultural dan menjaga dan memelihara heterogenitas. Dalam jangka panjang, pembangunan Budaya Melayu diarahkan pada mewujudkan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu di Indonesia dan memiliki keterkaitan dengan pembangunan industri pariwisata serta pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan kebudayaan Melayu memerlukan perlaksanaan yang terstruktur dan terarah dalam pencapaian visi jangka panjang Provinsi Riau yang juga tercermin dalam *tagline* Provinsi Riau sebagai *The Homeland Of Melayu*. Beberapa arah kebijakan yang diperlukan untuk mendukung kebijakan umum ini adalah:

i. Pengembangan sarana dan prasarana Pusat Kebudayaan Melayu di Asia Tenggara melalui **pemantapan referensi dan promosi kebudayaan melayu,**

ii. Melestarikan **Budaya Melayu di koridor empat aliran sungai dan wilayah pesisir** sebagai ciri khas Budaya Melayu Riau.

iii. Memperkuat penerapan **nilai Budaya Melayu** dalam aspek kehidupan masyarakat melalui **pengintegrasian pada semua jenjang dan jalur pendidikan dan pelatihan**

iv. Peningkatan pembangunan untuk pelestarian lingkungan dan asimilasi kultural untuk menjaga dan **memelihara heterogenitas budaya** dengan **Budaya Melayu sebagai payung kebudayaan**

v. Memperkuat penerapan Budaya Melayu melalui **peran kelembagaan adat** (LAM)

vi. Memperkuat pelestarian **kebudayaan melayu melalui event budaya** seperti pagelaran seni dan pertunjukan, kuliner serta pelestarian simbol budaya yang **terintegrasi dengan potensi pariwisata daerah**

vii. Pelestarian dan pemanfaatan **Budaya Melayu** yang **terintegrasi** dengan pengembangan sektor **pariwisata** daerah.

4. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Good governance sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat sipil. Untuk mewujudkan Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu, tentunya mensyaratkan adanya kepemerintahan yang baik sebagai pembuat kebijakan yang dapat memberikan insentif baik kepada investor untuk meningkatkan daya saing maupun masyarakat umumnya. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan dan daya inovatif serta penegakan hukum yang di dukung oleh dengan pemanfaatan infromasi dan teknologi Beberapa arah kebijakan yang diperlukan untuk mendukung kebijakan umum ini adalah:
    i. Melakukan **reformasi birokrasi** untuk mencapai pelaksanan pemeritahan yang efesien dan efektif,
    ii. Menumbuhkan **daya inovasi dan kreatifitas pemerintahan** untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha,
    iii. Peningkatan **kapasitas sumberdaya aparatur** pemerintah daerah yang **berbasis kompetensi** untuk menumbuhkan daya inovasi dan kreatifitas pemerintahan,
    iv. Pengembangan **etika kepemimpinan pemerintahan** untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang sehat,
    v. Peningkatan **peranserta masyarakat** dalam rangka mendukung **penyelenggaraan pemerintahan** dengan berlandaskan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif,
    vi. Mewujudkan **pengelolaan keuangan daerah** yang efisien dan efektif.
    vii. Penegakan dan perlindungan **hukum secara menyeluruh** untuk mendukung ***good governance* and *clean government***,
    viii. **Penerapan sistem informasi** yang handal untuk akselerasi terbangunnya sistem dan kemudahan **dalam pendataan, perencanaan, dan monitoring perkembangan pembangunan daerah serta pelayanan publik yang prima,**
    ix. **Pemantapan akses masyarakat** terhadap informasi pembangunan.
5. Memantapkan pembangunan bidang lingkungan hidup dan penanganan bencana untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, melalui pengendalian penggunaan lahan dan sumberdaya alam untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, pencemaran air dan udara. Pembangunan lingkungan juga ditujukan untuk pelestarian ekosistem pesisir untuk mengantisipasi abrasi pantai, intrusi air laut dan kerusakan hutan mangrove. Untuk mendukung pemangunan lingkungan hidup perlu peningkatan kompetensi aparatur dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelibatan masyarakat dan swasta (dunia usaha) sebagai bahagian dari pelaku pembangunan. Kesemua ini dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau. Beberapa arah kebijakan yang diperlukan untuk mendukung kebijakan umum ini adalah:

i. Peningkatan **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** Provinsi Riau melalui pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan, pencemaran air, dan pencemaran udara,

ii. **Pengendalian penggunaan lahan dan sumberdaya alam**, khususnya di lahan gambut dan daerah rawan bencana, sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) lingkungan hidup,

iii. **Pengendalian kerusakan ekosistem pesisir** berupa abrasi pantai, intrusi air laut, dan kerusakan hutan mangrove,

iv. **Penanggulangan kebakaran hutan** yang telah menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial masyarakat Provinsi Riau dan wilayah sekitarnya,

v. **Peningkatan kompetensi aparat** dalam pengawasan usaha/kegiatan yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan hidup,

vi. **Peningkatan kapasitas lembaga dan aparat dalam pengendalian dan pengawasan** terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan,

vii. **Pemberian akses dan fasilitas bagi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat** untuk berperan serta dalam pengawasan kerusakan dan pencemaran lingkungan,

viii. Penguatan **kapasitas lembaga dan aparatur penegak hukum** dalam bidang penanggulangan **kejahatan lingkungan hidup**,

ix. **Pengendalian perburuan satwa liar** dan **mempertahankan keutuhan ekosistem kawasan lindung** yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Riau,

x. Peningkatan **kesadaran sektor swasta dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

5.1.4 Tahap Lima Tahun Ke 4 (2020-2024)

Pelaksanaan pembangunan pada tahap ke-4 RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 masih memerlukan perhatian besar terhadap pencapaian visi pembangunan jangka panjang. Menjaga kesinambungan dan keutuhan skenario arah pembangunan sesuai dengan cita-cita jangka panjang Provinsi Riau pada tahap ke-4 ini masih merupakan bahagian dan melanjutkan dari skenario dan arah kebijakan prioritas pada RPJM Ke-3 untuk mendekati pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan hingga akhir periode pembangunan jangka panjang, yaitu tahun 2025.

Terkait dengan hal tersebut, maka sasaran pokok pembangunan jangka panjang pembangunan jangka panjang Tahap ke-4 adalah:

a. Berfungsinya 3 (tiga) outlet pusat kegiatan ekonomi yang terintegrasi dengan kawasan industri di Dumai, Tanjung Buton, dan Kuala Enok, serta pusat-pusat kegiatan ekonomi yang berbasis potensi dan masyarakat lokal yang berlandaskan pada nilai dan Budaya Melayu yang agamis dengan didukung peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas.

b. Semakin kuatnya struktur perekonomian Riau melalui penguatan produksi dan penataan industri hilir berbasis sumberdaya lokal dan berbasis masyarakat dimaksudkan untuk mengembangkan produksi berbasis substitusi impor yang lebih berorientasi padat karya dan memiliki kandungan lokal tinggi, untuk menciptakan keunggulan daya saing

ekonomi daerah. Pilihan jenis produksi paling layak sebagai prioritas adalah komoditas karet, kelapa, sagu, komoditas pangan, perikanan, peternakan dan industri kecil dan menengah sebagai pendukung aktivitas primer terutama dalam rangka penguatan sumber bahan baku industri dan penguatan kedaulatan pangan daerah.

c. Tata kelola pemerintahan yang mantap melalui penguatan reformasi birokrasi yang didukung dengan penerapan sistem informasi yang handal. Tata kelola pemerintahan menjadi sangat penting karena menjadi determinan dalam kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan telaah prioritas pembangunan terhadap orientasi pembangunan perekonomian berbasis masyarakat, dengan tetap meberikan kesempatan pada sektor swasta untuk berperan dalam pembangunan di Provinsi Riau sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama dengan memantapkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru pada sektor non-migas yang berbabasis pada ekonomi masyarakat (rakyat), serta mempersempit kesenjangan pembangunan antar wilayah.

d. Tersedianya sarana dan prasarana pusat referensi dan promosi Budaya Melayu yang diwujudkan dengan integrasi nilai-nilai Budaya Melayu dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan perekonomian masyarakat dan pariwisata. Terciptanya kehidupan yang agamis dan toleransi kerukunan antar umat beragama yang ditandai oleh terwujudnya nilai-nilai positif dan mulia di kalangan masyarakat yang berlandaskan pada ajaran agama, sehingga dapat menjadi nilai utama di dalam masyarakat sehingga terwujudnya rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan.

Pembangunan ekonomi masih tetap menjadi isu strategis dalam pembangunan Riau. Selain untuk mengantisipasi era migas, juga menghadapi tentangan globalisasi ekonomi dan integrase ekonomi regional yang sudah berlangsung. Arah kebijakan pembangunan ekonomi Riau dalam Tahap Keempat (2020-2025) adalah: a) mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan laju pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kontribusi sektor ekonomi unggulan non migas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi utama, seperti industri hilir kelapa sawit dan hutan tanaman industri; b) lebih memantapkan dan meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan berbasis masyarakat, khususnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang menjadi aktivitas ekonomi pedesaan melalui pembangunan kluster-kluster pengembangan komoditas berbasis potensi lokal dan masyrakat yang membentuk struktur pengembangan ekonomi spasial dan spesifik kewilayah. Indikator pembangunan daerah yang harus dicapai pada Tahap Keempat RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tanpa migas yang bertumpu pada pengembangan agroindustri, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tingkat 4,0 – 5,0 persen, dan kontribusi sektor non-migas yang terus meningkat dalam struktur perekonomian Riau.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau hingga mencapai IPM pada indeks 73 - 75, dengan tingkat kemiskinan di Riau yang terus menurun hingga 5,5 - 6 persen dengan prioritas penurunan kemiskinan pada wilayah pedesaan, dan menurunkan ketimpangan pendapatan antar penduduk hingga mencapai gini rasio sampai dengan indek gini 0,34 – 0,30.
3. Menurunnya tingkat pengagguran hingga pada tingkat 5,5 - 6 persen dan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) hingga kondisi kisaran 55 - 60 persen,
4. Pengendalian Laju Inflasi hingga mencapai 4 - 5 persen per tahun,

5. Berkurangnya disparitas pertumbuhan dan perkembangan antara kawasan perdesaan dan perkotaan dan antara wilayah Riau bagian Utara, Tengah, dan Selatan.
6. Tersedianya sarana dan prasarana pusat kebudayaan Melayu di Riau yang berfungsi sebagai pusat referensi dan pusat promosi kebudayaan melayu dan terintegrasinya nilai-nilai Budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat serta pengembangan ekonomi dan industri pariwisata.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang pada Tahap Keempat (2020-2025) RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 setelah memperhatikan pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam arah kebijakan, yaitu:

1. Lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan masyarakat,
2. Lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas,
3. Lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang pembangunan nilai dan Budaya Melayu yang agamis,
4. Lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penguatan reformasi birokrasi yang didukung dengan penerapan sistem informasi yang handal,
5. Lebih memantapkan pembangunan bidang lingkungan hidup dan penanganan bencana untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Lebih rinci arah kebijakan terhadap kebijakan umum pembangunan Tahap Keempat (2020-2025) RPJPD tersebut diatas difokuskan pada lebih memantapkan setiap arah kebijakan yang dirincikan pada setiap arah kebijakan tahap ke-3 RPJPD diatas. Penegasan pembangunan tahap ke-4 RPJPD Provinsi Riau diarahkan pada arah kebijakan yang sama dengan penekanan pada upaya lebih memantapkan aspek-aspek pembangunan tersebut. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Tahap Keempat (2020 – 2025) tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Lebih memantapkan pembangunan Riau secara menyeluruh pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan masyarakat, akan dijabarkan pada tiga kebijakan pembangunan yaitu:
    a) Lebih memantapkan laju pertumbuhan ekonomi Riau untuk mengantisipasi penurunan harga minyak dunia dan produksi minyak daerah, melalui fasilitasi dan mendorong pengembangan kawasan industri melalui regulasi dan deregulasi pembangunan daerah dan meningkatkan koordinasi pembangunan kawasan strategis daerah dengan pemerintah. Operasionalisasi dan optimalisasi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan utama tempat berlokasinya kegiatan ekonomi berskala regional yang berfungsi produksi, koleksi, pengolahan, dan distribusi barang dan jasa bagi Provinsi Riau, Sumatera bagian tengah, Pulau Sumatera, dan Negara-negara di wilayah Asia Tenggara, harus terintegrasi dengan pembangunan sektor ekonomi unggulan daerah Riau terutama pada komoditas unggulan daerah yang berbasis potensi lokal dan masyarakat, pembangunan industri berbasis pertanian (agroindustri) dan mendorong industri hilir kelapa sawit pada industri *derivative* lainnya, untuk menggantikan kedudukan migas sebagai sektor utama daerah. Penekanan utama harus difokuskan untuk memfasilitasi perkembangan industri hilir produk turunan *(derivative industry)*

berbasis minyak kelapa sawit dan produk turunan hutan tanaman industri. Memafaatkan pelaksanaan integrasi ekonomi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai kesatuan pasar dan basis produksi barang dan jasa, investasi, modal. Lebih memantapkan pengembangan sumberdaya tenaga kerja menjadi *skilledlabour* agar dapat memanfaatkan era MEA. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan kegiatan industri, perdagangan, yang didukung oleh industri jasa-jasa berskala regional dan internasional pada pusat-pusat kegiatan berskala PKN dan PKW sesuai dengan fungsi utama yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Riau menjadi penegasan arah pembangunan ekonomi Riau. Secara rinci arah kebijakan pembangunan jangka panjang pada Tahap Keempat pembangunan jangka panjang Riau harus mempertahankan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Riau dengan memanfaatkan potensi daerah dan potensi regional, sebagai berikut:

a. Optimalisasi dan pemanfaatan **terminal regional** yang berfungsi koleksi dan distribusi komoditi pada **kota-kota pelabuhan utama**,
b. Mendorong akselerasi **pengembangan kawasan industri** dan **pusat-pusat aglomerasi** industri di Dumai, Tanjung Buton, dan Kuala Enok
c. Lebih memantapkan pembangunan **keterkaitan (integrasi) pengembangan kluster-kluster ekonomi berbasis masyarakat**, khususnya komoditas karet, kelapa, sagu, perikanan dan kelapa sawit dengan kawasan industri
d. Pembangunan **jalan Tol Pekanbaru - Dumai** dan **pengembangan Pelabuhan** Dumai, Tj. Buton, dan Kuala Enok **menuju terciptanya 3 (tiga) outlet utama** Provinsi Riau yang terintegrasi dengan jaringan jalan dengan moda transportasi lainnya,
e. Implementasi **pembangunan jaringan kereta api** regional sebagai bagian **Trans Sumatera Railway** yang terintegrasi dengan jaringan terminal antar moda transportasi lainnya
f. Lebih memantapkan pembangunan **infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi laut berfungsi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul** di pelabuhan Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok, dan terbangunnya struktur kepelabuhan secara hirarkis yang terintegrasi dengan transportasi laut dan moda transportasi lainnya,
g. Mendorong percepatan **pembangunan pembangkit energi listrik milik** daerah untuk memenuhi kecukupan elektrifikasi masyarakat dan kebutuhan industri
h. Mendorong terbangunnya **pembangkit listrik dari sumber energi alternatif** untuk memenuhi kebutuhan energi daerah.
i. Peningkatan pelayanan Bandara Pinang Kampai sebagai persiapan perubahan status dari Bandara Khusus menjadi Bandara Umum.
j. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air bersih melalui SPAM Regional.
k. Pembangunan Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang-Payakumbuh-Bukit Tinggi, Pembangunan Jalan Tol Jambi – Rengat, Pembangunan Jalan Tol Rengat – Pekanbaru dan Pembangunan Jalan Tol Dumai – Sp. Sigambal – Rantau Prapat sebagai bagian dari Trans Sumatera.

l. Mendorong pembangunan kilang minyak dengan melakukan *upgrading* kilang-kilang eksisting (RDMP).

b) Lebih memantapkan pengembangan kegiatan ekonomi berbasis komoditas potensi lokal dan masyarakat dimaksudkan untuk menciptakan perekonomian Riau yang berkelanjutan dan berdaya saing. Pembangunan struktur perekonomian Riau yang kokoh berdasarkan keunggulan sektor perekonomian dalam jangka panjang sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan perekonomian Provinsi Riau yang berkelanjutan dan berdaya saing untuk mengantisipasi habisnya cadangan migas Riau. Pemantapan pembangunan kegiatan ekonomi berbasis komoditas potensi lokal dan berbasis masyarakat pada sektor pertanian (pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan), industri pengolahan, pariwisata, dan jasa merupakan upaya perlindungan masyarakat dari perkembangan industri besar dan menyelaraskan pembangunan ekonomi modern dan ekonomi tradisional (ekonomi kerakyatan). Arah kebijakan pembangunan ekonomi dalam peningkatan ketahanan struktur perekonomian yang berkelanjutan dan berdaya saing dapat dilakukan melalui peningkatan dan pembangunan aktivitas ekonomi berbasis komoditas potensi lokal dan berbasis ekonomi masyarakat melalui dukungan peningkatan infratsruktur transportasi, infrastruktur penelitian dan pengembangan *(research and development)*, peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan integrasi hulu dan hilir dan integrasi horizontal dengan pelaku ekonomi lain berbasis ekonomi masyarakat (kerakyatan) yang besifat spasial dan kewilayahan, dan mendorong terjalinnya kemitrausahaan antar usaha kecil, menengah dan besar sehingga membentuk struktur kluster-kluster ekonomi spesifik wilayah. Pengembangan kluster-kluster pengembangan komoditas berbasis masyarakat dibangun terintegrasi dengan kawasan industri, sehingga membentuk struktur pengembangan komoditas dan ekonomi masyarakat spesifik wilayah dan bercirikan kawasan industri yang dibangun. Beberapa rincian arah kebijakan pembangunan untuk mendukung kebijakan umum ini sebagai berikut:

a. Lebih memantapkan pembangunan **komoditas unggulan berbasis sumberdaya alam terbarukan dan potensi lokal** yang selama ini telah ada namun belum berkembang antara lain karet, kelapa, sagu dan perikanan yang didukung oleh pengembangan industri hulu dan hilir,

b. Lebih memantapkan pengembangan **kegiatan ekonomi** berbasis komoditas unggulan lokal dan berbasis masyarakat **pada sektor pangan dan bahan baku industri pangan** untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah,

c. Lebih memantapkan pembangunan **peternakan yang terintegrasi** dengan potensi perkebunan kelapa sawit,

d. **Menekan alih fungsi lahan dan perlindungan lahan pertanian** untuk keberlanjutan produksi pangan daerah,

e. Lebih memantapkan **pemulihan ekosistem dan restorasi gambut untuk pengembangan pertanian** dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis sagu, dan tanaman endemik lainnya,

f. Lebih memantapkan **pengembangan industri turunan *(derivative industries)*** pada komoditi pertanian, khususnya kelapa sawit, kelapa, karet,

g. Mendorong peningkatan **nilai tambah *(value added)* pada sektor industri berbasis potensi lokal dan masyarakat** melalui pemanfaatan teknologi tepat guna khususnya pada industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,

h. Lebih memantapkan pengembangan lembaga keuangan, ekonomi syariah dan peningkatan **akses masyarakat dan UMKM** terhadap **sumber pembiayaan**.

i. Lebih memantapkan pengembangan **usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil pada sektor sekunder dan tersier** sesuai dengan kluster-kluster kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal,

j. Peningkatan **kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan** melalui pembangunan integrasi ekonomi dan hubungan kemitraan yang kuat antara usaha kecil, menengah dan usaha besar,

k. Memperkuat **kemampuan dan kapasitas penanganan angkutan barang dan penumpang** *(handling)* antar moda pada lokasi pergantian antar moda *(transhipment point),*

l. Peningkatan aksesibilitas distribusi barang melalui penyediaan **infrastruktur transportasi multi moda** berfungsi **pengumpan *(feeder),***

m. Membangun **jaringan distribusi produk dan pengembangan kelembagaan pemasaran** komoditas berbasis potensi lokal dan pemantapan sistem pemasaran dan kelembagaan pemasaran komoditas

n. Pengembangan **pawisata berbasis nilai dan cagar budaya dan alam khususnya pada koridor empat aliran sungai** dan potensi pariwisata lainnya di Provinsi Riau

o. **Pemberdayaan masyarakat pada kepariwisataan** melalui pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat

p. Eksplorasi serta **penerapan teknologi maju** dalam penggalian **sumber tambang baru** terutama diluar migas.

c) Optimalisasi pemerataan pembangunan antar wilayah di Riau bagian Utara, Tengah, dan Selatan sebagai upaya untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Riau, khususnya pada pengembangan infratsruktur yang menudukung pembangunan ekonomi wilayah dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, pemerataan pembangunan antar wilayah ditujukan untuk membentuk sistem struktur ruang Provinsi Riau yang terpadu untuk membentuk konektifitas antar wilayah pengembangan ekonomi dan aksesibilitas masyarakat. Untuk mendukung keberhasilan dan optimalnya pemerataan pembangunan antarwilayah di riau diperlukan memperkuat kerjasama pembangunan Provinsi Riau dengan provinsi lain dan negara tetangga dibidang infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Beberapa arah kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan mempersempit disparitas pembangunan antar wilayah di Riau adalah:

a. Lebih memantapkan peningkatan kualitas **infrastruktur multi moda dan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal dan masyarakat** di wilayah Riau bagian Utara, Tengah, dan Selatan,

b. **Penyebaran fungsi distribusi dan koleksi** barang dan jasa pada pusat-pusat-pusat pertumbuhan **berskala wilayah dan lokal (PKW dan PKL)** di wilayah Riau bagian Utara, Tengah, dan Selatan

c. Pembangunan **pelabuhan laut dan penyeberangan** untuk memperkuat struktur prasarana transportasi laut dan penyeberangan,

d. Pembangunan infrastruktur ekonomi melalui pembangunan **prasarana jalan dan angkutan sungai di kawasan perdesaan**,

e. Pembangunan **prasarana dan utilitas perkotaan** yang mendukung perkembangan pusat-pusat pertumbuhan baru,

f. Penyediaan **sumberdaya energi primer, air bersih dan fasilitas telekomunikasi** di wilayah Riau bagian Utara dan Selatan,

g. Lebih memanfatkan pembangunan **infrastruktur pedesaan** (jalan, listrik, irigasi, air bersih, dan pasar) untuk mendukung **modernisasi ekonomi pedesaan,**

h. Lebih memantapkan pembangunan **infrastruktur hulu yang mendukung pengembagan perekonomian berbasis potensi lokal dan masyarakat**, seperti pusat-pusat penelitian dibidang pertanian yang dapat menyediakan kebutuan teknologi produksi dan pengolahan hasil.

2. Lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas, untuk mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dimaksudkan untuk menciptakan sumberdaya manusia Riau yang mampu menggerakkan usaha ekonomi berbasis masyarakat berskala menengah dan kecil untuk menampung peningkatan jumlah penduduk usia kerja, untuk meningkatkan produktivitas penduduk, peningkatan pendapatan, dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di perdesaan, dan meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia juga dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran, serta mendukung terjadinya pergeseran atau transformasi tenaga kerja akibat perkembangan industri dan struktur perekonomian Riau. Aspek pembangunan penting untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek kependudukan, dan aspek ketenagakerjaan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang diperlukan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah:

   a. Perluasan pembangunan **prasarana dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan** kejuruan, dan dukungan pengembangan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi,

   b. Peningkatan **peran perguruan tinggi daerah dalam menyiapkan tenaga ahli** dan tenaga profesional untuk mendukung pembangunan daerah pembangunan daerah,

   c. Pemerataan dan perluasan pembangunan **prasarana, sarana dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan** dasar dan lanjutan (rujukan) masyarakat dan perlindungan kesehatan masyarakat miskin,

   d. Lebih memantapkan **kapasitas lembaga dan pelayanan kesehatan** masyarakat,

e. Pemerataan dan peningkatan **kualitas kependudukan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemberantasan** penyalahgunaan narkoba, HIV AIDS dan prilaku hidup bebas dalam kalangan generasi muda,

f. Lebih memantapkan peningkatan **kompetensi tenaga kerja** melalui pembangunan dan peningkatan kualitas balai-balai pelatihan kerja yang berbasis potensi lokal dan masyarakat serta perkembangan industri,

g. **Revitalisasi dan lebih memantapkan peran Balai Latihan Kerja (BLK**) dalam pembangunan ketenagakerjaan daerah.

3. Lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang pembangunan nilai dan Budaya Melayu yang agamis dimaksudkan untuk pemantapan nilai-nilai Budaya Melayu yang terdefinisi dalan kesantunan, toleransi dan islami sebagai ruh kehidupan masyarakat terwujud sebagai etika, orientasi, dan sumber inspirasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Riau dan dalam hal penyelenggaraan pembangunan, serta pelestarian lingkungan dengan menjaga asimilasi kultural dan menjaga dan memelihara heterogenitas. Dalam jangka panjang, pembangunan Budaya Melayu diarahkan pada mewujudkan Riau sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara dan memiliki keterkaitan dengan pembangunan industri pariwisata dan pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan kebudayaan Melayu memerlukan perlaksanaan yang terstruktur dan terarah dalam pencapaian visi jangka panjang Provinsi Riau yang juga tercermin dalam motto Provinsi Riau sebagai *The Homeland Of Melayu*. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang diperlukan untuk mendukung kebijakan umum ini adalah:

   a. Lebih memantapkan pengembangan sarana dan prasarana Pusat Kebudayaan Melayu di Asia Tenggara melalui **pemantapan referensi dan promosi kebudayaan melayu,**

   b. Melestarikan **Budaya Melayu di koridor empat aliran sungai dan wilayah pesisir** sebagai ciri khas Budaya Melayu Riau.

   c. Lebih memperkuat penerapan **nilai Budaya Melayu** dalam aspek kehidupan masyarakat melalui **pengintegrasian pada semua jenjang dan jalur pendidikan dan pelatihan**

   d. Memantapkan peningkatan pembangunan untuk pelestarian lingkungan dan asimilasi kultural untuk menjaga dan **memelihara heterogenitas budaya** dengan **Budaya Melayu sebagai payung kebudayaan**

   e. Lebih memperkuat penerapan Budaya Melayu melalui **peran kelembagaan adat** (LAM)

   f. Lebih memperkuat pelestarian **kebudayaan melayu melalui event budaya** seperti pagelaran seni dan pertunjukan, kuliner serta pelestarian simbol budaya yang **terintegrasi dengan potensi pariwisata daerah**

   g. Memantapkan pemanfaatan **Budaya Melayu** yang **terintegrasi** dengan pengembangan sektor **pariwisata** daerah.

4. Lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh tidak dapat terlepas dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Good governance sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan

dalam organisasi masyarakat sipil. Untuk mewujudkan Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan melayu, tentunya mensyaratkan adanya kepemerintahan yang baik sebagai pembuat kebijakan yang dapat memberikan insentif baik kepada investor untuk meningkatkan daya saing maupun masyarakat umumnya. Untuk itu diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintahan dan daya inovatif serta penegakan hukum yang di dukung oleh dengan pemanfaatan infromasi dan teknologi . Arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang diperlukan untuk mendukung kebijakan umum ini adalah:

a. Lebih memantapkan **reformasi birokrasi** untuk mencapai pelaksanan pemeritahan yang efesien dan efektif,
b. Lebih memantapkan **daya inovasi dan kreatifitas pemerintahan** untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha,
c. Lebih memantapkan **kapasitas sumberdaya aparatur** pemerintah daerah yang **berbasis kompetensi** untuk menumbuhkan daya inovasi dan kreatifitas pemerintahan,
d. Lebih memantapkan pengembangan **etika kepemimpinan pemerintahan** untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang sehat,
e. Memantapkan peningkatan **peranserta masyarakat** dalam rangka mendukung **penyelenggaraan pemerintahan** dengan berlandaskan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif,
f. Lebih memantapkan perwujudan **pengelolaan keuangan daerah** yang efisien dan efektif.
g. Lebih menatapkan penegakan dan perlindungan **hukum secara menyeluruh** untuk mendukung ***good governance*** **and** ***clean government***,
h. Lebih memantapkan **penerapan sistem informasi** yang handal untuk akselerasi terbangunnya sistem dan kemudahan **dalam pendataan, perencanaan, dan monitoring perkembangan pembangunan daerah serta pelayanan publik yang prima,**
i. Lebih memantapkan **pemantapan akses masyarakat** terhadap informasi pembangunan.

5. Lebih memantapkan pembangunan bidang lingkungan hidup dan penanganan bencana untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung kualitas lingkungan hidup yang lebih baik, melalui pengendalian penggunaan lahan dan sumberdaya alam untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, pencemaran air dan udara. Pembangunan lingkungan juga ditujukan untuk pelestarian ekosistem pesisir untuk mengantisipasi abrasi pantai, intrusi air laut dan kerusakan hutan mangrove. Untuk mendukung pemangunan lingkungan hidup perlu peningkatan kompetensi aparatur dalam perencanaan, pengendalian dan pengawasan, serta pelibatan masyarakat dan swasta (dunia usaha) sebagai bahagian dari pelaku pembangunan. Kesemua ini dimaksudkan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang diperlukan untuk mendukung kebijakan umum ini adalah:

   a. Memantapkan **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** Provinsi Riau melalui pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan, pencemaran air, dan pencemaran udara,

b. Lebih memantapkan **pengendalian penggunaan lahan dan sumberdaya alam**, khususnya di lahan gambut dan daerah rawan bencana, sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) lingkungan hidup,

c. Memantapkan **pengendalian kerusakan ekosistem pesisir** berupa abrasi pantai, intrusi air laut, dan kerusakan hutan mangrove,

d. **Penanggulangan kebakaran hutan** yang telah menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial masyarakat Provinsi Riau dan wilayah sekitarnya,

e. Lebih memantapkan **peningkatan kompetensi aparat** dalam pengawasan usaha/kegiatan yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan hidup,

f. Lebih memantapkan **peningkatan kapasitas lembaga dan aparat dalam pengendalian dan pengawasan** terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan,

g. Memantapkan **pemberian akses dan fasilitas bagi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat** untuk berperan serta dalam pengawasan kerusakan dan pencemaran lingkungan,

h. Lebih memantapkan penguatan **kapasitas lembaga dan aparatur penegak hukum** dalam bidang penanggulangan **kejahatan lingkungan hidup**,

i. **Pengendalian perburuan satwa liar** dan **mempertahankan keutuhan ekosistem kawasan lindung** yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Riau,

j. Peningkatan **kesadaran sektor swasta dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup** untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

5.2 SASARAN POKOK

Pada bagian ini diuraikan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah untuk masing-masing misi yang disesuaikan dengan tahapan pembangunan jangka panjang Riau. Sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan pada tahap ketiga dan keempat merupakan sasaran pokok dan arah kebijakan yang mengalami perubahan. Pada tabel berikut ini ditampilkan uraian misi, sasaran pokok dan arah kebijakan secara terstruktur yang juga menyertakan sasaran pokok dan arah kebijakan lama untuk tahap pembangunan jangka menengah ke 1 dan 2 yang telah lalu dan sasaran pokok dan arah kebijakan baru hasil perubahan untuk pembangunan jangka panjang tahap pembangunan jangka menengah ke 3 dan ke 4.

Penjabaran sasaran pokok pembangunan jangka panjang, arah kebijakan pembangunan jangka panjang dan indikator pencapaian pembangunan jangka panjang pada setiap misi pembangunan jangka panjang lebih jelas sebagai berikut:

Tabel 5.1. Perumusan Sasaran Pokok Pembangunan dan Indikator Kinerja Pembangunan Jangka Panjang

Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok		Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Ket.
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode III Lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang • Pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang berbasis potensi dan masyarakat lokal yang berlandaskan pada nilai dan Budaya Melayu yang agamis dengan didukung peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas. • Pemantapan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang didukung dengan penerapan sistem informasi yang handal.				
Sasaran Pokok		1) Beroperasinya Kawasan Industri yang terintegrasi dengan pusat kegiatan ekonomi dan infrastruktur wilayah 2) Terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing 3) Pertumbuhan ekonomi Riau 4) Inflasi 5) IPM 6) Tingkat Pengangguran 7) Gini Ratio 8) Tingkat Kemiskinan	1) 3 Kawasan Industri 2) Terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dengan kontribusi dominan sektor non migas 3) 3,0 – 4,0 % 4) 4,0 – 5,0 % 5) 72 - 73 6) 6,0 - 7,0 % 7) 0,37 - 0,34 8) 6,0 – 7,0 %	
1	Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan utama tempat berlokasinya kegiatan ekonomi berskala regional yang berfungsi produksi, koleksi, pengolahan, dan distribusi barang dan jasa bagi Provinsi Riau, Sumatera bagian tengah, Pulau Sumatera, dan Negara-negara di wilayah Asia Tenggara.			
2	Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi darat berfungsi arteri primer yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan utama di wilayah Utara, Tengah, dan Selatan yang terintegrasi dengan jaringan jalan dan moda transportasi lainnya			
3	Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi laut berfungsi international port dan national port di pelabuhan Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok dan terbangunnya struktur kepelabuhan di Provinsi Riau secara hirarkis yang terintegrasi dengan transportasi laut dengan moda transportasi lainnya.			
4	Terbangunnya pembangkit energi listrik yang bersifat otonom yang dikelola daerah untuk pelayanan kebutuhan kawasan industri serta kebutuhan masyarakat perkotaan dan perdesaan, sebagai antisipasi krisis energi listrik negara			

Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok		Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Ket.
5	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan sektor perekonomian jangka panjang pada sektor non-migas yaitu pertanian, perikanan, dan peternakan yang terintegrasi pada sektor hulu dan hilir			
6	Terbangunnya industri berbasis agro (agroindustri) dan industri manufaktur lainnya yang menodorong nilai tambah produksi daerah.			
7	Tumbuhnya usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil di sektor primer, sekunder, dan tersier yang saling terkait dalam proses penambahan nilai, terutama di kawasan perdesaan.			
8	Tersedianya infrastruktur ekonomi dengan tingkat pelayanan yang berkualitas di bidang transportasi, komunikasi, informasi, produksi, lembaga keuangan dan pemasaran.			
9	Terbangunnya industri pariwisata yang didukung oleh jasa-jasa pelayanan transportasi, perhotelan, restaurant, telekomunikasi dan kegiatan perekonomian masyarakat			
10	Terjaganya kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian Nasional dan Provinsi Riau.			
11	Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan dan pusat-pusat kegiatan secara berhirarkis yang membentuk struktur ruang wilayah			
12	Terbangunnya keterpaduan pembangunan wilayah daratan, pesisir, laut, dan pulau- pulau kecil dalam pembentukan struktur dan pemanfaatan ruang wilayah			
13	Tersedianya prasarana dan utilitas perkotaan yang mendukung perkembangan pusat pertumbuhan dan kegiatan sesuai dengan skala pelayanan pusat yang bersangkutan.			
14	Tersedianya energi listrik, air bersih dan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir.			

Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok		Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Ket.
15	Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan orde kedua dan ketiga di wilayah Riau bagian Selatan dan Barat untuk menghindari peningkatan keterpusatan *(primacy)* Kota Pekanbaru dan mengurangi disparitas pertumbuhan antar wilayah.			
16	Optimalnya kerjasama pembangunan antar Provinsi Riau dengan provinsi tetangga dan negara tetangga			
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance and clean government)			
18	Terwujudnya penerapan sistem Informasi yang handal			
19	Tersedianya prasarana dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan memenuhi standar pelayanan minimum pendidikan			
20	Tersedianya prasarana dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memenuhi standar pelayanan minimum kesehatan untuk mendukung kualitas penduduk yang lebih baik			
21	Peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja sesuai dengan standar yang diakui secara internasional dalam rangka pembukaan peluang lapangan kerja baru terutama ditujukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat tempatan.			
22	Terjaminnya keamanan dan tumbuhnya partisipasi serta tanggung jawab masyarakat yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.			
23	Terwujudnya rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan.			
24	Terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupannya sesuai dengan standar kualitas lingkungan yang berlaku.			
25	Penurunan kejadian kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir, genangan, kebakaran hutan, pencemaran, dan penurunan kualitas lingkungan lainnya.			

Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok		Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Ket.
26	Terciptanya aparat pengendali dan pengawas lingkungan yang berkualitas dalam pelaksanaan tanggungjawab di bidang lingkungan hidup.			
27	Keterlibatan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengawasan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan.			
28	Terlaksananya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.			
29	Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung.			
30	Tercapainya kinerja pengelolaan lingkungan yang baik yang diindikasikan oleh pengakuan melalui penghargaan di bidang lingkungan hidup.			
31	Optimalnya kerjasama pembangunan antar Provinsi Riau dengan provinsi tetangga dan negara tetangga	1) Beroperasinya Pusat Referensi dan Promosi Kebudayaan Melayu 2) Nuansa Kebudayaan Melayu menjadi ciri khas praktek kehidupan masyarakat		
32	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance and clean government)			
33	Terwujudnya penerapan sistem Informasi yang handal			
34	Tersedianya prasarana dan pelayanan kesehatan yang bermutu yang memenuhi standar pelayanan minimum kesehatan untuk mendukung kualitas penduduk yang lebih baik			
35	Tersedianya sarana dan prasarana pusat referensi dan promosi Budaya Melayu.			
35	Terintegrasinya nilai-nilai Budaya Melayu dalam semua aspek kehidupan masyarakat			
37	Pengintegrasian Budaya Melayu pada perekonomian masyarakat dan pariwisata			
38	Terciptanya kehidupan yang agamis dan toleransi kerukunan antar umat beragama.			
39	Terwujudnya nilai-nilai positif dan mulia di kalangan masyarakat yang berlandaskan pada ajaran agama, sehingga dapat menjadi nilai utama di dalam masyarakat.			
40	Terwujudnya rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan.			

Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok		Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Ket.
41	Terwujudnya supremasi hukum secara konsisten dengan partisipasi masyarakat.			
42	Terwujudnya sebuah kehidupan masyarakat dalam ikatan yang kuat, cerdas, dan memiliki budaya politik yang sehat.			
43	Terwujudnya kerukunan hidup berdampingan antar masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi melalui penyadaran perlunya harmonisasi, saling menghormati, dan terbangunnya toleransi.			
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Periode IV Mewujudkan masyarakat berbudaya Melayu yang mandiri dan sejahtera dan pusat ekonomi Asia Tenggaran • Pemantapan dan memfungsinkan 3 (tiga) outlet yang terintegrasi dengan kawasan industry di Dumai, Tanjung Buton, dan Kuala Enok, serta pusat-pusat kegiatan ekonomi yang berbasis potensi dan masyarakat local yang berlandaskan pada nilai dan budaya Melayu yang agamis dengan didukung peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas. • Pemantapan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi yang didukung dengan penerapan sistem informasi yang handal.				
Sasaran Pokok		1) Beroperasinya Kawasan Industri yang terintegrasi dengan pusat kegiatan ekonomi dan infrastruktur wilayah 2) Terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing	1) 3 Kawasan Industri 2) Terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dengan kontribusi dominan sektor non migas 3) 4,0 - 5,0 % 4) 4,0 – 5,0 %	
1	Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan utama tempat berlokasinya kegiatan ekonomi berskala regional yang berfungsi produksi, koleksi, pengolahan, dan distribusi barang dan jasa bagi Provinsi Riau, Sumatera bagian tengah, Pulau Sumatera, dan Negara-negara di wilayah Asia Tenggara.			
2	Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi darat berfungsi arteri primer yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan utama di wilayah Utara, Tengah, dan Selatan yang terintegrasi dengan jaringan jalan dan moda transportasi lainnya			

Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok		Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Ket.
3	Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi laut berfungsi international port dan national port di pelabuhan Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok dan terbangunnya struktur kepelabuhan di Provinsi Riau secara hirarkis yang terintegrasi dengan transportasi laut dengan moda transportasi lainnya.	3) Pertumbuhan ekonomi Riau 4) Inflasi 5) IPM 6) Tingkat Pengangguran 7) Gini Ratio 8) Tingkat Kemiskinan	5) 73 - 75 6) 5,5 - 6,0 % 7) 0,34 - 0,30 8) 5,5 – 6,0 %	
4	Terbangunnya pembangkit energi listrik yang bersifat otonom yang dikelola daerah untuk pelayanan kebutuhan kawasan industri serta kebutuhan masyarakat perkotaan dan perdesaan, sebagai antisipasi krisis energi listrik negara			
5	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan sektor perekonomian jangka panjang pada sektor non-migas yaitu pertanian, perikanan, dan peternakan yang terintegrasi pada sektor hulu dan hilir			
6	Terbangunnya industri berbasis agro (agroindustri) dan industri manufaktur lainnya yang menodorong nilai tambah produksi daerah.			
7	Tumbuhnya usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil di sektor primer, sekunder, dan tersier yang saling terkait dalam proses penambahan nilai, terutama di kawasan perdesaan.			
8	Tersedianya infrastruktur ekonomi dengan tingkat pelayanan yang berkualitas di bidang transportasi, komunikasi, informasi, produksi, lembaga keuangan dan pemasaran.			
9	Terbangunnya industri pariwisata yang didukung oleh jasa-jasa pelayanan transportasi, perhotelan, restaurant, telekomunikasi dan kegiatan perekonomian masyarakat			
10	Terjaganya kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian Nasional dan Provinsi Riau.			
11	Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan dan pusat-pusat kegiatan secara berhirarkis yang membentuk struktur ruang wilayah			
12	Terbangunnya keterpaduan pembangunan wilayah daratan, pesisir, laut, dan pulau- pulau kecil dalam pembentukan struktur dan pemanfaatan ruang wilayah			

Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok		Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Ket.
13	Tersedianya prasarana dan utilitas perkotaan yang mendukung perkembangan pusat pertumbuhan dan kegiatan sesuai dengan skala pelayanan pusat yang bersangkutan.			
14	Tersedianya energi listrik, air bersih dan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir.			
15	Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan orde kedua dan ketiga di wilayah Riau bagian Selatan dan Barat untuk menghindari peningkatan keterpusatan *(primacy)* Kota Pekanbaru dan mengurangi disparitas pertumbuhan antar wilayah.			
16	Optimalnya kerjasama pembangunan antar Provinsi Riau dengan provinsi tetangga dan negara tetangga			
17	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance and clean government)			
18	Terwujudnya penerapan sistem Informasi yang handal			
19	Tersedianya prasarana dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan memenuhi standar pelayanan minimum pendidikan			
20	Tersedianya prasarana dan pelayanan kesehatan yang bermutu dan memenuhi standar pelayanan minimum kesehatan untuk mendukung kualitas penduduk yang lebih baik			
21	Peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja sesuai dengan standar yang diakui secara internasional dalam rangka pembukaan peluang lapangan kerja baru terutama ditujukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat tempatan.			
22	Terjaminnya keamanan dan tumbuhnya partisipasi serta tanggung jawab masyarakat yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.			
23	Terwujudnya rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan.			

Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok		Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Ket.
24	Terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupannya sesuai dengan standar kualitas lingkungan yang berlaku.			
25	Penurunan kejadian kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir, genangan, kebakaran hutan, pencemaran, dan penurunan kualitas lingkungan lainnya.			
26	Terciptanya aparat pengendali dan pengawas lingkungan yang berkualitas dalam pelaksanaan tanggungjawab di bidang lingkungan hidup.			
27	Keterlibatan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengawasan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan.			
28	Terlaksananya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.			
29	Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung.			
30	Tercapainya kinerja pengelolaan lingkungan yang baik yang diindikasikan oleh pengakuan melalui penghargaan di bidang lingkungan hidup.			
31	Optimalnya kerjasama pembangunan antar Provinsi Riau dengan provinsi tetangga dan negara tetangga	1) Beroperasinya Pusat Referensi dan Promosi Kebudayaan Melayu 2) Nuansa Kebudayaan Melayu menjadi ciri khas praktek kehidupan masyarakat		
32	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance and clean government)			
33	Terwujudnya penerapan sistem Informasi yang handal			
34	Tersedianya prasarana dan pelayanan kesehatan yang bermutu yang memenuhi standar pelayanan minimum kesehatan untuk mendukung kualitas penduduk yang lebih baik			
35	Tersedianya sarana dan prasarana pusat referensi dan promosi Budaya Melayu.			
35	Terintegrasinya nilai-nilai Budaya Melayu dalam semua aspek kehidupan masyarakat			
37	Pengintegrasian Budaya Melayu pada perekonomian masyarakat dan pariwisata			
38	Terciptanya kehidupan yang agamis dan toleransi kerukunan antar umat beragama.			

Arah Kebijakan Pembangunan dan Sasaran Pokok		Indikator	Target Kinerja Pembangunan	Ket.
39	Terwujudnya nilai-nilai positif dan mulia di kalangan masyarakat yang berlandaskan pada ajaran agama, sehingga dapat menjadi nilai utama di dalam masyarakat.			
40	Terwujudnya rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan.			
41	Terwujudnya supremasi hukum secara konsisten dengan partisipasi masyarakat.			
42	Terwujudnya sebuah kehidupan masyarakat dalam ikatan yang kuat, cerdas, dan memiliki budaya politik yang sehat.			
43	Terwujudnya kerukunan hidup berdampingan antar masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi melalui penyadaran perlunya harmonisasi, saling menghormati, dan terbangunnya toleransi.			

Tabel 5.2. Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Jangka Panjang Daerah Riau

Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan	
Misi 1 : Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian	1	Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan utama tempat berlokasinya kegiatan ekonomi berskala regional yang berfungsi produksi, koleksi, pengolahan, dan distribusi barang dan jasa bagi Provinsi Riau, Sumatera bagian tengah, Pulau Sumatera, dan Negara-negara di wilayah Asia Tenggara.	1	Pengembangan terminal regional yang berfungsi koleksi dan distribusi komoditi pada kota-kota pelabuhan utama
			2	Mendorong akselerasi pengembangan kawasan industri dan pusat-pusat aglomerasi industri di Dumai, Tanjung Buton, dan Kuala Enok
			3	Membangun dan memantapkan keterkaitan (integrasi) pengembangan kluster-kluster ekonomi berbasis masyarakat, khususnya komoditas karet, kelapa, sagu, perikanan dan kelapa sawit dengan kawasan industri
	2	Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi darat berfungsi arteri primer yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan utama di wilayah Utara, Tengah, dan Selatan yang terintegrasi dengan jaringan jalan dan moda transportasi lainnya	1	Pembangunan jalan Tol Pekanbaru - Dumai dan pengembangan Pelabuhan Dumai, Tj. Buton, dan Kuala Enok menuju terciptanya 3 (tiga) outlet utama Provinsi Riau yang terintegrasi dengan jaringan jalan dengan moda transportasi lainnya
			2	Mendorong percepatan koordinasi dan implementasi pembangunan jaringan kereta api regional sebagai bagian *Trans Sumatera Railway* yang terintegrasi dengan jaringan terminal antar moda transportasi lainnya
	3	Tersedianya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi laut berfungsi international port dan national port di pelabuhan Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok dan terbangunnya struktur kepelabuhan di Provinsi Riau secara hirarkis yang terintegrasi dengan transportasi laut dengan moda transportasi lainnya.	1	Mendorong terbangunnya infrastruktur dan pelayanan sarana transportasi laut berfungsi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul di pelabuhan Dumai, Tanjung Buton, Kuala Enok, dan terbangunnya struktur kepelabuhan secara hirarkis yang terintegrasi dengan transportasi laut dan moda transportasi lainnya
	4	Terbangunnya pembangkit energi listrik yang bersifat otonom yang dikelola daerah untuk pelayanan kebutuhan kawasan industri serta	1	Mendorong percepatan pembangunan pembangkit energi listrik milik daerah untuk memenuhi kecukupan elektrifikasi masyarakat dan kebutuhan industri

Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan	
		kebutuhan masyarakat perkotaan dan perdesaan, sebagai antisipasi krisis energi listrik negara	2	Mendorong terbangunnya pembangkit listrik dari sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi daerah
Misi 2 : Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan berdaya saing	1	Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan sektor perekonomian jangka panjang pada sektor non-migas yaitu pertanian, perikanan, dan peternakan yang terintegrasi pada sektor hulu dan hilir	1	Pemantapan pembangunan komoditas unggulan berbasis sumberdaya alam terbarukan dan potensi lokal yang selama ini telah ada namun belum berkembang antara lain karet, kelapa, sagu dan perikanan yang didukung oleh pengembangan industri hulu dan hilir
			2	Pemantapan dan rehabilitasi kegiatan ekonomi berbasis komoditas unggulan lokal dan berbasis masyarakat pada sektor pangan dan bahan baku industri pangan untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah
			3	Pemantapan pembangunan peternakan yang terintegrasi dengan potensi perkebunan kelapa sawit
			4	Menekan alih fungsi lahan dan perlindungan lahan pertanian untuk keberlanjutan produksi pangan daerah,
			5	Pemulihan ekosistem dan restorasi gambut untuk pengembangan pertanian dan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis sagu dan tanaman endemik lainnya
	2	Terbangunnya industri berbasis agro (agroindustri) dan industri manufaktur lainnya yang menodorong nilai tambah produksi daerah.	1	Mendorong pengembangan industri turunan *(derivative industries)* pada komoditi pertanian, khususnya kelapa sawit, kelapa, karet,
			2	Mendorong peningkatan nilai tambah *(value added)* pada sektor industri berbasis potensi lokal dan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi tepat guna khususnya pada industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan,
	3	Tumbuhnya usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil di sektor primer, sekunder, dan tersier yang saling terkait dalam proses penambahan nilai, terutama di kawasan perdesaan.	1	Pengembangan lembaga keuangan, ekonomi syariah dan peningkatan akses masyarakat dan UMKM terhadap sumber pembiayaan.
			2	Pengembangan usaha ekonomi rakyat berskala menengah dan kecil pada sektor sekunder dan tersier sesuai dengan kluster-kluster kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal,

Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan	
			3	Peningkatan kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan melalui pembangunan integrasi ekonomi dan hubungan kemitraan yang kuat antara usaha kecil, menengah dan usaha besar,
	4	Tersedianya infrastruktur ekonomi dengan tingkat pelayanan yang berkualitas di bidang transportasi, komunikasi, informasi, produksi, lembaga keuangan dan pemasaran.	1	Memperkuat kemampuan dan kapasitas penanganan angkutan barang dan penumpang *(handling)* antar moda pada lokasi pergantian antar moda *(transhipment point)*,
			2	Peningkatan aksesibilitas distribusi barang melalui penyediaan infrastruktur transportasi multi moda berfungsi pengumpan *(feeder)*,
			3	Membangun jaringan distribusi produk dan pengembangan kelembagaan pemasaran komoditas berbasis potensi lokal dan pemantapan sistem pemasaran dan kelembagaan pemasaran komoditas
			4	Pengembangan lembaga, ekonomi syariah keuangan dan peningkatan akses masyarakat dan UMKM terhadap sumber pembiayaan
	5	Terbangunnya industri pariwisata yang didukung oleh jasa-jasa pelayanan transportasi, perhotelan, restaurant, telekomunikasi dan kegiatan perekonomian masyarakat	1	Pengembangan pariwisata berbasis nilai cagar budaya dan alam khususnya pada koridor empat aliran sungai dan potensi pariwisata lainnya di Provinsi Riau
			2	Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan melalui pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat
	4	Terjaganya kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian Nasional dan Provinsi Riau.	1	Eksplorasi serta penerapan teknologi maju dalam penggalian sumber tambang baru terutama diluar migas
Misi 3 : Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah	1	Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan dan pusat-pusat kegiatan secara berhirarkis yang membentuk struktur ruang wilayah	1	Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan ekonomi berbasis potensi lokal dan masyarakat di wilayah Riau bagian Utara, Tengah, dan Selatan,
			2	Penyebaran fungsi distribusi dan koleksi barang dan jasa pada pusat-pusat pertumbuhan berskala wilayah dan lokal (PKW dan PKL) di wilayah Riau bagian Utara, Tengah, dan Selatan

Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan	
	2	Terbangunnya keterpaduan pembangunan wilayah daratan, pesisir, laut, dan pulau- pulau kecil dalam pembentukan struktur dan pemanfaatan ruang wilayah	1	Pembangunan pelabuhan laut dan penyeberangan secara bertahap untuk memperkuat struktur prasarana transportasi laut,
			2	Pembangünan infrastruktur ekonomi melalui pembangunan prasarana jalan dan angkutan sungai di kawasan perdesaan
	3	Tersedianya prasarana dan utilitas perkotaan yang mendukung perkembangan pusat pertumbuhan dan kegiatan sesuai dengan skala pelayanan pusat yang bersangkutan.	1	Pembangunan prasarana dan utilitas perkotaan yang mendukung perkembangan pusat pertumbuhan
	4	Tersedianya energi listrik, air bersih dan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir.	1	Penyediaan sumberdaya energi primer, air bersih dan fasilitas telekomunikasi di wilayah Riau bagian Utara, Tengah dan Selatan,
	6	Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan orde kedua dan ketiga di wilayah Riau bagian Selatan dan Barat untuk menghindarkan peningkatan keterpusatan *(primacy)* Kota Pekanbaru dan mengurangi disparitas pertumbuhan antar wilayah.	1	Pembangunan infrastruktur pedesaan (jalan, listrik, irigasi, air bersih, dan pasar) untuk mendukung modernisasi ekonomi pedesaan,
			2	Pembangunan infrastruktur hulu yang mendukung pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal dan masyarakat, seperti pusat-pusat penelitian dibidang pertanian yang dapat menyediakan kebutuan teknologi produksi dan pengolahan hasil,
Misi 4 : Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah	1	Optimalnya kerjasama pembangunan antar Provinsi Riau dengan provinsi tetangga dan negara tetangga	1	Memperkuat kerjasama pembangunan Provinsi Riau dengan provinsi lain dan negara tetangga dibidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan
Misi 5 : Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pemerintah daerah	1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (good governance and clean government)	1	Melakukan reformasi birokrasi untuk mencapai pelaksanan pemeritahan yang efisien dan efektif
			2	Menumbuhkan daya inovasi dan kreatifitas pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha.
			3	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah yang berbasis kompetensi untuk menumbuhkan daya inovasi dan kreatifitas pemerintahan.

Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan	
			4	Pengembangan etika kepemimpinan pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang sehat
			5	Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dengan berlandaskan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipatif.
			6	Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif.
			7	Penegakan dan perlindungan hukum secara menyeluruh untuk mendukung good governance and clean government
Misi 6 : Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal	1	Terwujudnya penerapan sistem Informasi yang handal	1	Pemantapan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan
			2	Pengembangan sistem informasi yang handal diterapkan untuk akselerasi terbangunnya sistem dan kemudahan dalam pendataan, perencanaan, dan monitoring perkembangan pembangunan daerah serta pelayanan publik yang prima.
Misi 7 : Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera	1	Tersedianya prasarana dan pelayanan pendidikan yang bermutu yang memenuhi standar pelayanan minimum pendidikan	1	Perluasan pembangunan prasarana dan peningkatan mutu pelayanan pendidikan kejuruan, dan dukungan pengembangan pendidikan dasar dan pendidikan tinggi,
			2	Peningkatan peran perguruan tinggi daerah dalam menyiapkan tenaga ahli dan tenaga profesional untuk mendukung pembangunan daerah
	2	Tersedianya prasarana dan pelayanan kesehatan yang bermutu yang memenuhi standar pelayanan minimum kesehatan untuk mendukung kualitas penduduk yang lebih baik	1	Perluasan pembangunan prasarana, sarana dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan (rujukan) masyarakat dan perlindungan kesehatan masyarakat miskin,
			2	Pemantapan kapasitas lembaga dan pelayanan kesehatan masyarakat,
			3	Peningkatan kualitas kependudukan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, HIV AIDS dan prilaku hidup bebas dalam kalangan generasi muda,

Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan	
	3	Peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja sesuai dengan standar yang diakui secara internasional dalam rangka pembukaan peluang lapangan kerja baru terutama ditujukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat tempatan.	1	Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pembangunan dan peningkatan kualitas balai-balai pelatihan kerja yang berbasis potensi lokal dan masyarakat serta perkembangan industri,
			2	Revitalisasi dan pemantapan peran Balai Latihan Kerja (BLK) dalam rangka mendorong pembangunan ketenagakerjaan daerah
Misi 8 : Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan	1	Tersedianya sarana dan prasarana pusat referensi dan promosi Budaya Melayu.	1	Pengembangan sarana dan prasarana pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara melalui pemantapan referensi dan promosi kebudayaan melayu
			2	Melestarikan Budaya Melayu di koridor empat aliran sungai dan wilayah Pesisir sebagai ciri khas Budaya Melayu Riau (*The Home Land of Melayu*)
	2	Terintegrasinya nilai-nilai Budaya Melayu dalam semua aspek kehidupan masyarakat	1	Memperkuat penerapan nilai Budaya Melayu dalam aspek kehidupan masyarakat melalui pengintegrasian pada semua jenjang dan jalur pendidikan dan pelatihan
			2	Peningkatan pembangunan untuk pelestarian lingkungan dan asimilasi kultural untuk menjaga dan memelihara heterogenitas budaya dengan Budaya Melayu sebagai payung kebudayaan
			3	Memperkuat penerapan Budaya Melayu melalui peran kelembagaan adat (LAM)
	3	Pengintegrasian Budaya Melayu pada perekonomian masyarakat dan pariwisata	1	Memperkuat pelestarian kebudayaan melayu melalui event budaya seperti pagelaran seni dan pertunjukan, kuliner serta pelestarian simbol budaya yang terintegrasi dengan potensi pariwisata daerah
			2	Pelestarian dan pemanfaatan Budaya Melayu yang bersinergi dengan pengembangan sektor pariwisata daerah
Misi 9 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak	1	Terciptanya kehidupan yang agamis dan toleransi kerukunan antar umat beragama.	1	Menerapkan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat, aktivitas pekerjaan, maupun dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, sehingga dapat berperan sebagai tenaga pendorong dan motivasi untuk mensukseskan

Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan	
				pembangunan.
	2	Terwujudnya nilai-nilai positif dan mulia di kalangan masyarakat yang berlandaskan pada ajaran agama, sehingga dapat menjadi nilai utama di dalam masyarakat.	1	Memajukan pendidikan agama di sekolah yang diarahkan untuk memperdalam pengetahuan agama serta membentuk sikap dan perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan agama.
Misi 10 : Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat	1	Terjaminnya keamanan dan tumbuhnya partisipasi dan tanggung jawab masyarakat yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban yang ditandai dengan menurunnya angka kriminalitas.	1	Melibatkan masyarakat dalam keamanan lingkungan dan meningkatkan tanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban umum melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan.
	2	Terwujudnya rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan.	1	Melaksanakan tanggung jawab aparat keamanan, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan kebudayaan
			2	Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan bagi pemeliharaan dan penjagaan keamanan dan ketertiban umum
Misi 11 : Mewujudkan lingkungan yang lestari	1	Terciptanya kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat untuk menyelenggarakan kehidupannya sesuai dengan standar kualitas lingkungan yang berlaku.	1	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Riau melalui pengurangan laju deforestasi dan degradasi hutan, pencemaran air, dan pencemaran udara
	2	Penurunan kejadian kerusakan lingkungan yang mengakibatkan banjir, genangan, kebakaran hutan, pencemaran, dan penurunan kualitas lingkungan lainnya.	1	Pengendalian penggunaan lahan dan sumber daya alam, khususnya di lahan gambut dan daerah rawan bencana, sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) lingkungan hidup.
			2	Pengendalian kerusakan ekosistem pesisir berupa abrasi pantai, intrusi air laut, dan kerusakan hutan mangrove
			3	Penanggulangan kebakaran hutan yang telah menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial masyarakat Provinsi Riau dan wilayah sekitamya.
	3	Terciptanya aparat pengendali dan pengawas lingkungan yang berkualitas dalam pelaksanaan	1	Peningkatan kompetensi aparat dalam pengawasan usaha/kegiatan yang berpotensi merusak dan mencemari lingkungan hidup.

Misi Daerah	Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan	
		tanggung jawab di bidang lingkungan hidup.	2	Peningkatan kapasitas lembaga dan aparat dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan.
	4	Keterlibatan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengawasan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan.	1	Pemberian akses dan fasilitas bagi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk berperan serta dalam pengawasan kerusakan dan pencemaran lingkungan
	5	Terlaksananya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.	1	Penguatan kapasitas lembaga dan aparatur penegak hukum dalam bidang penanggulangan kejahatan lingkungan hidup.
	6	Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung.	1	Pengendalian perburuan satwa liar dan mempertahankan keutuhan ekosistem kawasan lindung yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Riau
	7	Tercapainya kinerja pengelolaan lingkungan yang baik diindikasikan oleh pengakuan melalui penghargaan di bidang lingkungan hidup.	1	Peningkatan kesadaran sektor swasta dan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan
Misi 12 : Mewujudkan masyarakat madani	1	Terwujudnya supremasi hukum secara konsisten dengan partisipasi masyarakat.	1	Melaksanakan penegakan hak asasi manusia (HAM) serta kehidupan demokratis guna terwujudnya masyarakat yang mandiri.
			2	Mewujudkan supremasi hukum dengan dukungan masyarakat
	2	Terwujudnya sebuah kehidupan masyarakat dalam ikatan yang kuat, cerdas, dan memiliki budaya politik yang sehat.	1	Mewujudkan sebuah kehidupan masyarakat dalam ikatan yang kuat, cerdas dan memiliki budaya politik yang sehat,
			2	Menciptakan demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan mewujudkan transparansi publik.
	3	Terwujudnya kerukunan hidup berdampingan antar masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi melalui penyadaran perlunya harmonisasi, saling menghormati, dan terbangunnya toleransi.	1	Mendorong kerukunan hidup berdampingan antar masyarakat dengan tingkat heterogenitas (pluralitas) yang tinggi melalui penyadaran perlunya harmonisasi, saling menghormati dan toleransi,

Perumusan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Riau untuk mencapai visi pembangunan dijabarkan dalam penegasan sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pokok visi pembangunan, yaitu sebagai pusat perekonomian dan pusat kebudayaan melayu. Uraian misi daerah, sasaran pokok jangka panjang, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah menurut pokok visi, misi daerah, sasaran pokok jangka panjang, arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, dan indikator pokok pembangunan yang ingin dicapai akan dijelaskan pada bahagian ini. Misi daerah untuk mencapai pokok visi daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Pokok Visi **Mewujudkan Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian akan dicapai dengan misi daerah sebagai berikut:**

Misi 1 : Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian
Misi 2 : Mewujudkan perekonomian yang berdayasaing dan berkelanjutan
Misi 3 : Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah
Misi 4 : Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah
Misi 5 : Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah daerah
Misi 6 : Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal
Misi 7 : Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera
Misi 10 : Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat
Misi 11 : Mewujudkan lingkungan yang lestari

Pokok Visi **Mewujudkan Provinsi Riau sebagai Pusat Kebudayaan Melayu akan dicapai dengan misi daerah sebagai berikut:**

Misi 4 : Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah
Misi 5 : Meningkatkan kemampuan dan kompetensi Pemerintah daerah
Misi 6 : Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal
Misi 7 : Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera
Misi 8 : Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan
Misi 9 : Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak
Misi 10 : Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat
Misi 12 : Mewujudkan masyarakat madani

Sebagai ukuran tercapainya tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Riau dalam 20 tahun mendatang kebijakan prioritas pembangunan diarahkan kepada pokok visi, Misi dan pencapaian sasaran - sasaran pokok berserta indikator sebagai berikut :

5.3 PENGINTEGRASIAN REKOMENDASI KLHS KE DALAM EVALUASI RPJPD PROVINSI RIAU 2005-2025

Berdasarkan hasil KLHS terhadap Rancangan Awal Evaluasi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025, Pokja PL menilai bahwa 125 Arah Kebijakan di atas sudah baik karena masing-masing item arah kebijakan sudah merefleksikan prinsip-prinsip keterkaitan, prinsip keseimbangan, serta prinsip keadilan. Namun, Pokja PL menilai bahwa ada 8 arah kebijakan yang patut diberikan rekomendasi dan perlu diintegrasikan ke dalam Rancangan Awal Evaluasi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025. Pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam arah kebijakan Evaluasi RPJPD Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam arah kebijakan Evaluasi RPJPD Provinsi Riau tersebut selanjutnya dijadikan masukan dalam perumusan kebijakan umum pembangunan Provinsi Riau tahap lima tahun ke-3 dan ke-4. Pengintegrasian rekomendasi KLHS ini merupakan penguatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan yang akan dilakukan. Hal ini diperlukan agar Program Pembangunan sebagai turunan dari Arah Kebijakan Evaluasi RPJPD nantinya tetap berada dalam koridor prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 5.4. Pengintegrasian rekomendasi KLHS ke dalam arah kebijakan Evaluasi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025

No	Arah Kebijakan	Rekomendasi	Integrasi Rekomendasi ke dalam Arah Kebijakan Evaluasi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025
1.	1.1.1. Mendorong pembangunan sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, industri yang berbasis pertanian, untuk menggantikan kedudukan migas sebagai sektor utama penghasilan daerah	1. Pembangunan sektor ekonomi unggulan dengan mempertahankan nilai konservasi tinggi ekosistem dan sesuai RTRWP 2. Implementasi pembangunan sektor ekonomi rendah emisi (*Low Emission Development/LED*) sesuai *bussines as ussual* (*BAU*) 3. Pembangunan sektor ekonomi unggulan menghindari kawasan rawan bencana 4. Mengakomodir tenaga kerja tempatan (lokal) sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Inisiasi dan implementasi kebijakan satu peta (one map policy) 6. Audit investigatif dan resolusi konflik pada izin usaha berbasis lahan 7. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum pada izin usaha berbasis lahan 8. Peningkatan kualitas sarana prasarana yang berhubungan langsung dalam proses pembelajaran 9. Penerapan kebijakan sekolah unggul pada seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah 10. Sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat pendatang akan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya melayu 11. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi	• Dalam membuka dan atau mengembangkan lahan pertanian tetap memegang prinsip nilai-nilai konservasi ekosistem dengan tidak merusak atau meminimalisir kerusakan atau penurunan keanekaragaman hayati serta mempertimbangkan nilai jasa ekosistem yang terkandung pada suatu kawasan • Mengimplementasikan pembangunan sektor ekonomi rendah emisi dalam pengembangan industri pembangunan. Pengembangan wilayah dan industri diharapkan meminimalisir emisi, terutama GRK. • Pembangunan sektor ekonomi akan berdampak pada migrasi penduduk ke wilayah tersebut, oleh karena itu hindari membangun di wilayah yang diduga rawan bencana • Pengembangan dunia usaha, termasuk industri, diharapkan mengutamakan tenaga kerja lokal. Menerapkan sistem rekrutmen tenaga kerja dengan terlebih dahulu memberikan pelatihan dan orientasi kerja, guna mengantisipasi tenaga kerja lokal yang rendah kompetensi dan skill. • Menerapkan kebijakan satu peta (*one map policy*) dalam pembangunan dan pengembangan pertanian dan industri dengan pengembangan kawasan lain. • Perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan yang berorientasi pada kompetensi dan skill yang dibutuhkan dunia kerja. • Melakukan dan fasilitasi untuk sosialisasi nilai-nilai budaya Melayu dan penerapannya, terutama terhadap tenaga kerja dari luar Riau yang terlibat dalam sektor pertanian dan industri yang dibangun. • Kordinasi guna sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, terkait dengan pembangunan dan pengembangan pertanian dan industri.

No	Arah Kebijakan	Rekomendasi	Integrasi Rekomendasi ke dalam Arah Kebijakan Evaluasi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025
		antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui pembentukan gugus kerja	• Memastikan lahan dan kawasan yang dibangun untuk pertanian dan industri tidak menimbulkan konflik melalui audit investigatif terhadap lahan dan kawasan yang akan digunakan.
2.	1.1.3 . Membangun pusat-pusat aglomerasi industri dan terminal regional yang berfungsi distribusi dan koleksi komoditi pada kota-kota pelabuhan utama	1. Mengoptimalkan pengembangan kawasan industri eksisting dan IPAL terpadu 2. Penerapan *clean production* 3. Penerapan kebijakan *ecogreen* 4. Mengakomodir tenaga kerja tempatan (lokal) sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pembebasan lahan 6. Melakukan sosialisasi nilai-nilai budaya melayu terhadap pekerja pendatang melalui integrasi dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 7. Implementasi perizinan terintegrasi dan percepatan terbitnya Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau	• Untuk menghindari kerusakan dan penurunan keanekaragaman hayati melalui pembukaan kawasan baru, maka pembangunan pusat industri dan terminal lebih diutamakan melalui pengembangan pada kawasan yang sudah ada industri dan melalui pengelolaan IPAL terpadu. • Membangun dan pengembangan pusat industri dan terminal diharuskan menerapkan *clean production* dan kebijakan *ecogreen*. • Pengembangan pusat-pusat industri diharapkan mengutamakan tenaga kerja lokal. Menerapkan sistem rekrutmen tenaga kerja dengan terlebih dahulu memberikan pelatihan dan orientasi kerja, guna mengantisipasi tenaga kerja lokal yang rendah kompetensi dan skill. • Melakukan dan fasilitasi untuk sosialisasi nilai-nilai budaya Melayu dan penerapannya, terutama terhadap tenaga kerja dari luar Riau yang terlibat dalam operasional pusat-pusat industri. Salah satu solusi dapat dilakukan melalui memasukkan atau mengintegrasikan nilai-nilai budaya Melayu ke dalam K3. • Melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam pembebasan/penggunaan lahan yang digunakan sebagai kawasan industri dan terminal yang akan dibangun/dikembangkan.
3.	1.3.2 . Membangun jaringan jalan provinsi dan kabupaten yang kokoh yang dapat memperlancar lalu lintas produk pertanian dan industri	1. Pembangunan jaringan jalan provinsi dan kabupaten memperhatikan peruntukan kawasan serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum 2. Pembangunan jaringan jalan provinsi dan kabupaten memperhatikan peruntukan	• Melakukan kajian dan pengawasan terhadap kawasan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan jalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini diharapkan dapat menghindari eksploitasi kawasan yang berdampak pada berkurang atau hilangnya keanekaragaman hayati dan daya dukung ekosistem. • Selain isu strategis dalam hal keanekaragaman hayati dan daya dukung ekosistem, pembangunan jalan juga harus memperhatikan

No	Arah Kebijakan	Rekomendasi	Integrasi Rekomendasi ke dalam Arah Kebijakan Evaluasi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025
		kawasan 3. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum serta pembebasan lahan mengikuti ketentuan yang berlaku 4. Sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat pendatang akan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya melayu 5. Pembentukan tim terpadu lintas K/L, SKPD dalam percepatan perizinan	dan dilakukan kajian kepemilikan lahan agar tidak menimbulkan konflik sosial. • Terbukanya akses melalui pembangunan jalan selalu diikuti dengan terbentuknya kawasan pemukiman baru. Oleh karena itu, pemerintah harus mensosialisasikan dan memfasilitasi pada daerah pemukiman baru tentang nilai-nilai budaya Melayu • Membentuk tim terpadu lintas K/L, SKPD, guna mempermudah koordinasi dalam perizinan.
4.	1.3.3 . Membangun jalur kereta api sebagai bagian dari Trans Sumatera Railway terutama bagi angkutan barang jarak jauh dan massal.	1. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum pada kawasan konservasi yang dilalui jalur kereta api 2. Sosialisasi dan pemberdayaan melalui partisipasi masyarakat akan pentingnya menjaga kawasan hutan 3. Implementasi kebijakan satu peta (*one map policy*) 4. Sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat pendatang akan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya melayu 5. Pembentukan tim terpadu lintas K/L, SKPD dalam percepatan perizinan jaringan kereta api	• Pembangunan rel kereta api harus diawali dengan kajian terhadap lingkungan yang terkait dengan hilang atau berkurangnya keanekaragaman hayati dan daya dukung ekosistem, dengan pengawasan dan penegakan hukum secara tegas • Peruntukan lahan pembangunan rel kereta api haruslah mengacu pada cara pandang kawasan sebagai suatu bagian tak terpisahkan dengan kawasan lain yang terkait (kebijakan satu peta *one map policy*) • Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dalam menjaga kawasan hutan yang berbatasan dengan jalur rel kereta api, agar keberadaan kawasan sekitar tetap terjaga sebagai daya dukung terhadap keberadaan rel kereta api. • Sosialisasi dan fasilitasi pada daerah dengan pendatang baru, baik sebagai tenaga kerja maupun efek ekonomi dari dibangunnya rel kereta api, tentang nilai-nilai budaya Melayu. • Membentuk tim terpadu lintas K/L, SKPD, guna mempermudah koordinasi dalam perizinan.
5.	1.6.1 . Membangun bandar udara baru berfungsi sebagai Pusat Penyebaran	1. Pengawasan dan penegakan hukum pada kawasan konservasi yang berbatasan langsung	• Melakukan kajian lingkungan untuk meminimalisir pengurangan atau hilangnya keanekaragaman hayati dan berkurangnya daya dukung ekosistem pada kawasan yang akan digunakan sebagai bandar udara.

No	Arah Kebijakan	Rekomendasi	Integrasi Rekomendasi ke dalam Arah Kebijakan Evaluasi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025
	Primer sebagai pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II	dengan bandar udara baru 2. Pengawasan dan penegakan hukum pada kawasan konservasi yang berbatasan langsung dengan bandar udara baru 3. Sosialisasi dan pemberdayaan melalui partisipasi masyarakat akan pentingnya menjaga kawasan hutan 4. Implementasi kebijakan satu peta (*one map policy*) 5. Sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat pendatang akan pentingnya menjaga nilai-nilai budaya melayu 6. Pembentukan tim terpadu lintas K/L, SKPD dalam percepatan perizinan bandar udara baru	Pengawasan dan penegakan hukum secara tegas pada kawasan konservasi yang berbatasan langsung dengan bandar udara. • Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dalam menjaga kawasan hutan yang berbatasan dengan badar udara, agar keberadaan kawasan sekitar tetap terjaga sebagai daya dukung terhadap keberadaan bandar udara. • Melakukan kajian wilayah pembangunan bandara sebagai kajian kawasan ekosistem dengan prinsip satu kesatuan dengan kawasan sekitar (kebijakan *one map policy*). • Sosialisasi dan fasilitasi pada daerah dengan pendatang baru, baik sebagai tenaga kerja maupun efek ekonomi dari dibangunnya rel kereta api, tentang nilai-nilai budaya Melayu. • Membentuk tim terpadu lintas K/L, SKPD, guna mempermudah koordinasi dalam perizinan.
6.	2.1.1 . Mendorong pertumbuhan sektor ekonomi unggulan, yakni industri pengolahan, pertanian, pertambangan, dan jasa untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dengan dukungan sektor-sektor prospektif yang secara agregatif akan memberikan kontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi, yaitu sektor perikanan, peternakan, dan pariwisata	1. Mengimplementasikan IPAL terpadu pada kawasan industri 2. Pembangunan pelabuhan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan pertumbuhan industri 3. Penerapan kebijakan *ecogreen* pusat pertumbuhan industri 4. Melakukan pemberdayaan masyarakat lokal dengan pelatihan sesuai kebutuhan pada pusat pertumbuhan industri 5. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pembebasan lahan 6. Memberikan pemahaman nilai-nilai budaya melayu yang terintegrasi dengan kesehatan dan	• Membangun sistem IPAL terpadu pada suatu kawasan industri agar memudahkan pengawasan. • Melakukan kajian terhadap ekosistem untuk mengurangi dampak penurunan atau hilangnya keanekaragaman hayati dan menyesuaikan dengan daya dukung dan daya dukung ekosistem. • Mewajibkan penerapan kebijakan *ecogreen* dalam konsep membangun pusat pertumbuhan industri. • Pengembangan pusat-pusat industri diharapkan mengutamakan tenaga kerja lokal. Menerapkan sistem rekrutmen tenaga kerja dengan terlebih dahulu memberikan pelatihan dan orientasi kerja, guna mengantisipasi tenaga kerja lokal yang rendah kompetensi dan skill. • Melakukan dan fasilitasi untuk sosialisasi nilai-nilai budaya Melayu dan penerapannya, terutama terhadap tenaga kerja dari luar Riau

No	Arah Kebijakan	Rekomendasi	Integrasi Rekomendasi ke dalam Arah Kebijakan Evaluasi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025
		keselamatan kerja (K3) 7. Percepatan terbitnya Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau	yang terlibat dalam operasional pusat-pusat industri. Salah satu solusi dapat dilakukan melalui memasukkan atau mengintegrasikan nilai-nilai budaya Melayu ke dalam K3. • Pengawasan dan penegakan hukum dalam pembebasan lahan dan mempercepat kepastian tata ruang (RTRW) Provinsi Riau.
7.	2.2.3 . Membangun obyek dan destinasi pariwisata, menyediakan prasarana dan sarana penunjang, dan meningkatkan pelayanan jasa kepariwisataan, termasuk pengembangan wisata minat khusus dan agrowisata yang terintegrasi dengan perlindungan plasma nutfah dan spesies dilindungi.	1. Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan obyek dan destinasi pariwisata 2. Pembangunan obyek dan destinasi pariwisata mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung ekosistem 3. Penerapan kebijakan ekowisata berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat 4. Melakukan pemberdayaan masyarakat lokal dengan pelatihan sesuai kebutuhan pada pembangunan obyek dan destinasi pariwisata 5. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pembebasan lahan 6. Melakukan sosialisasi nilai-nilai budaya melayu terhadap pendatang 7. Percepatan terbitnya Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau	• Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pembangunan dan pengelolaan objek dan destinasi wisata dipandang penting mengingat kearifan lokal yang sudah dimiliki masyarakat lokal, juga penting untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. • Pembangunan dan pengembangan objek wisaya diwajibkan berorientasi terhadap daya dukung dan daya tampung ekosistem. • Objek wisata yang berorientasi diutamakan mengarah pada ekowisata yang berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat. • Tersedianya objek wisata akan membuka akses masyarakat luar terhadap suatu wilayah, baik terbentuknya pemukiman maupun pendatang untuk keperluan wisata. Oleh karena itu, perlu disosialisasikan dan difasilitasi pemahaman masyarakat pendatang tentang nilai-nilai budaya Melayu. • Melakukan pengawasan dan penegakan hukum dalam pembebasan laha untuk keperluan objek wisata, serta percepatan terbitnya Perda RTRW Provinsi Riau.
8.	2.5.1 . Meningkatkan upaya eksplorasi dan penerapan teknologi eksploitasi migas untuk peningkatan produksi; pelibatan pemangku kepentingan di daerah dalam produksi	1. Penerapan 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada industri migas 2. Penerapan kebijakan *ecogreen* pembangunan industri migas 3. Melakukan pemberdayaan masyarakat lokal dengan pelatihan sesuai kebutuhan industri	• Peningkatan produksi migas dengan penerapan teknologi haruslah diiringi dengan upaya penanganan limbah yang lebih baik, diutamakan menerapkan 3R (*reduce, reuse, recycle*). • Menerapkan kebijakan *ecogreen* dalam membangun dan pengembangan industri migas. • Pemberdayaan tenaga kerja lokal dan memberikan pelatihan sesuai

No	Arah Kebijakan	Rekomendasi	Integrasi Rekomendasi ke dalam Arah Kebijakan Evaluasi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025
	migas; perkuatan aspek hukum; dan kelembagaan bagi hasil yang lebih adil	migas 4. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dalam pembebasan lahan 5. Memberikan pemahaman yang terintegrasi dengan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 6. Percepatan terbitnya Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau	kebutuhan industri migas agar tenaga kerja lokal memiliki kompetensi dan skill sesuai kebutuhan. • Terbukanya akses pendatang dari luar Riau sebagai akibat dari tersedia lapangan pekerjaan, oleh karena itu pemahaman tenaga kerja pendatang terhadap budaya Melayu sebagai tradisi di Riau harus diperhatikan. Alternatif disarankan untuk mengintegrasikan budaya Melayu ke dalam K3. • Pengawasan dan penegakan hukum dalam pembebasan lahan serta percepatan Perda RTRW Provinsi Riau menjadi penting agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dan konflik.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah provinsi, terutama dalam RPJPD. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Peraturan daerah tentang RPJPD wajib menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan perubahan RPJPD Provinsi Riau 2005-2025 dengan sebaik-baiknya;
3. Gubernur Riau berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintahan provinsi, dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu harus disosialisasikan secara luas kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota Provinsi dan segenap pemangku kepentingan *(stake holder)*, untuk dapat memahaminya secara mendalam dan dapat menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing-masing;
4. DPRD Provinsi Riau berkewajiban menetapkan dan melaksanakan peraturan daerah ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam penjabarannya pada RPJMD maupun dokumen perencanaan lainnya. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen perencanaan selanjutnya, terutama kaitannya dengan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau;
5. Pemerintah Kabupaten dan kota dalam menyusun RPJPD daerahnya, mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi, dan bagi daerah yang telah menyusun RPJPD melakukan penyerasian dalam RPJMD atau menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD;
6. Tokoh masyarakat, pimpinan organisasi keagamaan, lembaga budaya, komunitas adat, organisasi sosial, kalangan dunia usaha, organisasi kepemudaan dan lembaga kemasyarakatan lainnya, diharapkan ikut bertanggungjawab dalam menjadikan acuan penyusunan program dan kegiatannya serta mengawasi pelaksanaanya;
7. Pimpinan perguruan tinggi di daerah ini, ikut bertanggungjawab dalam pengawasan pada penjabaran lebih lanjut dalam dokumen perencanaan daerah maupun pelaksanaannya oleh pemerintah daerah serta semua pemangku kepentingan (*stakeholder*);
8. Dalam melaksanakan perubahan RPJPD Provinsi Riau tahun 2005- 2025, Pemerintah Provinsi Riau wajib menerapkan 3 pilar dari *Good Governance* yang meliputi **transpartasi, akuntabilitas, dan partisipasi** untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam perubahan RPJPD Provinsi Riau tahun 2005 – 2025 ini, **Transparansi :** berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (*reliable*). Transportasi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau. **Akuntabilitas :** atau

accountability adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, impelementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi. **Partisipasi :** pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu dinas dan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada pemerintah Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) wajib menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program setiap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

GUBERNUR RIAU,

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN